

LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Agustus 2026





LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Sulawesi Selatan

AGUSTUS 2026



VISI **Bank Indonesia**

Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia Maju.



MISI **Bank Indonesia**

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
3. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional;
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional;
6. Turut meningkatkan inklusi ekonomi-keuangan, dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja Bank Indonesia; dan
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

VISI **Kantor Perwakilan Bank Indonesia** **Dalam Negeri**

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

MISI **Kantor Perwakilan Bank Indonesia** **Dalam Negeri**

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dan kehandalan Sistem Pembayaran (SP) untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

Kata Pengantar

Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan disusun dan disajikan setiap triwulan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, mencakup aspek pertumbuhan ekonomi, inflasi, stabilitas keuangan daerah dan pengembangan akses keuangan, penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat, serta prospek perekonomian ke depan. Laporan Perekonomian ini di samping bertujuan untuk memberikan masukan bagi Kantor Pusat Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para *stakeholders* di daerah dalam membuat keputusan. Dengan demikian, keberadaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat semakin berperan sebagai *economic advisor* dan *strategic partner* bagi *stakeholders* di wilayah kerjanya.

Dalam penyusunan kajian ini, kami memanfaatkan data sekunder yang diterbitkan atau yang disediakan oleh berbagai institusi. Selain itu, kami juga menggunakan data primer dan informasi yang kami peroleh dari hasil survei dan liaison atau hasil kunjungan ke sejumlah perusahaan besar di Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak, terutama bagi Bapak/Ibu yang telah berkontribusi dalam *sharing* pemikiran dan membantu dalam penyediaan data atau informasi yang lengkap, akurat dan terkini. Saran serta masukan dari para *stakeholders* sangat kami harapkan agar ke depan kajian yang kami susun menjadi semakin lebih baik.

Makasar, Agustus 2026

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Rizki Ernadi Wimanda
Direktur Eksekutif

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar isi	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Tabel	ix
Tabel Indikator Makroekonomi	x
A. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi	x
B. Perbankan Berdasarkan Lokasi Proyek	xiii
C. Perbankan Berdasarkan Lokasi Bank	xv
D. Grafik Indikator	xvi
Ringkasan Eksekutif	xx

01 Perkembangan Makro Ekonomi Daerah

1.1. Pertumbuhan Ekonomi	2
1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran	2
1.2.1. Konsumsi	3
1.2.2. Investasi	5
1.2.3. Ekspor dan Impor	6
1.3. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	8
1.3.1. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9
1.3.2. Lapangan Usaha Pertambangan	10
1.3.3. Lapangan Usaha Industri Pengolahan	11
1.3.4. Lapangan Usaha Perdagangan	12
1.3.5. Lapangan Usaha Konstruksi	13
BOKS 1	15
Transmisi Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Kegiatan Dunia Usaha Di Sulawesi Selatan	

02 Perkembangan Inflasi Daerah

2.1. Kondisi Umum Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan	20
2.2. Perkembangan Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II 2026	20
2.3. Perkembangan Inflasi Spasial Provinsi Sulawesi Selatan	23
BOKS 2	26
Penguatan Sinergi Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan Melalui Pelaksanaan <i>High Level Meeting</i> TPID Jelang HBKN Iduladha 2026	

03 Pembiayaan Daerah

3.1. Stabilitas Keuangan Daerah	32
3.1.1. Asesmen Sektor Rumah Tangga	32
3.1.2. Asesmen Sektor Korporasi	34
3.1.3. Asesmen Sektor Institusi Keuangan Perbankan	37
3.2. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	40
BOKS 3	44
KKS x DIGIFEST 2026: Wastra Naik Kelas, Digitalisasi Meluas, Ekonomi Kreatif Sulawesi Selatan Melesat	

04 Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

4.1. Sistem Pembayaran	50
4.1.1. Transaksi BI-FAST	50
4.1.2. Transaksi SKNBI	50
4.1.3. Transaksi BI-RTGS	51
4.1.4. Transaksi APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu)	51
4.1.5. Ketersediaan Layanan Infrastruktur Sistem Pembayaran Nontunai	52
4.1.6. Proses Elektronifikasi Bantuan Sosial Nontunai (BSNT)	52
4.1.7. Progres Implementasi QRIS	53
4.1.8. Perkembangan Ekonomi Digital Berdasarkan Transaksi <i>e-Commerce</i>	54
4.1.9. Uang Elektronik	54
4.1.10. Transaksi Jual-Beli Valuta Asing	55
4.2. Pengelolaan Uang Rupiah	55
4.2.1. Perkembangan Aliran Uang Kartal	55
BOKS 4	57
Sultan Qris Run 2026: 7 Tahun Qris Menuju Ekosistem Pembayaran Digital yang Semakin Inklusif	

05 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

5.1. Ketenagakerjaan	62
5.1.1. Konsumsi Pemerintah	62
5.1.2. Pengangguran	62
5.2. Kemiskinan dan Kesenjangan	64
5.2.1. Kesejahteraan Petani	66

06

Prospek Perekonomian Daerah

6.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi	70
6.2 Prospek Inflasi	75
Lampiran	79
Daftar Istilah	90

Daftar Grafik

01

Perkembangan Makro Ekonomi Daerah

Grafik 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Sulawesi Selatan dan Nasional	2
Grafik 1.2	Pangsa PDRB Sulawesi Selatan terhadap wilayah Sulampua	2
Grafik 1.3	Perkembangan Konsumsi Domestik	3
Grafik 1.4	Konsumsi Rumah Tangga dan Indeks Penjualan Riil	3
Grafik 1.5	Perkembangan Survei Konsumen	4
Grafik 1.6	Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga	4
Grafik 1.7	Perkembangan Kredit Konsumsi	4
Grafik 1.8	Pengadaan Semen	4
Grafik 1.9	Kredit Investasi dan Modal Kerja	6
Grafik 1.10	PMA dan PMDN	6
Grafik 1.11	BBNKB I	6
Grafik 1.12	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa & Ekspor LN Nonmigas	6
Grafik 1.13	Perkembangan Ekspor Nikel dan Besi Baja Pertumbuhan Impor Luar Negeri Non Migas	7
Grafik 1.14	Sulsel Berdasarkan Penggunaan	8
Grafik 1.15	Perkembangan Trade Balance Sulsel	8
Grafik 1.16	Produksi Padi dan Luas Panen	9
Grafik 1.17	Produksi Perikanan Sulawesi Selatan	9
Grafik 1.18	Perkembangan Ekspor Pertanian & Perikanan	9
Grafik 1.19	Nilai Tukar Usaha Pertanian	9
Grafik 1.20	Kredit LU Pertanian	10
Grafik 1.21	Ekspor Nikel	10
Grafik 1.22	Harga Nikel	10
Grafik 1.23	Harga Minyak WTI	11
Grafik 1.24	Kredit Pertambangan	11
Grafik 1.25	Impor Gandum	11
Grafik 1.26	Harga Gandum	11
Grafik 1.27	Impor Bahan Baku	12
Grafik 1.28	Penggunaan Listrik Industri	12
Grafik 1.29	Kredit Industri Pengolahan	12
Grafik 1.30	Indeks Penjualan Riil Kota Makassar	12
Grafik 1.31	Survei Konsumen	13
Grafik 1.32	Penjualan Kendaraan Bermotor	13
Grafik 1.33	Kredit Perdagangan	13
Grafik 1.34	Pengadaan Semen	13
Grafik 1.35	SKDU LU Konstruksi	14

Grafik 1.36.	PMA dan PMDN	14
Grafik 1.37.	Kredit Konstruksi	14

02

Perkembangan Inflasi Daerah

Grafik 2.1	Perkembangan Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan	20
Grafik 2.2	Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK Provinsi di Sulampua pada Triwulan II 2026	20
Grafik 2.3	Perkembangan Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan	21
Grafik 2.4	Perkembangan Produksi Padi Provinsi Sulawesi Selatan	21
Grafik 2.5	Produksi Cabai Rawit Sulsel	22
Grafik 2.6	Harga Jagung Tingkat Peternak Sulsel	22
Grafik 2.7	Pergerakan Harga Emas Global	23

03

Pembiayaan Daerah

Grafik 3.1	Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Kerja Saat Ini	32
Grafik 3.2	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga	32
Grafik 3.3	Pangsa Kredit dan DPK RT terhadap Total Kredit dan DPK Sulawesi Selatan	32
Grafik 3.4	Indeks Ekspektasi Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Kerja	32
Grafik 3.5	Porsi Pengeluaran RT Sulawesi Selatan	33
Grafik 3.6	Pertumbuhan Kredit Sektor Rumah Tangga	33
Grafik 3.7	<i>Non-performing Loan</i> (NPL) Kredit Sektor Rumah Tangga	34
Grafik 3.8	Komposisi Pertumbuhan DPK Sektor Rumah Tangga	34
Grafik 3.9	Pangsa DPK Sektor Rumah Tangga	34
Grafik 3.10	Komposisi Impor Sulawesi Selatan	35
Grafik 3.11	Liaison Komposisi Biaya Korporasi	35
Grafik 3.12	Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	35
Grafik 3.13	PMI Negara Mitra Dagang	35
Grafik 3.14	Perkembangan Kredit Korporasi	35
Grafik 3.15	NPL Kredit Korporasi	36
Grafik 3.16	Perkembangan Kredit Berdasarkan Sektor <i>Tradable</i>	36

Grafik 3.17	Perkembangan Kredit Berdasarkan Sektor Non-Tradable	36	Grafik 4.10	Perkembangan BSNT PKH 2023-2026	52
Grafik 3.18	Pertumbuhan DPK Korporasi Sulawesi Selatan	36	Grafik 4.11	Perkembangan BSNT Program Sembako 2023-2026	53
Grafik 3.19	Rasio ROA Perbankan di Sulawesi Selatan	37	Grafik 4.12	Perkembangan Jumlah <i>Merchant</i> QRIS Bulanan 2023-2026	53
Grafik 3.20	Rasio BOPO Perbankan di Sulawesi Selatan	37	Grafik 4.13	Pangsa <i>Merchant</i> QRIS Berdasarkan Kategori Usahanya Triwulan II 2026	53
Grafik 3.21	Pertumbuhan Kredit Perbankan Sulawesi Selatan	37	Grafik 4.14	Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS Bulanan Sulsel 2023-2026	53
Grafik 3.22	NPL Perbankan di Sulawesi Selatan	38	Grafik 4.15	Perkembangan Nominal Transaksi QRIS Sulsel 2023-2026	54
Grafik 3.23	Pertumbuhan DPK Perbankan Sulawesi Selatan	38	Grafik 4.16	Perkembangan Volume Transaksi QRIS Sulsel 2023-2026	54
Grafik 3.24	Pertumbuhan LDR Perbankan Sulawesi Selatan	38	Grafik 4.17	Perkembangan Nominal Transaksi <i>e-Commerce</i> 2023-2026	54
Grafik 3.25	Penyaluran Pembiayaan Syariah	38	Grafik 4.18	Perkembangan Volume Transaksi <i>e-Commerce</i> 2023-2026	54
Grafik 3.26	Pangsa Pembiayaan Syariah Terhadap Total	39	Grafik 4.19	Metode Pembayaran Transaksi <i>e-Commerce</i> Triwulan I 2026	54
Grafik 3.27	Penyaluran Kredit Perbankan Pangsa	39	Grafik 4.20	Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik 2023-2026	54
Grafik 3.28	Pembiayaan Syariah	39	Grafik 4.21	Perkembangan Volume Transaksi Uang Elektronik 2023-2026	55
Grafik 3.29	Penghimpun DPK Syariah	39	Grafik 4.22	Perkembangan Transaksi Pembelian Valas 2023-2026	55
Grafik 3.30	Pangsa DPK Syariah	40	Grafik 4.23	Perkembangan Transaksi Penjualan Valas 2023-2026	55
Grafik 3.31	Pangsa DPK Syariah Terhadap Total Penyaluran DPK Perbankan	40	Grafik 4.24	Penjualan Valas Berdasarkan Pangsa Jenis Mata Uang Triwulan II 2026	55
Grafik 3.32	Pertumbuhan Kredit UMKM	40	Grafik 4.25	Pembelian Valas Berdasarkan Pangsa Jenis Mata Uang Triwulan II 2026	55
Grafik 3.33	Pertumbuhan Sub Kredit UMKM	41	Grafik 4.26	Aliran Uang Kartal <i>Inflow</i> 2023-2026	56
Grafik 3.34	Rasio NPL Kredit UMKM	41	Grafik 4.27	Aliran Uang Kartal <i>Outflow</i> 2023-2026	56
Grafik 3.35	Pangsa Kredit UMKM Terhadap Total Kredit	41	Grafik 4.28	<i>Netflow</i> Uang Kartal 2023-2026	56
Grafik 3.36	Penyaluran Pinjaman Oleh <i>Fintech</i> Kepada Penerima di Sulawesi Selatan TWP90 Sulawesi Selatan	41			
04 Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah					
Grafik 4.1	Perkembangan Nominal Transaksi BI-FAST 2023-2026	50			
Grafik 4.2	Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS 2023-2026	50			
Grafik 4.3	Perkembangan Nominal Transaksi BI-RTGS 2023-2026	51			
Grafik 4.4	Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS 2023-2026	51			
Grafik 4.5	Perkembangan Nominal dan Volume Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) 2023-2026	51			
Grafik 4.6	Pangsa Jenis Transaksi ATM/D Berdasarkan Nominal 2023-2026	51			
Grafik 4.7	Perkembangan Volume dan Nominal Transaksi Kartu Kredit 2023-2026	52			
Grafik 4.8	Perkembangan NPL Kartu Kredit 2023-2026	52			
Grafik 4.9	Jumlah Mesin ATM dan Rasionya per 1.000 km2 2023-2026	52			
05 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan					
Grafik 5.1	Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan	62			
Grafik 5.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan	63			
Grafik 5.3	Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Selatan	64			
Grafik 5.4	Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi	64			
Grafik 5.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan	65			
Grafik 5.6	Indeks Keparahan Kemiskinan	65			
Grafik 5.7	Perkembangan NTP Sulawesi Selatan	66			
Grafik 5.8	Perkembangan NTP Menurut Lapangan Usaha	66			

Grafik 5.9	Perkembangan Rata-rata Indeks yang Diterima Petani	67
Grafik 5.10	Perkembangan Rata-rata Indeks yang Dibayar Petani	67

06

Prospek Perekonomian Daerah

Grafik 6.1.	Perkembangan dan Proyeksi PDRB Sulawesi Selatan	70
Grafik 6.2.	Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)	71
Grafik 6.3.	Indeks Penjualan Riil	72
Grafik 6.4.	Produksi Padi	73

Daftar Tabel

Tabel 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Komponen Pengeluaran	3
Tabel 1.2.	Perkembangan Ekspor Komoditas Sulsel	5
Tabel 1.3.	Perkembangan Impor Komoditas Sulsel	7
Tabel 2.1.	Inflasi Kelompok Barang dan Jasa	21
Tabel 3.1.	Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga	33
Tabel 4.1.	Perkembangan Transaksi SKNBI (Kliring Warkat Debit) 2024-2026	50
Tabel 4.2.	Perkembangan Transaksi SKNBI (Kliring Warkat Debit) 2025-2026 Berdasarkan Wilayah Kerja	51
Tabel 5.1.	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama	62
Tabel 5.2.	Lapangan Pekerjaan Utama	63
Tabel 5.3.	Gini Ratio Sulawesi	65
Tabel 5.4.	IPM Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Komponen Penyusunnya	66

Tabel Indikator Makroekonomi Sulawesi Selatan

A.Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Indikator	2025				2025	2026	
	I	II	III	IV		I	II
MAKRO							
Indeks Harga Konsumen							
- Sulawesi Selatan	106,78	108,21	108,72	109,28	109,28	111,59	112,06
- Kota Makassar	107,00	108,42	108,75	109,48	109,48	111,86	112,28
- Kota Parepare	108,11	109,95	110,36	110,69	110,69	112,48	112,78
- Kota Palopo	106,77	107,78	108,52	108,62	108,62	109,77	110,73
- Kota Watampone	105,62	107,15	107,86	108,20	108,20	110,58	111,18
- Kota Bulukumba	105,75	107,77	107,09	108,52	108,52	109,90	110,54
- Kab. Sidenreng Rappang	103,81	105,27	106,35	106,84	106,84	109,76	109,80
- Kab. Wajo	107,69	108,62	109,45	109,77	109,77	112,37	112,75
- Kab. Luwu Timur	107,42	109,05	110,49	110,31	110,31	112,58	113,76
Laju Inflasi Bulanan (% , mtm)							
- Sulawesi Selatan	2,16	-0,06	-0,17	0,49	0,49	0,59	0,36
- Kota Makassar	2,19	-0,16	-0,26	0,45	0,45	0,57	0,38
- Kota Parepare	2,34	0,60	-0,44	0,64	0,64	0,49	0,03
- Kota Palopo	2,84	-0,02	-0,16	0,36	0,36	0,20	0,45
- Kota Watampone	1,93	-0,05	-0,04	0,40	0,40	0,8	0,18
- Kota Bulukumba	1,84	0,19	-0,04	0,31	0,31	0,35	0,20
- Kab. Sidenreng Rappang	2,07	-0,09	0,09	0,41	0,41	0,36	0,16
- Kab. Wajo	2,15	0,13	0,17	0,81	0,81	0,93	0,32
- Kab. Luwu Timur	2,09	-0,13	0,02	0,85	0,85	1,07	0,82
Laju Inflasi Tahun Kalender (% , ytd)							
- Sulawesi Selatan	0,49	2,04	2,32	2,84	2,84	2,11	2,54
- Kota Makassar	0,37	1,70	2,00	2,69	2,69	2,17	2,56
- Kota Parepare	1,43	3,15	3,54	3,85	3,85	1,62	1,89
- Kota Palopo	0,57	1,53	2,22	2,32	2,32	1,06	1,94
- Kota Watampone	0,36	1,81	2,48	2,81	2,81	2,20	2,75
- Kota Bulukumba	0,11	2,03	2,15	2,74	2,74	1,27	1,86
- Kab. Sidenreng Rappang	0,47	1,89	2,93	3,41	3,41	2,73	2,77
- Kab. Wajo	1,20	2,08	2,85	3,16	3,16	2,37	2,71
- Kab. Luwu Timur	0,60	2,13	3,48	3,31	3,31	2,06	3,13
Laju Inflasi Tahunan (% , yoy)							
- Sulawesi Selatan	0,67	2,24	3,03	2,84	2,84	4,50	
- Kota Makassar	0,46	2,16	2,77	2,69	2,69	4,54	3,56
- Kota Parepare	1,98	2,96	3,63	3,85	3,85	4,04	2,57
- Kota Palopo	0,64	1,38	2,70	2,32	2,32	2,81	2,74
- Kota Watampone	0,56	1,64	3,11	2,81	2,81	4,70	3,76
- Kota Bulukumba	0,70	2,55	2,80	2,74	2,74	3,92	2,57
- Kab. Sidenreng Rappang	0,69	3,01	4,08	3,41	3,41	5,73	4,30
- Kab. Wajo	1,28	2,14	3,37	3,16	3,16	4,35	3,80
- Kab. Luwu Timur	1,34	2,96	4,27	3,31	3,31	4,80	4,32

Indikator	2025				2025	2026	
	I	II	III	IV		I	II
PDRB Penawaran - Harga Konstan (Rp Miliar) Tahun Dasar 2010 & SNA 2008							
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.618	21.328	22.052	17.477	80.475	20.645	21.273
Pertambangan dan Penggalian	4.741	5.344	5.475	5.495	21.055	4.586	5.322
Industri Pengolahan	13.157	13.687	14.192	14.514	55.551	14.540	14.398
Pengadaan Listrik, Gas	117	102	108	107	434	105	102
Pengadaan Air	117	121	123	124	486	126	123
Konstruksi	9.960	11.530	12.991	14.388	48.869	10.641	12.565
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.042	16.089	17.201	17.189	65.521	16.386	17.391
Transportasi dan Pergudangan	3.332	3.668	3.609	3.736	14.345	3.665	3.727
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.489	1.505	1.560	1.683	6.236	1.648	1.651
Informasi dan Komunikasi	8.261	8.607	8.778	9.219	34.864	8.728	9.169
Jasa Keuangan	3.347	3.384	3.572	3.684	13.987	3.691	3.571
Real Estate	3.635	3.667	3.716	3.793	14.810	3.825	3.908
Jasa Perusahaan	449	508	526	561	2.043	470	545
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.207	4.570	3.818	4.084	16.679	5.023	5.322
Jasa Pendidikan	5.820	5.911	5.731	6.442	23.904	5.679	6.484
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.500	2.758	2.804	3.299	11.362	2.551	2.988
Jasa lainnya	1.578	1.781	1.824	1.829	7.013	1.762	1.871
Pertumbuhan PDRB Penawaran (%; yoy)							
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,73	3,36	5,32	5,02	7,06	5,24	(0,26)
Pertambangan dan Penggalian	(3,19)	9,69	7,54	4,31	4,60	(3,27)	(0,42)
Industri Pengolahan	4,01	6,74	3,40	6,03	5,04	10,51	5,19
Pengadaan Listrik, Gas	8,72	(6,62)	(7,95)	(5,21)	(2,92)	(10,10)	(0,19)
Pengadaan Air	1,22	2,58	2,37	6,15	3,08	7,93	1,22
Konstruksi	(3,54)	5,83	5,24	6,33	3,77	6,83	8,97
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,67	5,92	4,19	4,54	4,81	8,94	8,09
Transportasi dan Pergudangan	5,09	4,13	4,10	5,96	4,81	9,97	1,61
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,16	5,13	8,16	8,93	6,65	10,67	9,73
Informasi dan Komunikasi	4,12	5,72	4,98	6,44	5,34	5,66	6,53
Jasa Keuangan	5,56	5,80	9,39	14,66	8,87	10,30	5,53
Real Estate	6,95	7,87	6,82	5,02	6,64	5,25	6,60
Jasa Perusahaan	4,47	8,24	8,55	6,12	6,89	4,64	7,27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,16	(2,80)	0,80	6,37	2,14	19,39	16,45
Jasa Pendidikan	9,79	(0,84)	3,13	4,97	4,13	(2,42)	9,70
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,77	4,89	7,81	10,32	7,79	2,02	8,32
Jasa lainnya	7,44	15,76	11,82	8,21	10,80	11,67	5,03

Indikator	2025				2025	2026	
	I	II	III	IV		I	II
PDRB Permintaan - Harga Konstan (Rp Miliar)							
1. Konsumsi Rumah Tangga	53.345	54.063	53.238	53.602	214.248	56.051	56.597
2. Konsumsi LNPRT	1.645	1.650	1.630	1.634	6.558	1.685	1.709
3. Konsumsi Pemerintah	5.168	7.478	7.973	10.852	31.445	6.963	8.987
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	32.754	37.290	41.412	43.982	155.438	35.017	40.557
5. Ekspor Barang dan Jasa	12.810	12.858	14.972	(895)	235	597	423
6. Impor Barang dan Jasa	8.695	9.223	11.490	12.157	52.825	13.320	12.219
Pertumbuhan PDRB Permintaan (%; yoy)							
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,71	4,08	4,70	5,28	4,69	5,07	4,69
2. Konsumsi LNPRT	-11,65	15,59	2,47	5,58	2,04	2,44	3,61
3. Konsumsi Pemerintah	0,21	-8,80	-0,48	4,37	-1,01	34,74	20,18
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	-0,39	5,52	5,91	5,99	4,45	6,91	8,76
5. Ekspor Barang dan Jasa	13,40	7,46	5,02	43,85	-1,67	-95,34	-96,71
6. Impor Barang dan Jasa	-14,24	-7,73	4,83	-1,85	5,85	53,20	32,48
Total PDRB - Harga Konstan (Rp Miliar)	97.368	104.560	108.080	107.626	417.634	104.071	110.409
Pertumbuhan PDRB (%; yoy)	5,79	4,94	5,01	5,99	5,43	6,88	5,59
Nilai Ekspor (X) Luar Negeri Non-migas (US\$ Juta)	466,70	514,28	506,89	469,26	1957,13	388,02	428,82
Volume Ekspor Luar Negeri Non-migas (Juta Ton)	606,83	846,16	648,63	493,91	2595,53	578,35	605,21
Nilai Impor (M) Luar Negeri Non-migas (US\$ Juta)	173,31	234,92	107,01	237,10	919,66	218,09	185,62
Volume Impor Luar Negeri Non-migas (Juta Ton)	406,65	524,28	464,04	450,46	1845,43	388,30	377,57
Neraca Perdagangan (X - M) Non-migas (US\$ Juta)	293,39	279,36	232,55	232,16	1037,47	169,93	243,20

B. Perbankan Berdasarkan Lokasi Proyek

Indikator	2024			2025				2026	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
BANK UMUM									
Total Aset (Rp Miliar)	192.197	195.776	199.798	201.366	203.780	205.363	210.227	209.199	213.271
DPK - Lokasi Proyek Pelapor (Rp Miliar)	123.911	125.759	126.713	130.240	134.720	135.882	138.763	138.902	143.050
Giro	18.170	18.620	17.303	19.066	19.394	21.597	19.467	20.695	21.695
Tabungan	75.413	76.510	80.690	80.166	82.036	80.942	85.688	88.247	90.350
Deposito	30.327	30.629	28.720	310.086	332.897	33.343	33.609	29.959	31.005
Kredit - Lokasi Proyek (Rp Miliar)	173.948	174.935	177.057	177.107	178.756	178.983	181.720	184.011	191.875
- Modal Kerja	62.501	62.886	62.774	62.443	62.096	62.091	60.811	61.144	63.171
- Investasi	37.759	36.728	37.162	36.340	37.138	35.690	37.665	38.241	42.608
- Konsumsi	73.688	75.321	77.121	78.325	79.522	81.201	83.244	84.626	86.096
LDR	140,38%	139,10%	139,73%	135,98%	132,69%	131,72%	130,96%	132,48%	134,13%
Kredit - Lokasi Proyek (Rp Miliar)	173.948	174.935	177.057	177.107	178.756	178.983	181.720	184.011	191.875
- Pertanian	14.977	15.553	15.649	15.955	163.710	16.869	17.183	17.392	18.000
- Pertambangan	5.472	5.158	4.509	4.615	5.139	3.112	3.182	32.527	7.626
- Industri pengolahan	9.022	9.003	9.552	7.601	7.486	8.201	7.878	7.541	7.153
- Listrik, Gas, dan Air	6.352	5.797	5.947	58.083	5.600	5.410	5.303	5.053	5.059
- Konstruksi	6.104	6.170	6.182	5.928	5.845	5.995	6.067	6.018	6.010
- Perdagangan	43.500	43.420	43.112	42.856	42.668	41.693	41.796	41.441	42.243
- Pengangkutan	2.612	2.484	2.418	2.613	2.526	2.678	2.764	2.822	2.631
- Jasa Dunia Usaha	5.832	5.630	6.150	5.423	5.658	5.874	6.484	7.941	8.150
- Jasa Sosial Masyarakat	6.387	6.398	6.418	7.984	7.940	7.951	7.820	7.901	8.907
- Lain-lain	73.688	75.321	77.121	78.325	79.522	81.201	83.244	84.626	86.096
Kredit UMKM - Lokasi Proyek (Rp Miliar)	59.799	60.554	60.284	60.238	60.290	60.241	59.837	59.921	60.931
Kredit Mikro* (Rp Miliar)	34.099	34.605	34.394	33.867	34.095	33.525	33.388	34.988	35.003
- Modal Kerja	24.067	24.273	23.922	23.456	23.739	23.053	20.998	22.161	21.621
- Investasi	10.032	10.332	10.472	10.410	10.356	10.472	12.390	12.827	13.382
- Konsumsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit Kecil ** (Rp Miliar)	17.100	17.183	17.000	17.612	17.984	18.405	18.572	16.799	17.583
- Modal Kerja	13.432	13.436	13.111	13.565	13.838	14.088	14.183	12.561	13.143
- Investasi	3.668	3.746	3.889	4.046	41.461	4.318	4.389	4.238	4.440
- Konsumsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kredit Menengah *** (Rp Miliar)	8.600	8.766	8.890	8.759	82.112	8.311	7.887	8.135	8.344
- Modal Kerja	6.619	6.853	6.949	68.455	63.490	6.345	6.062	6.122	6.269
- Investasi	1.980	1.912	1.941	1.914	18.622	1.966	1.815	2.013	2.075
- Konsumsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NPL Total gross - Lokasi Proyek (%)	3,66%	3,60%	3,39%	3,57%	3,75%	4,48%	4,35%	4,41%	4,39%
NPL UMKM gross - Lokasi Proyek (%)	4,98%	4,73%	4,33%	4,61%	4,95%	4,99%	4,66%	4,90%	4,66%

Indikator	2024			2025				2026	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
BANK UMUM SYARIAH									
Total Aset (Rp Miliar)	15.060	16.118	17.636	17.510	18.315	18.972	21.405	22.411	23.480
DPK - Lokasi Proyek Pelapor (Rp Miliar)	9.535	10.038	10.733	10.846	10.907	11.487	12.708	13.316	14.312
Giro	1.039	1.023	1.015	1.056	1.013	1.066	1.495	2.180	2.985
Tabungan	6.011	6.309	6.743	6.676	6.901	7.258	7.797	8.068	8.250
Deposito	2.484	2.706	2.975	3.114	2.994	3.163	3.416	3.068	3.078
Pembiayaan - Lokasi Proyek (Rp Miliar)	14.201	14.677	15.431	16.008	16.464	17.199	18.348	19.308	20.040
Modal Kerja	1.669	1.704	1.790	1.873	1.935	2.045	2.190	2.247	2.280
Investasi	2.537	2.570	2.847	2.924	2.865	2.814	2.802	2.816	2.915
Konsumsi	9.994	10.403	10.794	11.211	11.663	12.339	13.356	14.244	1.485
FDR	148,94%	146,21%	143,78%	147,59%	150,94%	149,72%	144,38%	144,99%	140,02%

Catatan:
 * (<Rp50 juta)
 ** (Rp50 < X < Rp500 juta)
 *** (Rp500 juta < X < Rp5 miliar)

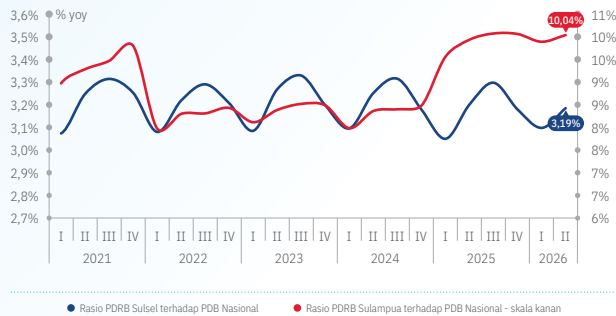
C.Perbankan Berdasarkan Lokasi Bank

Indikator	2024			2025				2026	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
BANK UMUM :									
Total Aset (Rp Miliar)	192.197	195.776	199.798	201.366	203.780	205.363	210.227	209.199	213.271
DPK - Lokasi Bank Pelapor (Rp Miliar)	126.178	128.066	129.033	132.644	137.122	138.555	141.451	141.834	144.253
Giro	18.370	18.794	17.473	19.259	19.560	21.863	19.814	21.182	21.778
Tabungan	76.672	77.790	82.034	81.567	83.446	82.429	87.184	89.936	91.273
Deposito	31.135	31.481	29.526	31.818	34.115	34.263	34.453	30.715	31.203
Kredit - Lokasi Bank (Rp Miliar)	158.071	160.093	161.035	162.519	164.177	166.338	169.399	170.824	172.700
- Modal Kerja	59.741	60.408	59.803	59.679	60.610	60.734	59.619	58.924	58.203
- Investasi	29.127	28.943	28.806	29.303	29.053	29.650	31.718	32.492	33.491
- Konsumsi	69.202	70.743	72.426	73.538	74.514	75.954	78.063	79.408	81.005
LDR	125,28%	125,01%	124,80%	122,52%	119,73%	120,05%	119,76%	120,44%	119,72%
Kredit UMKM - Lokasi Bank (Rp Miliar)	60.780	61.691	61.515	61.599	61.615	61.867	61.677	61.792	62.293
Kredit Mikro* (Rp Miliar)	33.999	34.549	34.336	33.839	34.076	33.490	33.304	35.155	35.202
Kredit Kecil ** (Rp Miliar)	17.458	17.553	17.418	18.087	18.524	19.089	19.320	17.551	18.050
Kredit Menengah *** (Rp Miliar)	9.322	9.589	9.761	9.673	9.015	9.288	9.053	9.086	9.040
NPL Total gross - Lokasi Bank (%)	3,04%	2,90%	2,69%	2,86%	3,00%	3,69%	3,69%	3,77%	3,73%
NPL UMKM gross - Lokasi Bank (%)	4,96%	4,60%	4,19%	4,45%	4,76%	4,72%	4,52%	4,78%	4,54%
BANK UMUM SYARIAH									
Total Aset (Rp Miliar)	15.060	16.118	17.636	17.510	18.315	18.972	21.405	22.411	23.480
DPK - Lokasi Proyek Pelapor (Rp Miliar)	10.081	10.630	11.313	11.419	11.497	12.006	13.286	13.812	14.824
Giro	1.070	1.044	1.030	1.077	1.033	1.093	1.545	2.217	3.032
Tabungan	6.364	6.708	7.136	7.067	7.318	7.612	8.139	8.400	8.587
Deposito	2.647	2.878	3.148	3.275	3.146	3.302	3.602	3.195	3.205
Pembiayaan - Lokasi Proyek (Rp Miliar)	12.750	13.352	14.096	14.809	15.453	16.161	17.402	18.335	6.306
Modal Kerja	909	1.813	1.816	1.899	2.011	2.097	2.284	2.347	2.522
Investasi	1.370	1.478	1.823	2.008	2.104	2.102	2.204	2.267	2.358
Konsumsi	9.627	1.060	10.457	10.902	11.339	11.962	12.912	13.721	1.426
FDR	126,48%	125,60%	124,60%	129,69%	134,41%	134,60%	130,97%	132,75%	129,13%

Catatan:
* (<Rp50 juta)
** (Rp50 < X < Rp500 juta)
*** (Rp500 juta < X < Rp5 miliar)

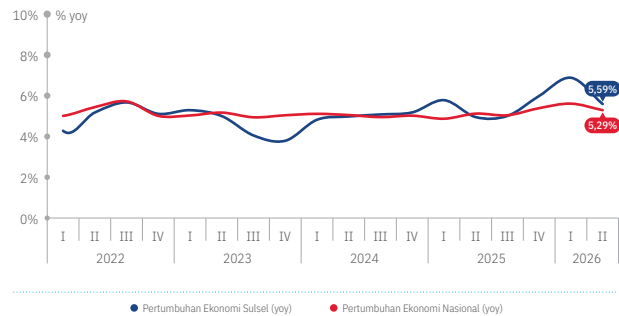
D. Grafik Indikator

Kontribusi Perekonomian



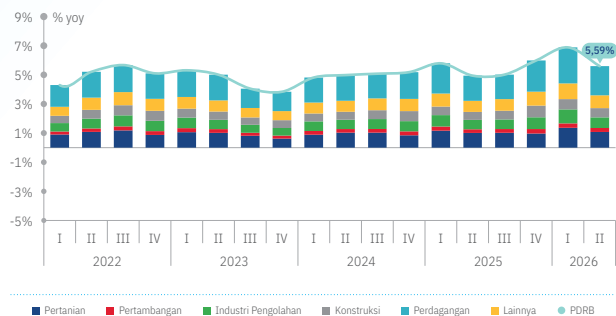
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah
Keterangan: PDRB TD 2010

Pertumbuhan Ekonomi



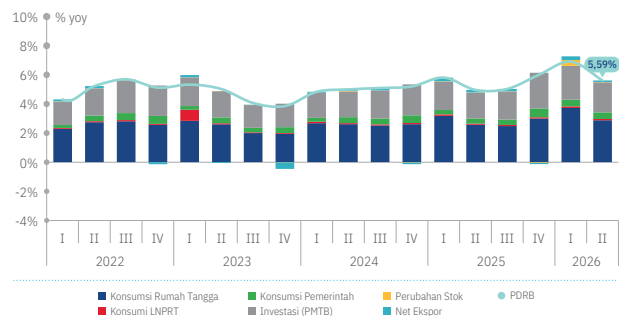
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah
Keterangan: PDRB TD 2010

Sumbangan Lapangan Usaha bagi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan



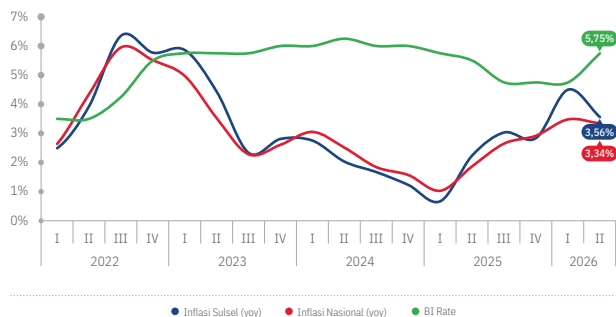
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah
Keterangan: PDRB TD 2010; *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Sumbangan Komponen Pengeluaran bagi Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan



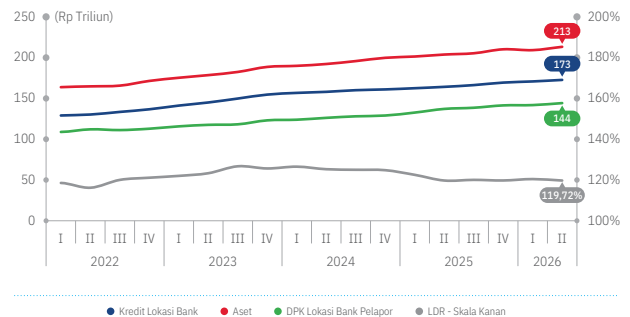
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah
Keterangan: PDRB TD 2010; *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara

Inflasi dan BI Rate



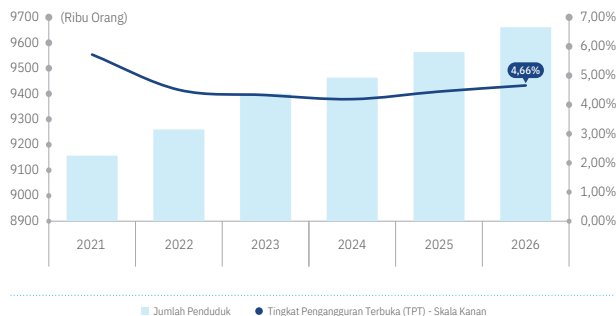
Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Kinerja Perbankan Sulawesi Selatan



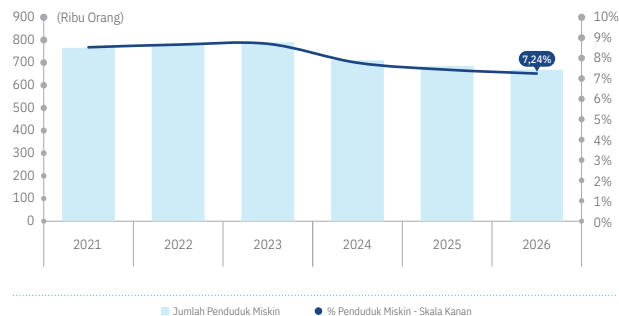
Sumber: Laporan Bank, diolah

Pengangguran Terbuka



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Persentase Penduduk Miskin



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah







Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif

Agustus 2026



Perkembangan Makroekonomi Daerah



Ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,59% (yoy), melambat dari 6,88% (yoy) pada triwulan sebelumnya, namun tetap lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,29% (yoy). Perlambatan terutama dipengaruhi normalisasi aktivitas pasca long festive season HBKN Ramadan dan Idulfitri. Meski melambat, pertumbuhan tetap ditopang permintaan domestik, terutama investasi yang menguat serta konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh positif.

Dari sisi pengeluaran, perlambatan terutama dipengaruhi moderasi Konsumsi Rumah Tangga dan kontraksi Ekspor Barang dan Jasa. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 4,69% (yoy) sejalan dengan normalisasi konsumsi pasca HBKN, sementara ekspor tertahan oleh penurunan sejumlah komoditas utama. Di sisi lain, PMTB menguat menjadi 8,76% (yoy) didukung aktivitas investasi bangunan dan nonbangunan. Konsumsi Pemerintah tetap tumbuh tinggi meski melambat, sementara impor tetap tumbuh positif dengan laju lebih moderat.

Dari sisi lapangan usaha, perlambatan terutama dipengaruhi kontraksi LU Pertanian serta moderasi LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan. Pertanian tertahan oleh penurunan produksi tanaman pangan dan perikanan, sementara Industri Pengolahan melambat terutama pada industri barang galian bukan logam dan logam dasar. Perdagangan tetap tumbuh kuat meski termoderasi pasca HBKN. Di sisi lain, LU Konstruksi menguat menjadi 8,97% (yoy) didorong peningkatan pembangunan fisik pemerintah, sementara LU Pertambangan masih berkontraksi namun membaik, ditopang aktivitas galian C dan produksi gas alam.

Perkembangan Inflasi Daerah



Inflasi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 3,56% (yoy), melandai dari triwulan sebelumnya dan berada sedikit di atas rentang sasaran nasional. Tekanan inflasi terutama bersumber dari emas perhiasan, BBM nonsubsidi, ikan layang, tomat, cabai rawit, dan beras, seiring permintaan yang tetap kuat selama HBKN Iduladha. Namun, tekanan tersebut tertahan oleh normalisasi konsumsi pasca-HBKN Ramadan dan Idulfitri, berakhirnya *low-base effect* diskon tarif listrik 50%, serta penurunan harga ayam hidup, bawang putih, dan wortel.

Inflasi Sulawesi Selatan pada 2026 diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional. Risiko kenaikan permintaan, gangguan cuaca, dan ketidakpastian harga komoditas global diperkirakan tertahan oleh perbaikan produksi, penguatan cadangan pangan, penyaluran SPHP dan bantuan pangan, serta pelaksanaan GPM. Sinergi TPID melalui strategi 4K terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Stabilitas Sistem Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM



Stabilitas sistem keuangan Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 secara umum terjaga di tengah pertumbuhan ekonomi yang tetap didukung oleh konsumsi rumah tangga. Penyaluran kredit perbankan Sulawesi Selatan tumbuh 5,19% (yoy). Penguatan kredit terutama ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh lebih tinggi, sementara kredit konsumsi tetap solid dan kredit modal kerja masih mengalami kontraksi yang lebih dalam. Sementara itu, pembiayaan perbankan syariah juga tetap tumbuh kuat sebesar 23,87% (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh pembiayaan konsumsi dan modal kerja, meskipun pembiayaan investasi sedikit melandai. Perkembangan ini menunjukkan fungsi pembiayaan perbankan tetap terjaga dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Di tengah pertumbuhan pembiayaan yang masih positif, kualitas kredit perbankan relatif tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan dan NPL UMKM masih terjaga, berada di bawah ambang batas 5%. Dari sisi kinerja, profitabilitas perbankan tetap kuat meskipun sedikit termoderasi, tercermin dari ROA yang menurun dari 4,97% menjadi 4,87%. Sejalan dengan itu, rasio BOPO tercatat 40,86% yang secara level tetap menunjukkan efisiensi operasional perbankan yang baik. Di sisi lain, pembiayaan fintech tetap tumbuh positif dengan kualitas risiko yang relatif terkendali.

Di tengah terjaganya stabilitas sistem keuangan, penguatan sektor riil yang inklusif terus didorong sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah. Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia bersama stakeholder terkait memperkuat pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif melalui Karya Kreatif Sulawesi Selatan dan South Sulawesi Digital Festival (KKS x DIGIFEST) 2026, termasuk melalui perluasan akses pasar, pembiayaan, dan digitalisasi.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



Indikator sistem pembayaran (SP) terutama SP ritel di Sulawesi Selatan menunjukkan perkembangan positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan II sebesar 5,59% (yoy). Layanan BI-FAST dengan sejumlah keunggulannya terus bertumbuh dengan nominal transaksi sebesar Rp94,31 triliun atau tumbuh 51,74% (yoy), dengan volume 41,39 juta transaksi atau meningkat 57,20% (yoy).

Pada kanal lainnya, nominal transaksi SKNBI tercatat Rp5,93 triliun atau tumbuh 5,6% (yoy), sementara nominal BI-RTGS sebesar Rp26,75 triliun atau turun 1,26% (yoy), meskipun volumenya meningkat 15,37% (yoy). Adopsi QRIS terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Hingga triwulan II 2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 1,48 juta dan *merchant* mencapai 1,46 juta. Nominal transaksi QRIS sebesar Rp7,64 triliun atau tumbuh 82,79% (yoy), sedangkan volumenya mencapai 88,14 juta transaksi atau meningkat 149,72% (yoy).

Sejalan dengan pergeseran preferensi masyarakat ke kanal digital, volume transaksi kartu ATM/D menurun 6,49% (yoy) dan jumlah mesin ATM berkurang menjadi 2.722 unit. Di sisi lain, transaksi *e-Commerce* dan uang elektronik masing-masing tumbuh 32,49% (yoy) dan 30,85% (yoy). Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Sulawesi Selatan mencatat net inflow Rp1,80 triliun, dengan inflow sebesar Rp4,98 triliun dan outflow Rp3,18 triliun. *Inflow* turun 1,28% (yoy), sementara *outflow* meningkat 27,02% (yoy).

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan



Tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan pada periode Maret 2026 menurun dibandingkan periode September 2025. Penurunan tingkat kemiskinan ini terjadi pada penduduk yang tempat tinggal berada di perkotaan yang menunjukkan perbaikan kondisi kemiskinan secara berkelanjutan, terutama dalam tiga tahun terakhir.

Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan menunjukkan penurunan nilai indeks Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 67,59% pada Februari 2026 menjadi 66,83% pada Mei 2026. Angka tersebut menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 turut menunjukkan penurunan dari Februari 2026. Hal ini terutama didorong oleh pengurangan penduduk bekerja dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta lapangan usaha Jasa Keuangan, dan LU Informasi dan Komunikasi.

Prospek Ekonomi Daerah



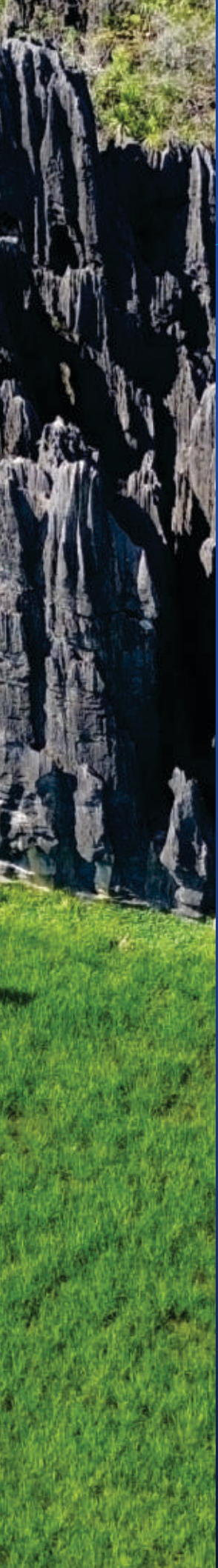
Ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dalam rentang 5,4%–6,2% (yoy), terutama ditopang oleh kuatnya permintaan domestik dan berlanjutnya investasi. Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah diperkirakan meningkat, didukung daya beli dan pendapatan masyarakat yang tetap terjaga serta peningkatan belanja pemerintah. PMTB juga diperkirakan meningkat sejalan dengan keberlanjutan proyek pemerintah dan swasta. Sementara itu, ekspor luar negeri diperkirakan melambat akibat tertahannya kinerja komoditas utama, sedangkan impor meningkat sejalan dengan kuatnya permintaan domestik dan aktivitas investasi.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terutama ditopang oleh LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, dan LU Konstruksi yang diperkirakan meningkat, didukung permintaan domestik, aktivitas produksi dan distribusi, serta keberlanjutan proyek pemerintah dan swasta. Sementara itu, LU Pertanian dan LU Pertambangan diperkirakan melambat, masing-masing sejalan dengan normalisasi produksi tanaman pangan dan penyesuaian produksi nikel.

Tekanan inflasi Sulawesi Selatan tahun 2026 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan 2025 dan tetap berada dalam rentang sasaran nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Peningkatan permintaan domestik seiring terjaganya daya beli, kenaikan harga energi nonsubsidi, serta potensi *imported inflation* menjadi pendorong utama, namun tekanan inflasi diperkirakan tertahan oleh perbaikan produksi pertanian, penguatan cadangan pangan, kebijakan stabilisasi harga, serta moderasi harga komoditas global. Sinergi pengendalian inflasi melalui TPID dalam kerangka 4K terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga.







01

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah



Ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tumbuh sebesar 5,59% (yoy), melambat dari 6,88% (yoy) pada triwulan sebelumnya, namun tetap lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,29% (yoy). Perlambatan terutama dipengaruhi normalisasi aktivitas pasca *long festive season* HBKN Ramadan dan Idulfitri. Meski melambat, pertumbuhan tetap ditopang permintaan domestik, terutama investasi yang menguat serta konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh positif.

Dari sisi pengeluaran, perlambatan terutama dipengaruhi moderasi Konsumsi Rumah Tangga dan kontraksi Ekspor Barang dan Jasa. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 4,69% (yoy) sejalan dengan normalisasi konsumsi pasca HBKN, sementara ekspor tertahan oleh penurunan sejumlah komoditas utama. Di sisi lain, PMTB menguat menjadi 8,76% (yoy) didukung aktivitas investasi bangunan dan nonbangunan. Konsumsi Pemerintah tetap tumbuh tinggi meski melambat, sementara impor tetap tumbuh positif dengan laju lebih moderat.

Dari sisi lapangan usaha, perlambatan terutama dipengaruhi kontraksi LU Pertanian serta moderasi LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan. Pertanian tertahan oleh penurunan produksi tanaman pangan dan perikanan, sementara Industri Pengolahan melambat terutama pada industri barang galian bukan logam dan logam dasar. Perdagangan tetap tumbuh kuat meski termoderasi pasca HBKN. Di sisi lain, LU Konstruksi menguat menjadi 8,97% (yoy) didorong peningkatan pembangunan fisik pemerintah, sementara LU Pertambangan masih berkontraksi namun membaik, ditopang aktivitas galian C dan produksi gas alam.

1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada triwulan II 2026 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tercatat tumbuh 5,59% (yoy), melambat dibandingkan triwulan I 2026 yang tumbuh 6,88% (yoy). Capaian tersebut berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional triwulan II 2026 yang tercatat 5,29% (yoy) (Grafik 1.1).

Secara spasial di kawasan Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua), pangsa ekonomi Sulsel terhadap Sulampua pada triwulan II 2026 meningkat. Pangsa tersebut meningkat dari 31,34% di triwulan sebelumnya, menjadi 31,75%. Dengan demikian, Sulsel masih tetap merupakan provinsi dengan pangsa ekonomi terbesar di Sulampua (Grafik 1.2).

Perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tetap tumbuh positif, meski melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan terutama dipengaruhi kontraksi LU Pertanian serta moderasi LU Perdagangan dan Industri Pengolahan. Kontraksi LU Pertanian sejalan dengan penurunan produksi padi dan perikanan, sementara perlambatan Industri Pengolahan terutama bersumber dari industri barang galian bukan logam dan logam dasar. Di sisi lain, LU Konstruksi menguat, sementara LU Pertambangan membaik sehingga menahan perlambatan lebih dalam. Dari sisi pengeluaran, perlambatan terutama dipengaruhi moderasi Konsumsi Rumah Tangga seiring normalisasi konsumsi pasca long festive season HBKN Ramadan–Idulfitri, serta kontraksi Ekspor Barang dan Jasa. Sementara itu, PMTB menguat didukung peningkatan investasi bangunan dan nonbangunan, sedangkan Konsumsi Pemerintah tetap tumbuh tinggi meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pada triwulan III 2026, perekonomian Sulawesi Selatan diperkirakan tetap tumbuh kuat, ditopang perbaikan sektor utama dan permintaan domestik yang terjaga. Dari sisi lapangan usaha, LU Pertanian diperkirakan membaik didukung

peningkatan produksi padi, sementara LU Perdagangan tetap kuat sejalan dengan aktivitas konsumsi dan distribusi barang. LU Konstruksi tetap tumbuh tinggi didukung keberlanjutan proyek pemerintah dan swasta, meskipun lebih moderat secara triwulanan, sementara LU Industri Pengolahan tetap tumbuh positif. Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga tetap kuat sejalan dengan perbaikan pendapatan masyarakat, sementara PMTB tetap menjadi penopang pertumbuhan didukung keberlanjutan investasi. Konsumsi Pemerintah diperkirakan lebih moderat pasca frontloading belanja pada semester I 2026. Sementara itu, kinerja eksternal diperkirakan membaik ditopang perbaikan ekspor dan moderasi impor.

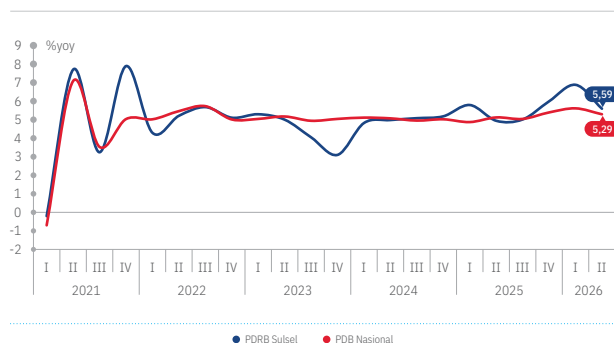
1.2. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran

Berdasarkan komponen pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 terutama ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga (RT), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Konsumsi Pemerintah. Konsumsi RT tumbuh sebesar 4,69% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya seiring normalisasi konsumsi pasca long festive season HBKN Ramadan dan Idulfitri yang terkonsentrasi pada triwulan I 2026. Meski melambat, konsumsi masyarakat tetap tumbuh positif didukung daya beli dan keyakinan konsumen yang tetap terjaga, serta aktivitas konsumsi pada periode libur sekolah.

PMTB tumbuh menguat sebesar 8,76% (yoy), didukung peningkatan investasi bangunan dan nonbangunan serta berlanjutnya realisasi proyek pemerintah dan swasta. Sejalan dengan itu, Konsumsi Pemerintah tetap tumbuh tinggi sebesar 20,18% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, ditopang oleh peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah, khususnya belanja modal.

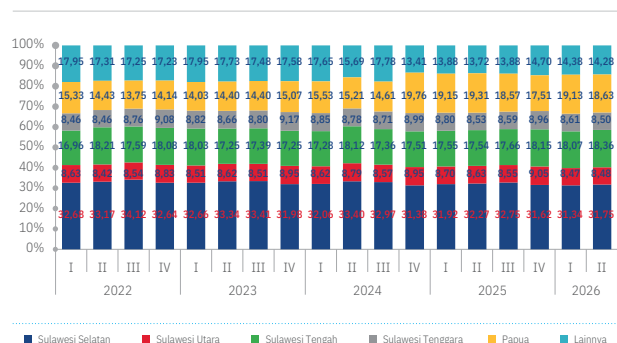
Sementara itu, dari sisi eksternal, Ekspor Barang dan Jasa berkontraksi sebesar 4,97% (yoy), sejalan dengan penurunan ekspor luar negeri pada beberapa komoditas utama di tengah dinamika permintaan negara mitra dagang. Di sisi lain, Impor

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Sulawesi Selatan dan Nasional



Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.2. Pangsa PDRB Sulawesi Selatan terhadap wilayah Sulampua



Sumber: BPS, diolah

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Komponen Pengeluaran

PDRB Komponen Pengeluaran (%yoy)	2024				Total	2025				Total	2026	
	I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II
Konsumsi Rumah Tangga	8,98	5,83	5,81	4,50	6,26	4,71	4,08	4,70	5,28	4,69	5,07	4,69
Konsumsi LNPRT	47,87	4,27	19,27	9,30	19,52	-11,65	15,59	2,47	5,58	2,04	2,44	3,161
Konsumsi Pemerintah	21,89	2,76	2,80	-1,72	3,90	0,21	-8,80	-0,48	4,37	-0,93	35,14	20,18
PMTB	1,39	3,18	2,31	2,48	2,36	-0,39	5,52	5,91	5,99	4,45	6,91	8,76
Ekspor	-9,43	0,79	8,90	9,23	2,37	13,40	7,46	5,02	-1,85	5,80	3,77	4,97
Impor	7,28	0,67	3,21	-5,33	0,68	-14,24	-7,73	4,83	-5,95	-5,59	9,98	9,33
PDRB	4,82	4,98	5,08	5,18	5,02	5,79	4,94	5,01	5,99	5,43	6,88	5,59

Sumber: Badan Pusat Statistik

Barang dan Jasa tumbuh sebesar 9,33% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama dipengaruhi kontraksi impor bahan baku, sementara impor barang modal tetap tumbuh positif sejalan dengan aktivitas investasi yang menguat (Tabel 1.1).

1.2.1. Konsumsi

Konsumsi Swasta

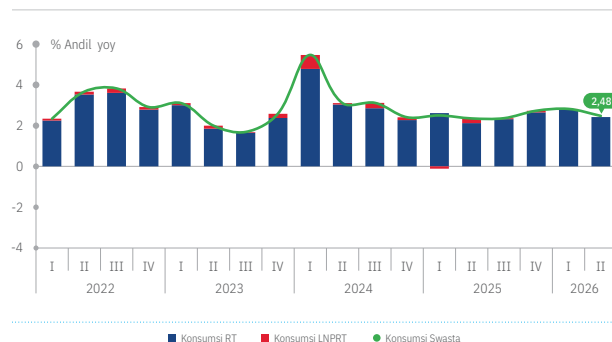
Konsumsi domestik Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tetap tumbuh positif, meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Konsumsi Rumah Tangga (RT), sebagai komponen dengan pangsa terbesar dalam PDRB Sulawesi Selatan, tumbuh sebesar 4,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan 5,07% (yoy) pada triwulan I 2026. Sejalan dengan perlambatan tersebut, andil Konsumsi RT terhadap pertumbuhan ekonomi menurun dari 2,78% menjadi 2,48%, namun tetap menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Grafik 1.3). Perkembangan tersebut sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dari 6,88% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 5,59% (yoy) pada triwulan laporan.

Perlambatan Konsumsi RT terutama sejalan dengan normalisasi aktivitas konsumsi pasca long festive season HBKN Ramadan dan Idulfitri yang terkonsentrasi pada triwulan I 2026.

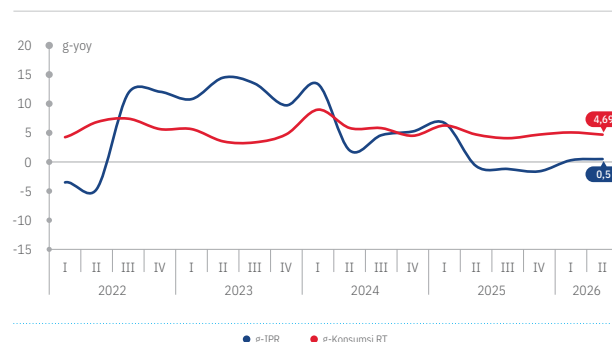
Memasuki triwulan II 2026, aktivitas konsumsi kembali menuju pola yang lebih normal setelah tingginya kebutuhan masyarakat pada periode HBKN. Meski demikian, aktivitas konsumsi pada triwulan laporan tetap tinggi yang didukung oleh momentum libur sekolah dan persiapan tahun ajaran baru.

Moderasi Konsumsi RT juga tercermin pada aktivitas penjualan eceran yang masih tumbuh relatif terbatas. Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh sebesar 0,5% (yoy) pada triwulan II 2026, sedikit meningkat dibandingkan 0,3% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas penjualan eceran masih tumbuh positif pada periode laporan, meskipun relatif terbatas di tengah normalisasi aktivitas konsumsi pasca-HBKN (Grafik 1.4).

Keyakinan konsumen turut termoderasi, meskipun tetap berada pada zona optimis. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 111,4, menurun dari 117,0 pada triwulan sebelumnya. Penurunan terjadi baik pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dari 116,8 menjadi 112,5, maupun Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dari 117,2 menjadi 110,2. Meski menurun, seluruh indeks tetap berada di atas batas optimis (>100), menunjukkan bahwa keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi ekonomi ke depan masih terjaga (Grafik 1.5).

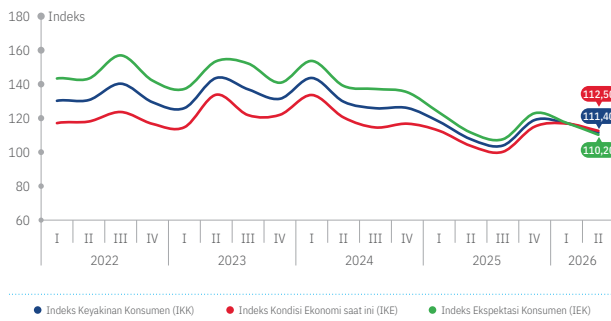
Grafik 1.3. Perkembangan Konsumsi Domestik

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.4. Konsumsi Rumah Tangga dan Indeks Penjualan Riil

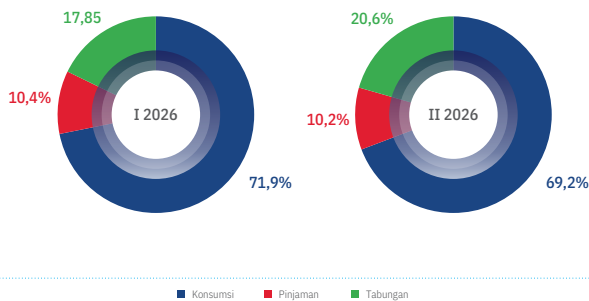
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.5. Perkembangan Survei Konsumen



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.6. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga



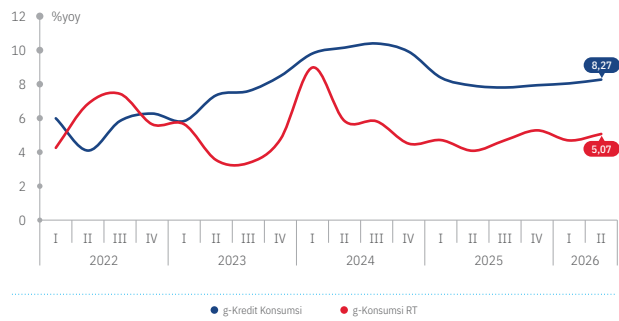
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Normalisasi aktivitas konsumsi turut terindikasi dari perubahan alokasi pendapatan rumah tangga. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia, porsi pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi menurun dari 71,86% pada triwulan I 2026 menjadi 69,24% pada triwulan II 2026. Pada saat yang sama, porsi tabungan meningkat dari 17,78% menjadi 20,55%, sementara porsi pembayaran pinjaman relatif stabil dari 10,37% menjadi 10,21%. Perkembangan tersebut menunjukkan berkurangnya proporsi pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi di tengah peningkatan alokasi untuk tabungan, sejalan dengan moderasi pertumbuhan Konsumsi RT pada triwulan laporan (Grafik 1.6).

Di sisi pembiayaan, penyaluran kredit konsumsi tetap tumbuh positif di tengah perlambatan Konsumsi RT. Kredit konsumsi tercatat tumbuh sebesar 8,27% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan 8,05% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut menunjukkan pembiayaan konsumsi rumah tangga masih tumbuh pada periode laporan, meskipun aktivitas konsumsi secara keseluruhan mengalami moderasi (Grafik 1.7).

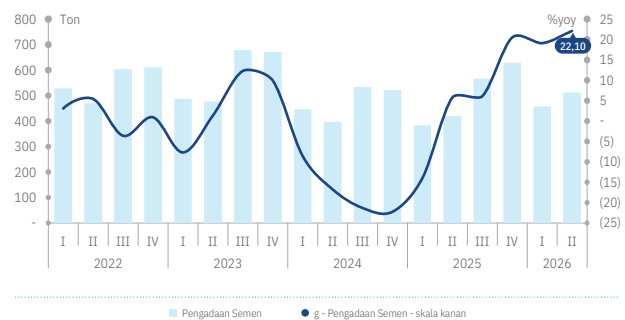
Secara keseluruhan, Konsumsi RT pada triwulan II 2026 tetap menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya seiring normalisasi aktivitas konsumsi pasca HBKN Ramadan dan Idulfitri. Moderasi tersebut tercermin dari

Grafik 1.7. Perkembangan Kredit Konsumsi



Sumber: LBU, diolah

Grafik 1.8. Pengadaan Semen



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

penurunan andil Konsumsi RT, sementara keyakinan konsumen yang tetap berada pada zona optimis serta penjualan eceran dan kredit konsumsi yang masih tumbuh positif menunjukkan aktivitas konsumsi masyarakat tetap terjaga.

Konsumsi Pemerintah

Kinerja Konsumsi Pemerintah Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tetap tumbuh tinggi, meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 20,18% (yoy), lebih rendah dibandingkan 35,44% (yoy) pada triwulan I 2026. Meski mengalami moderasi, Konsumsi Pemerintah tetap menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan. Perkembangan tersebut sejalan dengan peningkatan realisasi belanja Pemerintah Pusat, terutama pada belanja pegawai dan belanja barang.

Kinerja fiskal Pemerintah Pusat di Sulawesi Selatan hingga akhir semester I 2026 tetap kuat. Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 39,16% (yoy), dengan peningkatan terjadi pada belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Peningkatan belanja pegawai dan barang sejalan dengan berlanjutnya aktivitas operasional dan pelaksanaan program pemerintah pada semester I 2026. Sementara itu, peningkatan belanja modal menunjukkan akselerasi realisasi belanja yang terkait dengan pembentukan aset pemerintah dan turut mendukung aktivitas investasi pada periode laporan.

Tabel 1.2 Perkembangan Ekspor Komoditas Sulsel

Komoditas Ekspor Utama (dalam juta USD)	2025				2025	2026		Pangsa Pasar Q2'26	Growth (yoy)
	I	II	III	IV		I	II		
Nikel	203,99	217,91	240,00	226,69	888,58	195,11	205,70	47,97%	-5,60%
Biji-bijian berminyak dan Obat	23,24	26,28	42,57	61,62	153,71	39,87	51,59	12,03%	17,12%
Ikan dan Udang	40,15	38,36	46,06	52,98	177,54	36,33	43,20	10,07%	12,63%
Biji Coklat dan Coklat Olahan	94,45	108,56	65,70	27,15	295,86	25,87	27,87	6,50%	6,06%
Lak, Getah dan Damar	28,39	44,05	36,23	29,94	138,60	25,13	20,62	4,81%	30,44%
Besi dan Baja	17,85	15,80	20,30	17,90	71,85	18,86	19,76	4,61%	-81,80%
Garam, belerang, kapur	13,02	21,22	16,59	12,80	63,62	15,27	17,05	3,98%	-19,66%
Daging dan Ikan Olahan	9,63	11,18	12,74	14,63	48,18	9,61	15,60	3,64%	39,50%
Kopi,teh, rempah-rempah	13,78	8,63	7,57	7,43	37,41	7,80	6,80	1,59%	-21,16%
Buah-Buahan	4,61	3,29	5,04	4,19	17,14	3,93	5,01	1,17%	-32,75%
Lainnya	17,59	19,01	14,10	13,94	64,63	10,25	15,63	3,65%	5,28%
Nilai Ekspor Sulsel	466,70	514,28	506,89	469,26	1.957,12	388,02	428,82	100,00%	-16,62%

Sumber: BPS, diolah

Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) masih berkontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan terutama terjadi pada penyaluran DBH, DAU, dan Dana Desa, sementara DAK tetap tumbuh positif. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja langsung Pemerintah Pusat belum diikuti oleh perkembangan transfer fiskal ke daerah yang setara pada semester I 2026.

Dari sisi pemerintah daerah, realisasi Belanja APBD Sulawesi Selatan tetap tumbuh positif, meskipun lebih terbatas dibandingkan Belanja Pemerintah Pusat. Pertumbuhan terutama ditopang oleh Belanja Operasi, sementara Belanja Modal juga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebaliknya, Belanja Transfer mengalami kontraksi sehingga menahan peningkatan belanja daerah secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, Konsumsi Pemerintah pada triwulan II 2026 tetap tumbuh tinggi dengan dukungan terutama berasal dari peningkatan realisasi Belanja Pemerintah Pusat. Peningkatan belanja pegawai dan barang sejalan dengan tetap tingginya aktivitas belanja pemerintah pada periode laporan. Sementara itu, dukungan fiskal daerah relatif lebih terbatas, tercermin dari kontraksi TKD dan pertumbuhan Belanja APBD yang lebih moderat. Perkembangan tersebut konsisten dengan Konsumsi Pemerintah yang tetap menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, meskipun momentumnya lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya.

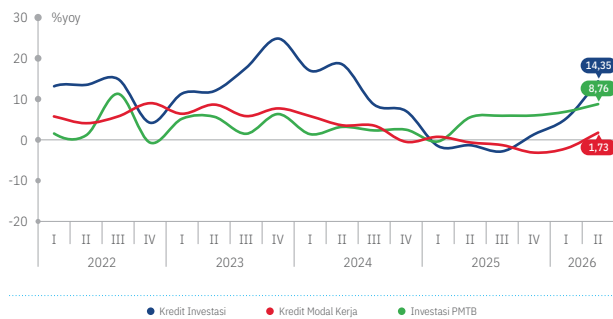
1.2.2. Investasi

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 menguat. PMTB tumbuh sebesar 8,76% (yoy), meningkat dibandingkan 6,91% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Dengan pangsa sebesar 34,94% terhadap PDRB, PMTB tetap menjadi salah satu komponen utama yang menopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan laporan. Penguatan PMTB sejalan dengan peningkatan aktivitas investasi bangunan dan nonbangunan, serta berlanjutnya realisasi investasi pemerintah dan swasta.

Penguatan investasi bangunan tercermin dari meningkatnya aktivitas konstruksi pada triwulan laporan. Pengadaan semen tumbuh sebesar 22,10% (yoy), meningkat dibandingkan 19,10% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut sejalan dengan akselerasi LU Konstruksi serta berlanjutnya aktivitas pembangunan pemerintah dan swasta di Sulawesi Selatan. Dari sisi fiskal, realisasi belanja modal Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan dengan peningkatan aktivitas pembentukan aset pemerintah pada semester I 2026 (Grafik 1.8).

Dari sisi pembiayaan, kredit investasi mengalami akselerasi, dari 5,23% (yoy) pada triwulan I 2026 menjadi 14,73% (yoy) pada triwulan laporan. Peningkatan tersebut menunjukkan menguatnya penyaluran pembiayaan perbankan untuk kebutuhan investasi. Sementara itu, kredit modal kerja masih

Grafik 1.9. Kredit Investasi dan Modal Kerja



Sumber: LBU, diolah

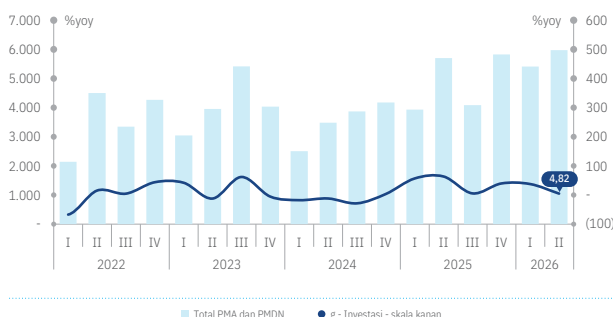
tumbuh sebesar 1,73% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang kontraksi 2,08% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan penguatan kredit pada triwulan II 2026 terutama bersumber dari kredit investasi, sementara kredit untuk kebutuhan modal kerja masih terbatas (Grafik 1.9).

Realisasi investasi swasta juga tetap tumbuh positif pada triwulan laporan. Secara keseluruhan, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tumbuh sebesar 4,81% (yoy) pada triwulan II 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan berlanjutnya aktivitas investasi langsung di Sulawesi Selatan, sejalan dengan penguatan PMTB dan peningkatan kredit investasi pada periode laporan (Grafik 1.10).

Selain investasi bangunan, indikator investasi nonbangunan turut menunjukkan perkembangan positif. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB I) tumbuh sebesar 9,82% (yoy) pada triwulan II 2026, sejalan dengan peningkatan registrasi kendaraan baru pada periode laporan. Perkembangan tersebut memberikan indikasi tambahan atas berlanjutnya aktivitas pembentukan modal nonbangunan, khususnya kendaraan (Grafik 1.11).

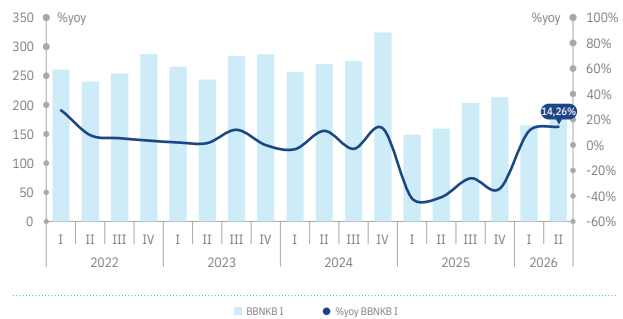
Secara keseluruhan, penguatan PMTB pada triwulan II 2026 ditopang oleh peningkatan aktivitas investasi bangunan dan nonbangunan, serta berlanjutnya investasi pemerintah dan

Grafik 1.10. PMA dan PMDN



Sumber: DPMPPTSP, diolah

Grafik 1.11. BBNKB I



Sumber: DPMPPTSP, diolah

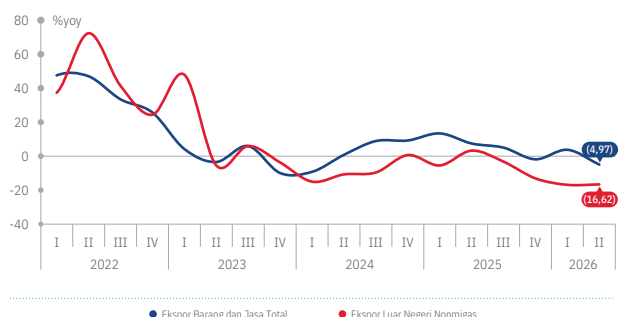
swasta. Perkembangan tersebut menegaskan peran PMTB sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan laporan.

1.2.3. Ekspor dan Impor

Kinerja Ekspor Barang dan Jasa Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 mengalami kontraksi sebesar 4,97% (yoy), berbalik arah dibandingkan pertumbuhan 3,77% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh kontraksi ekspor barang dan jasa. Sejalan dengan itu, ekspor luar negeri nonmigas Sulawesi Selatan masih terkontraksi sebesar 16,62% (yoy), relatif stabil dibandingkan kontraksi 16,86% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Tabel 1.2). Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa tekanan terhadap kinerja ekspor pada triwulan laporan terutama berasal dari perdagangan barang luar negeri (Grafik 1.12).

Kontraksi ekspor barang terutama dipengaruhi oleh penurunan ekspor besi dan baja. Pada triwulan II 2026, nilai ekspor besi dan baja turun sebesar 81,80% (yoy), disertai penurunan volume sebesar 87,58% (yoy). Penurunan yang cukup dalam tersebut antara lain dipengaruhi oleh berhentinya kegiatan operasional salah satu industri besi dan baja sejak semester II 2025, sehingga aktivitas produksi dan ekspor pada triwulan II 2026 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, ekspor nikel juga masih

Grafik 1.12. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa & Ekspor LN Nonmigas



Sumber: DJBC, diolah

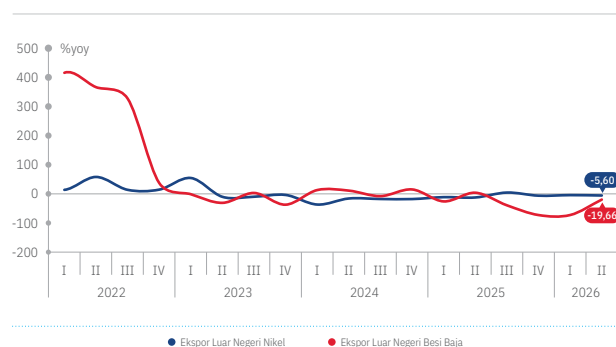
mengalami kontraksi sebesar 5,60% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi 4,35% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Dengan pangsa kedua komoditas yang relatif besar dalam struktur ekspor Sulawesi Selatan, perkembangan tersebut menjadi faktor utama yang menahan kinerja ekspor pada triwulan laporan (Grafik 1.13).

Pelemahan ekspor juga terjadi pada sejumlah komoditas lainnya. Ekspor buah-buahan terkontraksi sebesar 32,75% (yoy), diikuti kopi, teh, dan rempah-rempah sebesar 21,16% (yoy), serta garam, belerang, dan kapur yang menurun 19,66% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kontraksi ekspor tidak hanya bersumber dari komoditas mineral, tetapi juga terjadi pada beberapa komoditas lainnya. Hal ini turut menahan perbaikan kinerja ekspor luar negeri Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026.

Di tengah penurunan ekspor tersebut, perkembangan harga beberapa komoditas utama menunjukkan peningkatan. Berdasarkan BPS, indeks harga nikel dan besi dan baja masing-masing meningkat sebesar 39,26% dan 25,92% (yoy), sementara kurs ekspor meningkat 6,13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, peningkatan harga tersebut berlangsung di tengah penurunan volume ekspor, terutama besi dan baja. Mengingat penghitungan PDRB menggunakan harga konstan, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan harga belum sepenuhnya ditransmisikan pada peningkatan kinerja ekspor secara riil.

Secara keseluruhan, kontraksi Ekspor Barang dan Jasa pada triwulan II 2026 terutama dipengaruhi oleh melemahnya ekspor barang, khususnya besi dan baja serta nikel. Penurunan yang turut terjadi pada sejumlah komoditas lainnya menyebabkan ekspor menjadi salah satu faktor penahan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan laporan.

Grafik 1.13. Perkembangan Ekspor Nikel dan Besi Baja



Sumber: DJBC, diolah

Kinerja Impor Barang dan Jasa Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tetap tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Impor tumbuh sebesar 9,33% (yoy), lebih rendah dibandingkan 9,98% (yoy) pada triwulan I 2026. Perlambatan tersebut berlangsung di tengah kinerja impor luar negeri yang masih terkontraksi secara tahunan, meskipun secara nominal menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

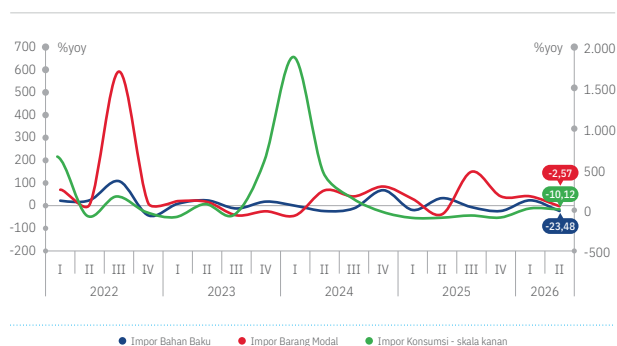
Perkembangan impor menurut jenis penggunaan berdasarkan nilai impor menunjukkan kinerja yang bervariasi pada triwulan laporan. Impor barang konsumsi tetap tumbuh positif, sementara impor bahan baku dan barang modal terkontraksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, impor barang konsumsi masih memberikan dukungan terhadap kinerja impor luar negeri, di tengah lebih rendahnya impor bahan baku dan barang modal (Grafik 1.14).

Secara agregat berdasarkan nilai, impor luar negeri Sulawesi Selatan terkontraksi sebesar 20,99% (yoy) pada triwulan II 2026 (Tabel 1.3). Sejalan dengan itu, secara triwulanan nilai

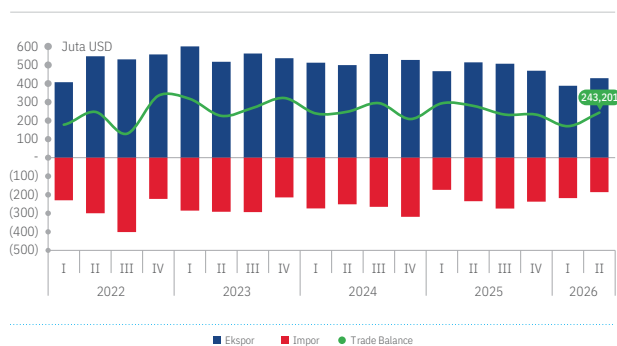
Tabel 1.3 Perkembangan Impor Komoditas Sulsel

Komoditas Impor Utama (dalam juta USD)	2025				2025	2026		Pangsa Pasar Q2'26	Growth Q2'26 (yoy)
	I	II	III	IV		I	II		
Sisa Industri Makanan	40,74	27,21	43,61	25,91	137,47	39,91	54,01	29,10%	98,48%
Gandum	29,81	60,78	42,73	53,65	186,97	45,24	35,07	18,89%	-42,30%
Gula dan Kembang Gula	20,95	42,97	45,08	32,95	141,95	31,03	22,45	12,09%	-47,76%
Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	14,06	13,37	37,66	16,32	81,41	19,32	17,52	9,44%	31,03%
Biji Coklat dan Coklat Olahan	13,56	21,39	19,29	20,97	75,21	6,65	11,37	6,13%	-46,83%
Mesin dan Peralatan Listrik	10,03	15,35	54,09	35,63	115,10	7,03	8,87	4,78%	-42,22%
Perabot, penerangan rumah	1,39	2,43	2,35	1,65	7,82	2,78	4,67	2,52%	91,86%
Bahan Kimia Organik	1,46	1,50	2,47	2,84	8,26	2,15	4,66	2,51%	211,31%
Kapal Terbang dan Bagiannya	0,30	6,01	0,79	0,03	7,14	-	4,41	2,37%	-26,63%
Bahan Bakar Mineral	18,47	12,28	7,89	5,00	43,64	-	3,78	2,04%	-69,19%
Lainnya	22,55	31,63	18,37	42,15	114,70	63,97	18,81	10,13%	-40,54%
Nilai Impor Sulsel	173,31	234,92	274,33	237,10	919,67	218,09	185,62	100,00%	-20,99%

Sumber: BPS, diolah

Grafik 1.14. Pertumbuhan Impor Luar Negeri Non Migas Sulsel Berdasarkan Penggunaan

Sumber: DJBC, diolah

Grafik 1.15. Perkembangan Trade Balance Sulsel

Sumber: DJBC, diolah

impor juga menurun dari US\$218,09 juta pada Triwulan I 2026 menjadi US\$185,62 juta pada Triwulan II 2026. Perkembangan tersebut mengindikasikan moderasi aktivitas impor, baik dibandingkan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama tahun lalu.

Sejalan dengan perkembangan ekspor dan impor, neraca perdagangan Sulawesi Selatan tetap mencatat surplus pada triwulan II 2026. Surplus perdagangan meningkat dari US\$169,93 juta pada triwulan I 2026 menjadi US\$243,20 juta pada triwulan II 2026, seiring nilai ekspor yang tetap lebih tinggi dibandingkan impor. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa posisi perdagangan luar negeri Sulawesi Selatan tetap mencatat surplus di tengah kontraksi ekspor dan impor luar negeri secara tahunan (Grafik 1.15).

1.3. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi lapangan usaha (LU), perlambatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 terutama dipengaruhi oleh kontraksi LU Pertanian serta moderasi LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan. Perkembangan tersebut terjadi seiring dengan turunnya produksi pertanian dan normalisasi aktivitas ekonomi pasca tingginya aktivitas pada periode long festive season HBKN Ramadan dan Idulfitri di triwulan sebelumnya. Di sisi lain, perlambatan yang lebih dalam tertahan oleh akselerasi LU Konstruksi serta membaiknya kinerja LU Pertambangan, meskipun masih berada pada zona kontraksi.

LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terkontraksi sebesar 0,26% (yoy) pada triwulan II 2026, berbalik dari pertumbuhan positif pada triwulan sebelumnya. Kontraksi terutama dipengaruhi oleh penurunan produksi subsektor tanaman pangan dan perikanan. Produksi padi menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara kinerja perikanan tertahan oleh penurunan produksi rumput laut. Di sisi lain, peningkatan produksi jagung dan kelapa sawit serta kinerja hortikultura dan peternakan menahan kontraksi LU Pertanian lebih dalam.

LU Pertambangan dan Penggalian masih terkontraksi sebesar 0,42% (yoy), namun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbaikan terutama ditopang oleh peningkatan aktivitas pertambangan dan penggalian lainnya (galian C) sejalan dengan kebutuhan pembangunan fisik/proyek konstruksi, serta peningkatan produksi gas alam. Sementara itu, pertambangan bijih logam masih menjadi faktor penahan seiring penurunan produksi dan ekspor nikel pada periode laporan.

LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 5,19% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan terutama dipengaruhi oleh melambatnya produksi industri barang galian bukan logam serta penurunan produksi industri logam dasar (smelter) akibat penutupan pabrik. Perkembangan tersebut juga sejalan dengan penurunan impor bahan baku serta penggunaan listrik industri yang masih terkontraksi. Dari sisi pembiayaan, kredit industri juga masih mengalami kontraksi pada periode laporan.

LU Perdagangan Besar dan Eceran tetap tumbuh kuat sebesar 8,09% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Moderasi berlangsung sejalan dengan normalisasi aktivitas konsumsi masyarakat pasca tingginya aktivitas pada periode HBKN Ramadan dan Idulfitri di triwulan I 2026. Meski demikian, aktivitas perdagangan tetap tumbuh, tercermin dari penjualan eceran dan perdagangan kendaraan bermotor yang masih meningkat serta membaiknya penyaluran kredit perdagangan. Keyakinan konsumen juga tetap berada pada zona optimis meskipun termoderasi.

Di sisi lain, LU Konstruksi menguat menjadi 8,97% (yoy) pada triwulan II 2026. Akselerasi terutama didorong oleh peningkatan pembangunan fisik pemerintah, sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja modal pemerintah. Penguatan aktivitas konstruksi turut tercermin dari meningkatnya pengadaan semen dan aktivitas usaha konstruksi, serta berlanjutnya realisasi investasi dan pembiayaan sektor konstruksi.

Secara keseluruhan, perlambatan ekonomi Sulawesi Selatan dari sisi lapangan usaha terutama dipengaruhi oleh kontraksi LU Pertanian serta moderasi LU Industri Pengolahan dan

LU Perdagangan. Sementara itu, penguatan LU Konstruksi dan membaiknya LU Pertambangan menahan perlambatan pertumbuhan yang lebih dalam pada triwulan laporan.

1.3.1. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 mengalami kontraksi sebesar 0,26% (yoy), berbalik arah dibandingkan pertumbuhan 4,96% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Dengan pangsa sebesar 23,01% terhadap PDRB, perkembangan LU Pertanian menahan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan laporan. Kontraksi terutama dipengaruhi oleh penurunan produksi tanaman pangan dan perikanan, meskipun tertahan oleh peningkatan produksi beberapa komoditas pertanian lainnya.

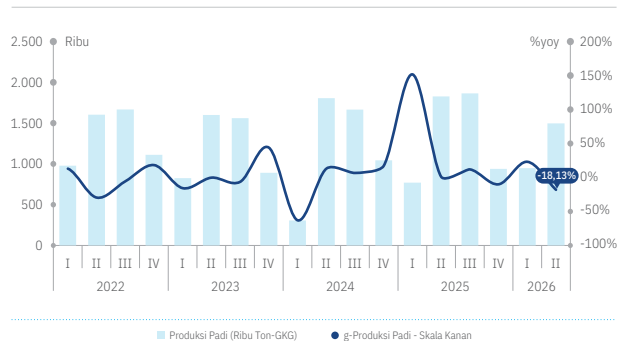
Dari subsektor tanaman pangan, penurunan produksi padi menjadi salah satu faktor utama yang menahan kinerja LU Pertanian. Produksi padi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 1,49 juta ton GKG atau turun 18,68% (yoy). Penurunan produksi padi tersebut menjadi penahan kinerja tanaman pangan, mengingat padi merupakan salah satu komoditas utama pertanian Sulawesi Selatan. Namun demikian, pelemahan lebih lanjut tertahan oleh produksi jagung yang meningkat tinggi sebesar 79,53% (yoy). Dari subsektor perkebunan, produksi kelapa sawit juga meningkat sebesar 10,54% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan kinerja

yang bervariasi antar komoditas, dengan kontraksi produksi padi tertahan oleh peningkatan produksi jagung dan kelapa sawit (Grafik 1.16).

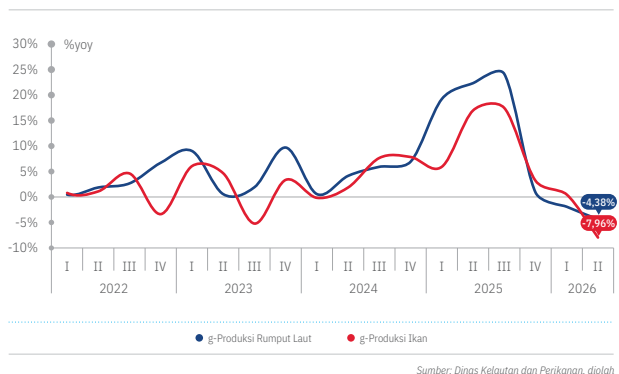
Subsektor perikanan turut menjadi sumber tekanan terhadap LU Pertanian pada triwulan laporan. Produksi perikanan secara keseluruhan terkontraksi sebesar 7,96% (yoy), berbalik dari pertumbuhan positif pada triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut antara lain terjadi pada produksi rumput laut yang terkontraksi 4,38% (yoy), disertai penurunan pada beberapa jenis budidaya. Di sisi lain, perikanan tangkap masih mencatat pertumbuhan positif, sehingga menahan kontraksi subsektor perikanan lebih dalam. Dengan demikian, perkembangan tanaman pangan dan perikanan secara bersama-sama menjadi faktor utama yang menjelaskan melemahnya LU Pertanian pada triwulan II 2026 (Grafik 1.17).

Di tengah kontraksi produksi pada beberapa subsektor, kinerja eksternal komoditas pertanian masih tumbuh positif. Total ekspor pertanian meningkat sebesar 9,95% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 5,98% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perbaikan terutama terlihat pada ekspor ikan dan udang, serta rumput laut yang berbalik tumbuh positif, sementara ekspor biji dan olahan kakao tetap meningkat. Sebaliknya, ekspor buah-buahan masih mengalami kontraksi. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kinerja ekspor sejumlah komoditas pertanian masih memberikan dukungan di tengah kontraksi produksi domestik pada beberapa subsektor (Grafik 1.18).

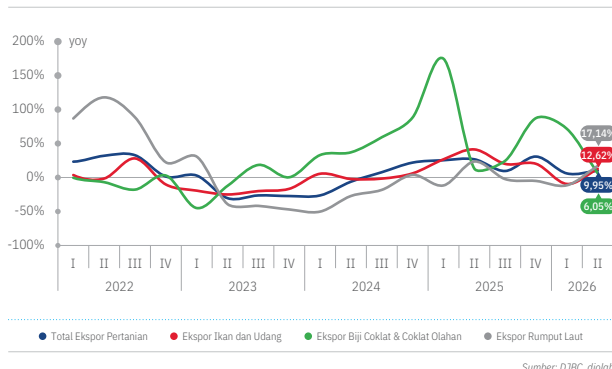
Grafik 1.16 .Produksi Padi dan Luas Panen



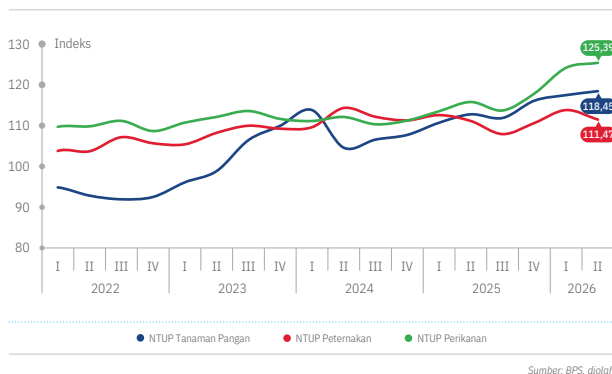
Grafik 1.17. Produksi Perikanan Sulawesi Selatan



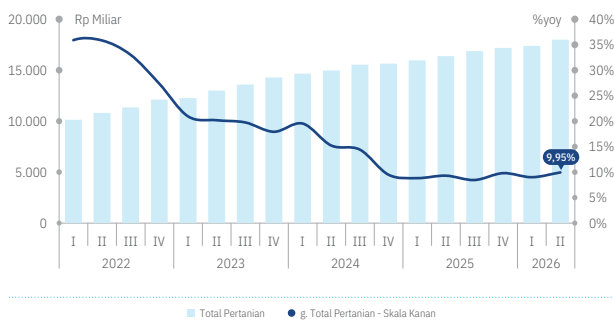
Grafik 1.18. Perkembangan Ekspor Pertanian & Perikanan



Grafik 1.19. Nilai Tukar Usaha Pertanian



Grafik 1.20. Kredit LU Pertanian



Sumber: LBU, diolah

Kondisi usaha petani pada triwulan II 2026 masih relatif terjaga, tercermin dari Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yang tetap berada di atas level 100. NTUP total meningkat dari 122,70 pada triwulan I 2026 menjadi 123,26 pada triwulan II 2026. Seluruh subsektor juga masih mencatatkan NTUP di atas 100, menunjukkan bahwa penerimaan usaha pertanian secara umum masih lebih tinggi dibandingkan pengeluaran usaha pertanian di tengah kontraksi kinerja LU Pertanian pada periode laporan (Grafik 1.19).

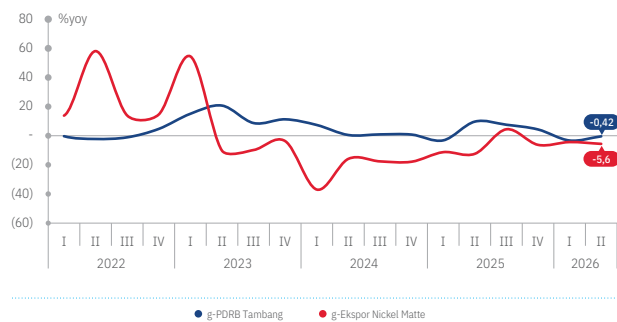
Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit kepada LU Pertanian tetap tumbuh positif dan mengalami peningkatan. Kredit LU Pertanian tumbuh sebesar 9,95% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan 9,00% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa dukungan pembiayaan perbankan kepada sektor pertanian tetap terjaga di tengah pelemahan kinerja LU Pertanian pada triwulan laporan (Grafik 1.20).

Secara keseluruhan, kontraksi LU Pertanian pada triwulan II 2026 terutama bersumber dari penurunan kinerja tanaman pangan dan perikanan. Kontraksi lebih dalam tertahan oleh peningkatan produksi beberapa komoditas, kinerja ekspor pertanian yang tetap positif, serta kondisi usaha dan pembiayaan yang masih terjaga.

1.3.2. Lapangan Usaha Pertambangan

Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 masih mengalami kontraksi sebesar 0,42% (yoy), namun membaik dibandingkan kontraksi 3,27% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Dengan pangsa sebesar 4,47% terhadap PDRB, perbaikan kinerja terutama ditopang oleh peningkatan aktivitas pertambangan dan penggalian lainnya (galian C) sejalan dengan kebutuhan pembangunan fisik/proyek konstruksi, serta peningkatan produksi gas alam. Di sisi lain, kinerja pertambangan bijih logam masih menjadi faktor penahan seiring penurunan produksi nikel pada periode laporan.

Grafik 1.21. Ekspor Nikel



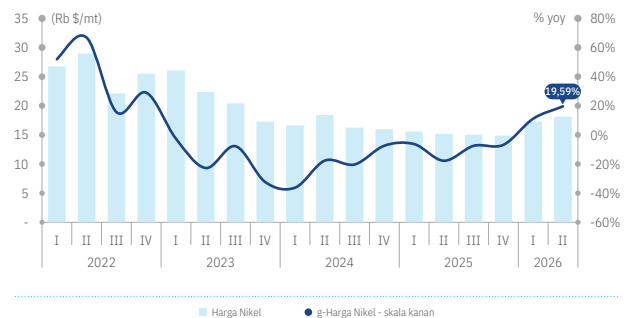
Sumber: DJBC, diolah

Pada komoditas utama, produksi nikel terkontraksi sebesar 12,89% (yoy) pada triwulan II 2026, antara lain dipengaruhi oleh penyesuaian aktivitas produksi terkait regulasi. Sejalan dengan perkembangan produksi, ekspor nikel masih terkontraksi sebesar 5,60% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi 4,35% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.21). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan nikel masih menjadi faktor penahan kinerja LU Pertambangan, sementara peningkatan aktivitas galian C dan produksi gas alam menahan kontraksi lebih dalam.

Di tengah masih tertahannya aktivitas nikel, perkembangan harga nikel menunjukkan perbaikan pada triwulan laporan. Harga nikel tercatat sekitar US\$18,19 ribu/mt, meningkat 19,59% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 11,12% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Namun demikian, peningkatan harga berlangsung di tengah produksi dan ekspor nikel yang masih terkontraksi. Dengan demikian, perbaikan harga nikel belum diikuti oleh peningkatan aktivitas produksi dan ekspor pada periode laporan (Grafik 1.22).

Dari sisi biaya operasional, peningkatan harga energi berpotensi memberikan tekanan terhadap aktivitas pertambangan. Harga minyak WTI tercatat sebesar US\$93,20/barel atau meningkat

Grafik 1.22. Harga Nikel



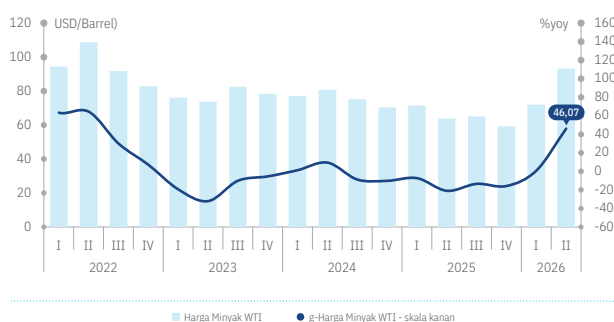
Sumber: Bloomberg, diolah

46,07% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dibandingkan US\$71,99/barel atau tumbuh 0,78% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Peningkatan harga energi tersebut dapat meningkatkan biaya operasional pelaku usaha pertambangan, sehingga menjadi salah satu faktor yang perlu dicermati di tengah perbaikan kinerja LU Pertambangan yang masih terbatas (Grafik 1.23).

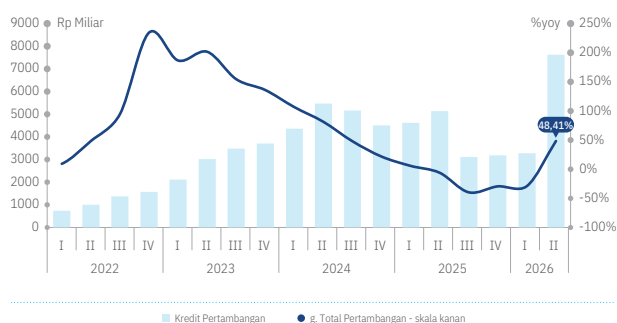
Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit kepada sektor pertambangan tetap tumbuh kuat. Kredit pertambangan tumbuh sebesar 48,41% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang kontraksi sebesar 29,02% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan dukungan pembiayaan perbankan kepada sektor pertambangan yang tetap meningkat di tengah kinerja LU Pertambangan yang masih berkontraksi (Grafik 1.24).

Secara keseluruhan, kinerja LU Pertambangan pada triwulan II 2026 masih berkontraksi, namun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Perbaikan terutama ditopang oleh peningkatan aktivitas galian C dan produksi gas alam, sementara penurunan produksi nikel masih menahan kinerja LU Pertambangan pada periode laporan.

Grafik 1.23. Harga Minyak WTI



Grafik 1.24. Kredit Pertambangan



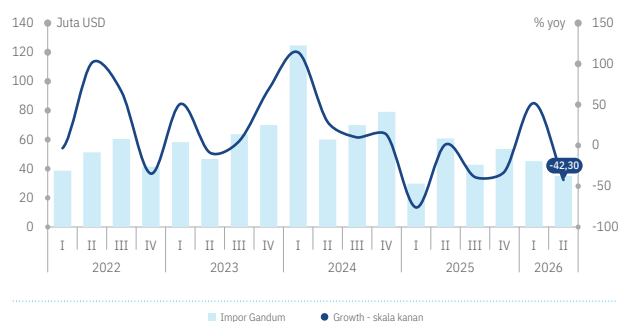
1.3.3. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Kinerja LU Industri Pengolahan Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tetap tumbuh positif sebesar 5,19% (yoy), namun melambat dibandingkan 10,51% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Dengan pangsa sebesar 12,87% terhadap PDRB, LU Industri Pengolahan tetap menjadi salah satu penopang perekonomian Sulawesi Selatan, meskipun dengan momentum pertumbuhan yang lebih moderat. Perlambatan terutama dipengaruhi oleh melambatnya produksi industri barang galian bukan logam serta penurunan produksi industri logam dasar (*smelter*) akibat penutupan pabrik.

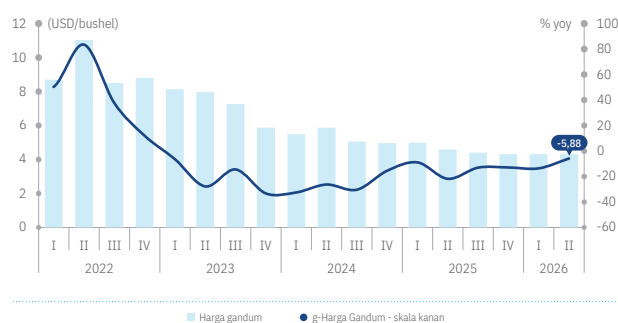
Dari industri makanan dan minuman, perkembangan input produksi menunjukkan moderasi pada triwulan laporan. Impor gandum tercatat sebesar US\$35,07 juta atau berkontraksi 42,30% (yoy), berbalik dari pertumbuhan 51,78% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut menunjukkan lebih rendahnya impor salah satu bahan baku industri makanan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 1.25).

Sementara itu, harga gandum global mengalami penurunan secara tahunan. Harga gandum tercatat sekitar US\$4,32/bushel atau turun 5,88% (yoy) pada triwulan II 2026, setelah pada

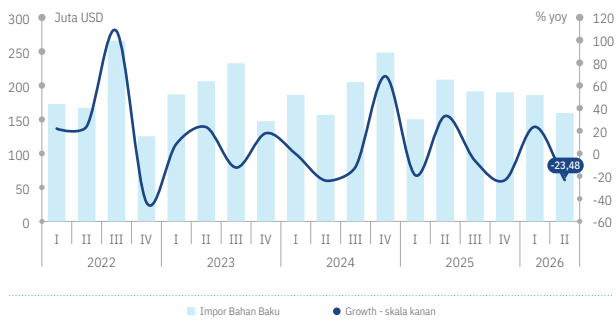
Grafik 1.25. Impor Gandum



Grafik 1.26. Harga Gandum



Grafik 1.27. Impor Bahan Baku



Sumber: D3BC, diolah

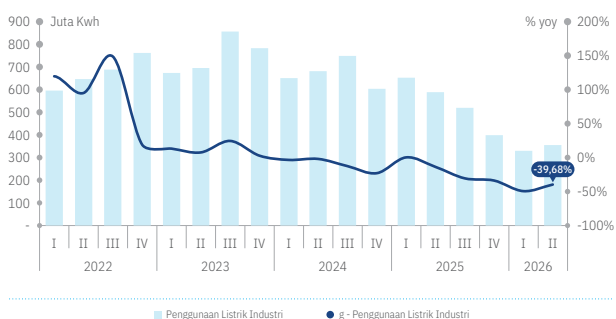
triwulan sebelumnya terkontraksi 13,60% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tekanan harga gandum global masih relatif rendah pada periode laporan (Grafik 1.26).

Secara lebih luas, impor bahan baku juga mengalami penurunan pada triwulan II 2026. Nilai impor bahan baku tercatat sebesar US\$159,4 juta atau terkontraksi 23,48% (yoy), berbalik dari pertumbuhan 23,51% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut menunjukkan lebih rendahnya impor input produksi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan dengan moderasi aktivitas LU Industri Pengolahan pada periode laporan (Grafik 1.27).

Perlambatan LU Industri Pengolahan juga tercermin dari penggunaan listrik industri yang masih mengalami kontraksi, meskipun membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Penggunaan listrik industri terkontraksi sebesar 39,68% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih baik dibandingkan kontraksi 49,37% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut menunjukkan penggunaan energi sektor industri yang masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan dengan moderasi kinerja LU Industri Pengolahan (Grafik 1.28).

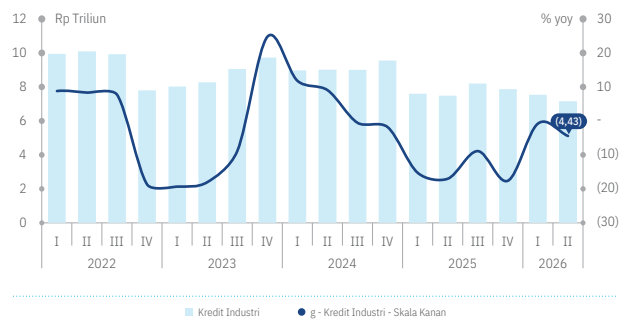
Dari sisi pembiayaan, kredit kepada sektor industri masih mengalami kontraksi dan melemah dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit industri terkontraksi sebesar 4,44% (yoy)

Grafik 1.28. Penggunaan Listrik Industri



Sumber: PLN, diolah

Grafik 1.29. Kredit Industri Pengolahan



Sumber: LBU, diolah

pada triwulan II 2026, lebih dalam dibandingkan kontraksi 0,78% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan penyaluran pembiayaan perbankan kepada sektor industri yang masih terbatas pada periode laporan (Grafik 1.29).

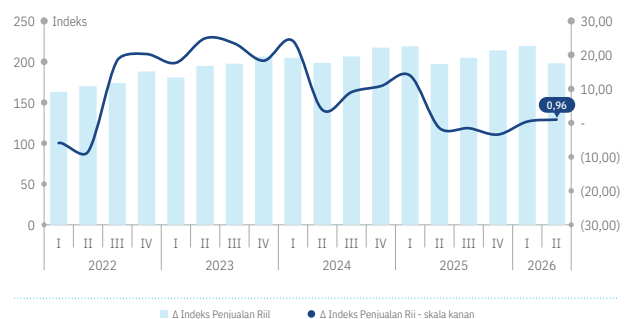
Secara keseluruhan, LU Industri Pengolahan pada triwulan II 2026 tetap tumbuh positif, namun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Perlambatan terutama dipengaruhi oleh moderasi industri barang galian bukan logam dan penurunan produksi industri logam dasar, sejalan dengan sejumlah indikator aktivitas industri yang masih tertahan.

1.3.4. Lapangan Usaha Perdagangan

Kinerja LU Perdagangan Besar dan Eceran Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tetap tumbuh kuat sebesar 8,09% (yoy), meskipun melambat dibandingkan 8,94% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Dengan pangsa sebesar 14,56% terhadap PDRB, LU Perdagangan tetap menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan laporan. Moderasi kinerja berlangsung setelah tingginya aktivitas perdagangan pada periode long festive season HBKN Ramadan dan Idulfitri yang terkonsentrasi pada triwulan I 2026, sejalan dengan normalisasi aktivitas konsumsi masyarakat pada periode laporan.

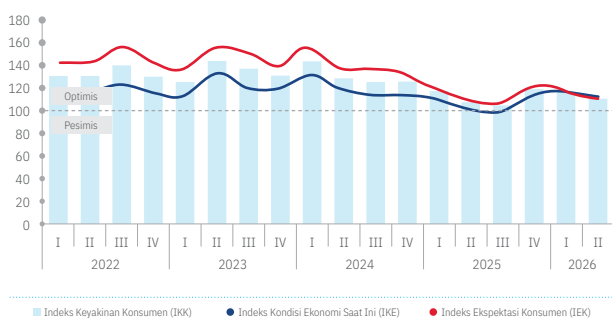
Aktivitas penjualan eceran tetap tumbuh positif dan menunjukkan perbaikan pada triwulan II 2026. Indeks

Grafik 1.30. Indeks Penjualan Riil Kota Makassar



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.31. Survei Konsumen



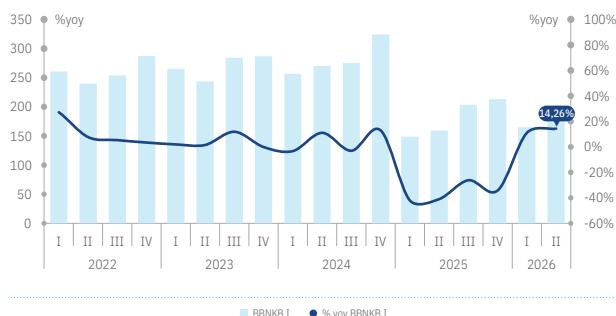
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Penjualan Riil (IPR) tumbuh sebesar 0,5% (yoy) pada triwulan II 2026, sedikit meningkat dibandingkan 0,3% pada triwulan sebelumnya. Perbaikan terutama ditopang oleh kelompok suku cadang dan aksesori yang tumbuh 44,33% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 30,80% (yoy) pada triwulan I 2026. Sementara itu, perkembangan penjualan pada kelompok barang lainnya masih bervariasi. Kondisi tersebut menunjukkan aktivitas penjualan eceran yang tetap tumbuh di tengah moderasi kinerja LU Perdagangan secara keseluruhan (Grafik 1.30).

Di sisi permintaan, perkembangan aktivitas perdagangan berlangsung di tengah moderasi keyakinan konsumen. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menurun dari 117,0 pada triwulan I 2026 menjadi 111,4 pada triwulan II 2026, namun masih berada pada zona optimis (>100). Moderasi terjadi baik pada Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang menurun dari 116,8 menjadi 112,5, maupun Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dari 117,2 menjadi 110,2. Perkembangan tersebut sejalan dengan aktivitas konsumsi masyarakat yang lebih moderat dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun tingkat keyakinan konsumen tetap terjaga pada zona optimis (Grafik 1.31).

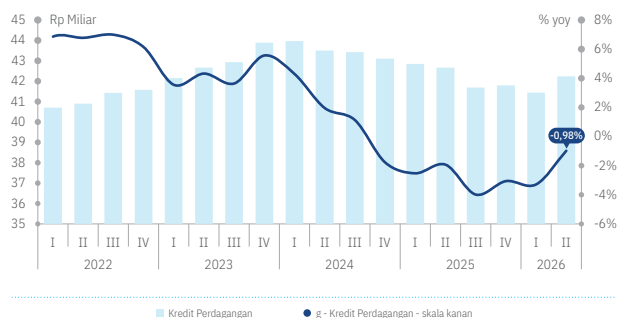
Sementara itu, perdagangan kendaraan bermotor tetap menunjukkan perkembangan positif, meskipun melambat. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) I tumbuh sebesar 9,82% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih rendah dibandingkan 11,00% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Secara nominal,

Grafik 1.32. Penjualan Kendaraan Bermotor



Sumber: Bapenda Sulawesi Selatan, diolah

Grafik 1.33. Kredit Perdagangan



Sumber: LBU, diolah

BBNKB I meningkat dari sekitar Rp165,13 miliar menjadi Rp182,08 miliar. Perkembangan tersebut mengindikasikan aktivitas perdagangan kendaraan bermotor yang tetap tumbuh pada periode laporan, meskipun dengan laju yang lebih moderat (Grafik 1.32).

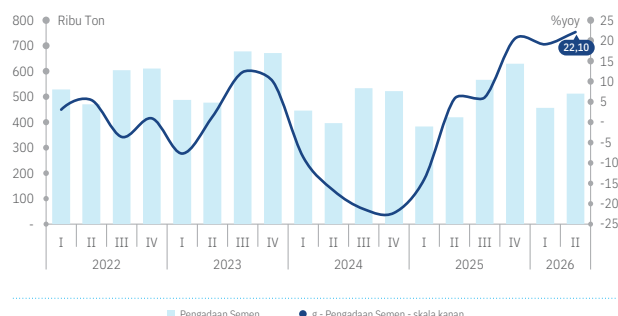
Dari sisi pembiayaan, penyaluran kredit kepada LU Perdagangan menunjukkan perbaikan. Kredit perdagangan pada triwulan II 2026 kontraksi sebesar 1,00% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 3,30% (yoy). Secara nominal, kredit perdagangan meningkat dari sekitar Rp41,44 triliun menjadi Rp42,24 triliun. Perkembangan tersebut menunjukkan membaiknya dukungan pembiayaan perbankan kepada aktivitas perdagangan pada triwulan laporan (Grafik 1.33).

Secara keseluruhan, LU Perdagangan pada triwulan II 2026 tetap tumbuh kuat meskipun mengalami moderasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut sejalan dengan normalisasi aktivitas pasca HBKN, di tengah aktivitas penjualan eceran, perdagangan kendaraan bermotor, dan pembiayaan yang tetap tumbuh positif.

1.3.5. Lapangan Usaha Konstruksi

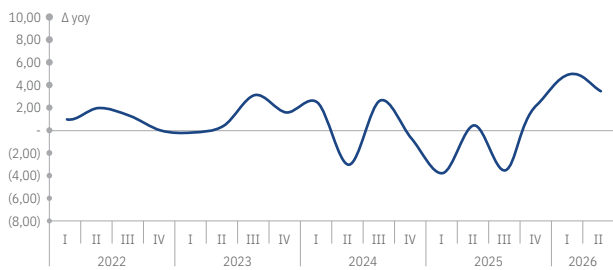
Kinerja LU Konstruksi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tumbuh menguat sebesar 8,97% (yoy), meningkat dibandingkan 6,83% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Dengan

Grafik 1.34. Pengadaan Semen



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia, diolah

Grafik 1.35. SKDU LU Konstruksi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

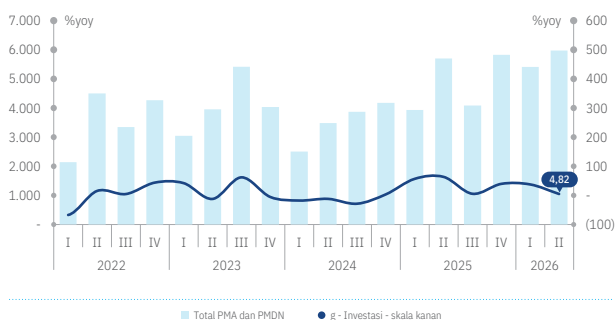
pangsa sebesar 13,08% terhadap PDRB, LU Konstruksi menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan laporan. Penguatan terutama didorong oleh peningkatan pembangunan fisik pemerintah, tercermin dari realisasi belanja modal pemerintah (APBN dan APBD) yang meningkat 189,95% (yoy) pada triwulan II 2026.

Peningkatan aktivitas konstruksi juga tercermin dari pengadaan semen yang tumbuh semakin tinggi. Pengadaan semen tumbuh sebesar 22,10% (yoy) pada triwulan II 2026, meningkat dibandingkan 19,10% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut menunjukkan tetap kuatnya kebutuhan material bangunan sejalan dengan peningkatan aktivitas konstruksi pada periode laporan (Grafik 1.34).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, aktivitas usaha sektor konstruksi juga menunjukkan penguatan. Hal tersebut tercermin dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) menunjukkan peningkatan aktivitas usaha sektor konstruksi. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) LU Konstruksi meningkat dari 4,52% pada triwulan I 2026 menjadi 6,03% pada triwulan II 2026. Peningkatan tersebut mengindikasikan aktivitas usaha konstruksi yang semakin kuat, konsisten dengan akselerasi LU Konstruksi pada triwulan laporan (Grafik 1.35).

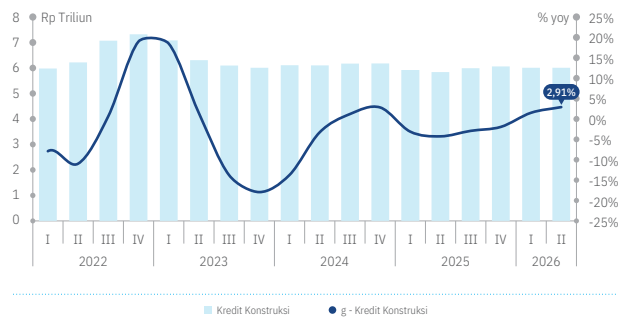
Dari sisi investasi, realisasi PMA dan PMDN tetap tumbuh positif pada triwulan II 2026, meskipun dengan laju yang lebih moderat. Total realisasi PMA dan PMDN tercatat sekitar

Grafik 1.36. PMA dan PMDN



Sumber: DPMPPTSP, diolah

Grafik 1.37. Kredit Konstruksi



Sumber: LBU, diolah

Rp5,97 triliun atau tumbuh 4,81% (yoy), setelah tumbuh 37,65% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut menunjukkan berlanjutnya realisasi investasi di Sulawesi Selatan yang turut mendukung aktivitas pembangunan pada periode laporan (Grafik 1.36).

Dari sisi pembiayaan, kredit konstruksi menunjukkan perbaikan pada triwulan II 2026. Kredit konstruksi tumbuh sebesar 2,81% (yoy), meningkat dibandingkan 1,52% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Secara nominal, kredit konstruksi meningkat dari sekitar Rp6,01 triliun menjadi Rp6,10 triliun. Perkembangan tersebut menunjukkan dukungan pembiayaan perbankan terhadap aktivitas konstruksi yang tetap tumbuh pada periode laporan (Grafik 1.37).

Secara keseluruhan, penguatan LU Konstruksi pada triwulan II 2026 terutama ditopang oleh peningkatan pembangunan fisik pemerintah. Perkembangan tersebut turut didukung oleh meningkatnya aktivitas usaha dan kebutuhan material bangunan, serta berlanjutnya investasi dan pembiayaan sektor konstruksi.

Transmisi Pelemahan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Kegiatan Dunia Usaha Di Sulawesi Selatan

BOKS 1

Dinamika Nilai Tukar Rupiah

Nilai tukar Rupiah mengalami tekanan sepanjang 2026 di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global dan tingginya kebutuhan valuta asing domestik. Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia, nilai tukar Rupiah pada akhir Juli 2026 tercatat lebih lemah dibandingkan posisi awal tahun (Grafik 1.1).

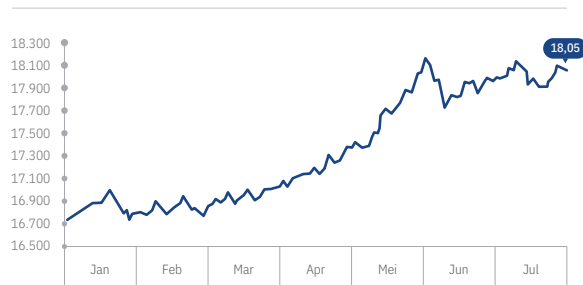
Perkembangan nilai tukar tersebut terjadi seiring masih tingginya tekanan eksternal, antara lain kenaikan harga minyak dunia, tingginya suku bunga dan imbal hasil US Treasury, serta meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global yang mendorong investor untuk lebih berhati-hati dalam menempatkan dana pada aset negara berkembang.

Dari sisi domestik, permintaan valuta asing juga meningkat sejalan dengan kebutuhan pembayaran dividen, kewajiban utang luar negeri, serta kebutuhan transaksi valas korporasi. Kombinasi antara tekanan eksternal dan meningkatnya permintaan valas domestik tersebut turut memberikan tekanan terhadap Rupiah.

Meskipun demikian, fundamental perekonomian Indonesia tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,29% (yoy), didukung oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat. Stabilitas makroekonomi juga ditopang oleh ketahanan sektor keuangan, surplus neraca perdagangan, serta posisi cadangan devisa yang tetap memadai. Kondisi tersebut menjadi bantalan bagi perekonomian domestik dalam menghadapi tingginya volatilitas pasar keuangan global.

Guna mengendalikan dinamika nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global. Dari sisi suku bunga, BI-Rate dinaikkan secara kumulatif sebesar 100 bps dari 4,75% di bulan Mei menjadi 5,75% di pertengahan Juni 2026. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai langkah pre-emptive dan forward-looking untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi dan inflasi di akhir tahun tetap dalam kisaran sasaran.

Grafik 1.1. Perkembangan Nilai Tukar IDR/USD



Sumber: JISDOR, Bank Indonesia

Selain kebijakan suku bunga, Bank Indonesia memperkuat stabilisasi Rupiah melalui peningkatan intensitas intervensi di pasar valas, penguatan daya tarik instrumen moneter SRBI, pembelian SBN di pasar sekunder secara terukur, serta menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Upaya tersebut turut didukung penguatan kebijakan transaksi valas, pendalaman pasar uang dan pasar valas, serta pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian valas yang tinggi.

Transmisi Pelemahan Rupiah terhadap Dunia Usaha

Pelemahan nilai tukar Rupiah tidak memberikan dampak yang seragam terhadap dunia usaha. Dampaknya ditentukan oleh struktur biaya perusahaan, orientasi pasar, kebutuhan valuta asing, serta kemampuan perusahaan dalam melakukan mitigasi risiko. Secara umum, transmisi nilai tukar terhadap kegiatan usaha berlangsung melalui tiga jalur utama, yaitu jalur harga, perdagangan, dan keuangan.

Pada jalur harga, pelemahan Rupiah meningkatkan harga bahan baku, barang modal, maupun input produksi yang berasal dari impor. Kenaikan tersebut dapat meningkatkan biaya produksi dan menekan margin keuntungan apabila perusahaan tidak sepenuhnya dapat meneruskan kenaikan biaya kepada konsumen.

Pada jalur perdagangan, pelemahan Rupiah berpotensi memberikan keuntungan bagi perusahaan berorientasi ekspor karena meningkatkan daya saing harga dan nilai

BOKS 1

penerimaan ekspor dalam denominasi Rupiah. Namun, besarnya manfaat tersebut juga bergantung pada kandungan impor dalam proses produksi perusahaan.

Sementara itu, melalui jalur keuangan, pelemahan Rupiah meningkatkan nilai kewajiban dalam Rupiah bagi perusahaan yang memiliki utang atau kewajiban pembayaran dalam valuta asing. Dampak tersebut menjadi lebih besar bagi perusahaan dengan eksposur valuta asing yang tinggi dan belum memiliki instrumen lindung nilai yang memadai.

Dampak terhadap Kegiatan Dunia Usaha Sulawesi Selatan

penerimaan ekspor dalam denominasi Rupiah. Namun, besarnya manfaat tersebut juga bergantung pada kandungan impor dalam proses produksi perusahaan.

Sementara itu, melalui jalur keuangan, pelemahan Rupiah meningkatkan nilai kewajiban dalam Rupiah bagi perusahaan yang memiliki utang atau kewajiban pembayaran dalam valuta asing. Dampak tersebut menjadi lebih besar bagi perusahaan dengan eksposur valuta asing yang tinggi dan belum memiliki instrumen lindung nilai yang memadai.

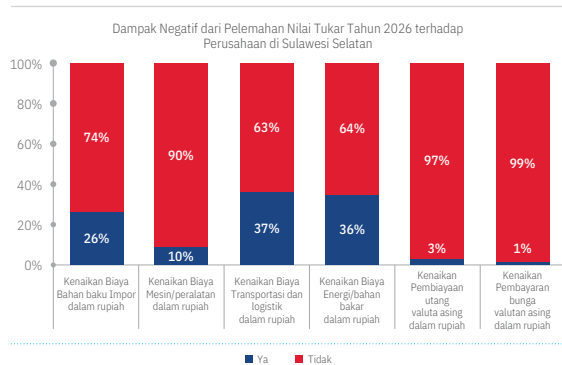
Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia di Sulawesi Selatan terhadap 115 responden menunjukkan bahwa pelemahan nilai tukar Rupiah cenderung memberikan tekanan terhadap kegiatan usaha. Dampak

negatif terutama dirasakan melalui peningkatan harga bahan baku dan biaya operasional, meskipun terdapat pula perusahaan yang memperoleh manfaat dari peningkatan daya saing ekspor dan selisih nilai tukar (Grafik 1.2).

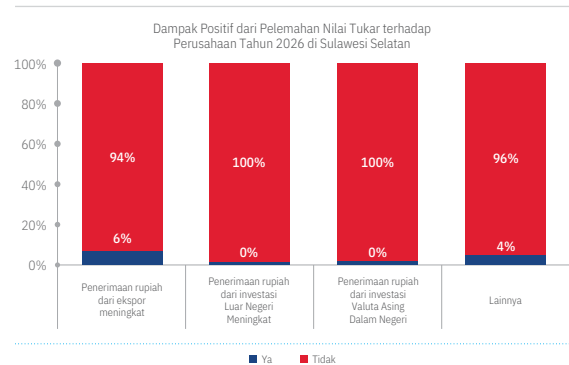
Dampak negatif terutama berasal dari peningkatan biaya produksi dan distribusi. Hasil survei menunjukkan sekitar 37% perusahaan mengalami peningkatan biaya transportasi dan logistik, terutama pada sektor industri pengolahan serta perdagangan besar dan eceran. Selanjutnya, 36% perusahaan menghadapi kenaikan biaya energi dan bahan bakar dalam Rupiah, yang mayoritas dialami pelaku usaha industri pengolahan. Selain itu, sekitar 26% perusahaan mengalami peningkatan biaya bahan baku impor, terutama pada sektor penyediaan akomodasi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa transmisi pelemahan Rupiah terhadap kegiatan usaha di Sulawesi Selatan terutama berlangsung melalui jalur biaya (*cost channel*).

Di sisi lain, sebagian kecil perusahaan memperoleh manfaat dari pelemahan Rupiah, terutama perusahaan yang memiliki kegiatan ekspor. Perusahaan yang merasakan dampak positif mengindikasikan adanya peningkatan penerimaan Rupiah dari kegiatan ekspor. Namun demikian, manfaat tersebut relatif terbatas karena tidak seluruh pelaku usaha di Sulawesi Selatan memiliki orientasi ekspor, sementara sebagian perusahaan eksportir juga masih menggunakan input produksi yang dipengaruhi perkembangan harga internasional (Grafik 1.3).

Grafik 1.2. Dampak Negatif Pelemahan NT



Grafik 1.3. Dampak Positif Pelemahan NT



BOKS 1

Perbedaan dampak antarperusahaan tersebut menunjukkan bahwa pelemahan Rupiah bersifat asimetris terhadap kegiatan usaha Sulawesi Selatan. Perusahaan yang bergantung pada bahan baku, energi, barang modal, maupun pembiayaan dalam valuta asing cenderung menghadapi tekanan biaya yang lebih besar. Sebaliknya, perusahaan dengan penerimaan valuta asing dan kandungan input impor yang relatif rendah berpotensi memperoleh keuntungan dari pelemahan Rupiah.

Respons Dunia Usaha dan Implikasi Kebijakan

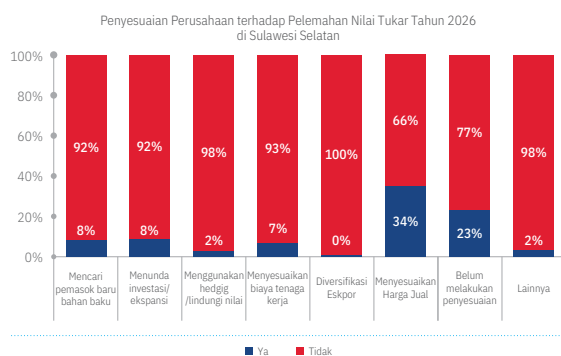
Menghadapi tekanan nilai tukar, perusahaan di Sulawesi Selatan cenderung menempuh strategi penyesuaian yang bersifat jangka pendek. Hasil SKDU menunjukkan bahwa strategi yang paling banyak dilakukan adalah penyesuaian harga jual dan upaya mempertahankan margin usaha, diikuti dengan pencarian alternatif pemasok bahan baku, serta penundaan investasi atau ekspansi. Sementara itu, pemanfaatan instrumen lindung nilai (*hedging*) masih relatif terbatas (Grafik 1.4).

Terbatasnya pemanfaatan instrumen lindung nilai menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan manajemen risiko valuta asing dunia usaha. Penguatan ketahanan perusahaan terhadap volatilitas nilai tukar dapat ditempuh melalui diversifikasi sumber bahan baku, peningkatan pemanfaatan input domestik, serta penguatan penggunaan instrumen *hedging* bagi perusahaan yang memiliki kewajiban valuta asing.

Selain itu, optimalisasi *Local Currency Transaction* (LCT) dalam transaksi perdagangan dan investasi dengan negara mitra dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang dolar AS. Peningkatan penggunaan mata uang lokal, disertai penguatan kapasitas perusahaan dalam mengelola risiko nilai tukar, diharapkan dapat meningkatkan resiliensi dunia usaha di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap gejolak eksternal.

Secara keseluruhan, pelemahan Rupiah memberikan dampak yang berbeda antarperusahaan di Sulawesi Selatan, namun tekanan melalui kenaikan biaya input dan operasional cenderung lebih dominan dibandingkan manfaat yang diperoleh dari peningkatan penerimaan ekspor. Penguatan efisiensi usaha, diversifikasi sumber input, serta peningkatan pemanfaatan instrumen mitigasi risiko nilai tukar menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan kegiatan dunia usaha di tengah volatilitas pasar keuangan global.

Grafik 1.4. Strategi Perusahaan menghadapi Pelemahan NT





Perkembangan Inflasi Daerah



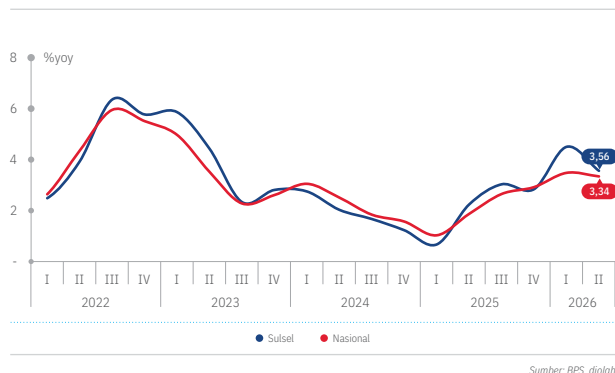
Inflasi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 3,56% (yoy), melandai dari triwulan sebelumnya dan berada sedikit di atas rentang sasaran nasional. Tekanan inflasi terutama bersumber dari emas perhiasan, BBM nonsubsidi, ikan layang, tomat, cabai rawit, dan beras, seiring permintaan yang tetap kuat selama HBKN Iduladha. Namun, tekanan tersebut tertahan oleh normalisasi konsumsi pasca-HBKN Ramadan dan Idulfitri, berakhirnya low-base effect diskon tarif listrik 50%, serta penurunan harga ayam hidup, bawang putih, dan wortel.

Inflasi Sulawesi Selatan pada 2026 diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional. Risiko kenaikan permintaan, gangguan cuaca, dan ketidakpastian harga komoditas global diperkirakan tertahan oleh perbaikan produksi, penguatan cadangan pangan, penyaluran SPHP dan bantuan pangan, serta pelaksanaan GPM. Sinergi TPID melalui strategi 4K terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

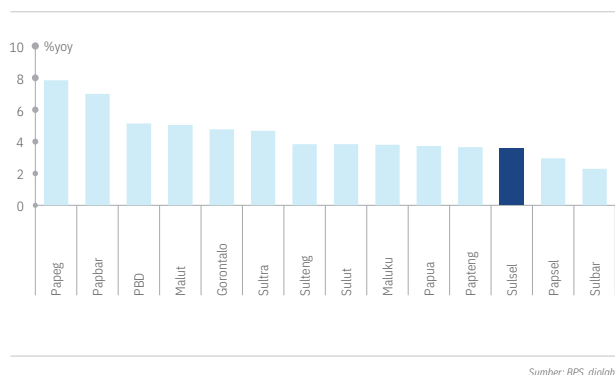
2.1. Kondisi Umum Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan

Pada triwulan II 2026, laju inflasi Sulawesi Selatan (Sulsel) tercatat berada sedikit di atas rentang sasaran inflasi nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$. Secara tahunan, inflasi Sulsel pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 3,56% (yoy), lebih rendah dibanding laju inflasi triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 4,50% (yoy). Kondisi inflasi Sulsel lebih rendah dibandingkan sebagian besar provinsi lainnya di wilayah Sulampua maupun nasional. Capaian inflasi Sulsel pada triwulan II 2026 juga tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional yang mencatatkan inflasi sebesar 3,34% (yoy) (Grafik 2.1). Dengan perkembangan tersebut, Sulsel tercatat menempati posisi inflasi terendah ketiga di antara 14 provinsi di wilayah Sulampua (Grafik 2.2).

Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan



Grafik 2.2. Perbandingan Inflasi Gabungan Kota IHK Provinsi di Sulampua pada Triwulan II 2026



2.2. Perkembangan Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II 2026

Inflasi Sulsel secara tahunan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 3,56% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 4,50% (yoy). Tekanan inflasi pada triwulan II 2026 terutama bersumber dari beberapa kelompok pengeluaran utama. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mencatatkan inflasi sebesar 5,69% (yoy) dengan andil 1,77% (yoy), yang terutama didorong oleh kenaikan harga ikan layang, tomat, dan daging ayam ras. Selanjutnya, Kelompok

Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami inflasi sebesar 10,48% (yoy) dengan andil 0,85% (yoy), yang terutama dipengaruhi oleh harga emas perhiasan yang masih berada pada level tinggi dengan andil sekitar 0,77% (yoy). Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi Kelompok Pakaian dan Alas Kaki yang mencatatkan deflasi 0,42% (yoy) dengan andil -0,03% (yoy) akibat penurunan harga *T-Shirt* Pria seiring masifnya diskon belanja.

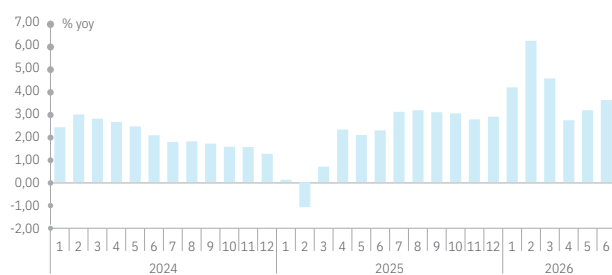
Secara triwulanan, tekanan inflasi dari sisi permintaan pada triwulan II 2026 terutama dipengaruhi oleh konsumsi rutin rumah tangga yang tetap kuat selama periode HBKN Iduladha, sehingga permintaan terhadap bahan pangan segar masih tinggi. Meski demikian, tekanan permintaan cenderung lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 seiring normalisasi konsumsi masyarakat pasca-*full impact* HBKN Ramadan dan Idulfitri dan berakhirnya dampak *low base effect* diskon tarif listrik 50% pada triwulan I 2026.

Permintaan rumah tangga yang tetap kuat, di tengah terbatasnya pasokan, turut mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas pangan utama, khususnya ikan layang, tomat, dan cabai rawit. Ikan layang tercatat mengalami inflasi sebesar 14,99% (yoy) dengan andil 0,14% terhadap inflasi tahunan, terutama akibat keterbatasan pasokan seiring kondisi cuaca yang kurang kondusif. Sementara itu, harga tomat mengalami inflasi sebesar 45,50% (yoy) dengan andil 0,13%, dipengaruhi oleh belum berlangsungnya periode panen serta kendala distribusi.

Meski demikian, ketersediaan pasokan pangan lainnya seperti ayam hidup, bawang putih, dan wortel mampu menahan gejolak inflasi yang lebih tinggi di tengah permintaan masyarakat yang tetap kuat. Kondisi tersebut didukung oleh peningkatan produksi dan penurunan biaya input ayam hidup, kecukupan pasokan bawang putih dari impor, serta kelancaran pasokan wortel lokal dan antarwilayah, sehingga turut meredakan tekanan inflasi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan pada triwulan II 2026 terutama bersumber dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya; serta Kelompok Transportasi. Adapun tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh Kelompok Pakaian dan Alas Kaki yang terpantau mencatatkan deflasi (Tabel 2.1).

Pada triwulan II 2026, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi penyumbang utama inflasi secara tahunan. Inflasi kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tercatat 5,69% (yoy) dengan andil sebesar 1,77%, lebih tinggi

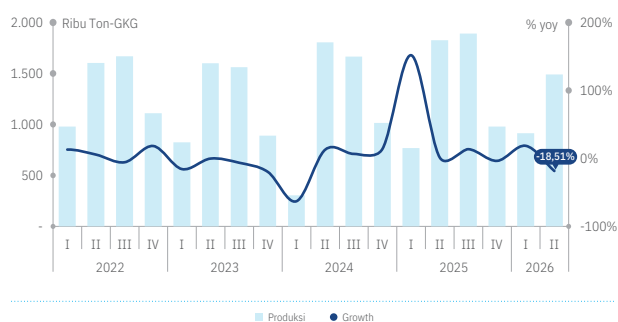
Grafik 2.3. Perkembangan Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber: BPS, diolah

dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar 5,65% (yoy) dengan andil 1,78% (andil yoy). Beberapa komoditas utama yang menyumbang inflasi pada kelompok ini antara lain ikan layang, tomat, cabai rawit, daging ayam ras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), minyak goreng, dan beras.

Komoditas ikan layang pada triwulan II 2026 mencatat inflasi sebesar 14,99% (yoy) dengan andil 0,14% (andil yoy) terhadap inflasi Sulawesi Selatan. Kenaikan harga ikan layang dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan di tingkat konsumen, seiring cuaca yang kurang kondusif dan gelombang tinggi yang mengganggu aktivitas nelayan. Tingginya permintaan periode HBKN Iduladha juga turut menekan harga ikan layang sepanjang periode laporan.

Komoditas tomat juga mencatat inflasi sebesar 45,50% (yoy) dengan andil 0,13% (andil yoy) pada triwulan II 2026. Kenaikan harga tomat terutama dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan akibat belum masuknya periode panen di sejumlah sentra produksi serta kendala distribusi, di tengah permintaan masyarakat yang tetap kuat.

Grafik 2.4. Perkembangan Produksi Padi Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber: BPS, diolah

Adapun komoditas cabai rawit pada triwulan II 2026 mencatat inflasi sebesar 41,51% (yoy) dengan andil 0,13% (andil yoy) terhadap inflasi Sulawesi Selatan. Tekanan harga cabai rawit terutama bersumber dari belum seimbang pasokan dengan kebutuhan konsumsi akibat pola panen yang belum merata antarsentra, sementara permintaan tetap kuat selama periode HBKN Iduladha. Keterbatasan pasokan cabai rawit tercermin pada penurunan produksi cabai rawit yang mengalami kontraksi 6,81% (yoy) (Grafik 2.5).

Komoditas daging ayam ras mencatat inflasi sebesar 15,53% (yoy) dengan andil 0,12%. Inflasi terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga jagung pakan sebesar 27,26% (yoy) (Grafik 2.6 serta konsentrat impor akibat pelemahan nilai tukar dan tingginya biaya logistik global. Kenaikan harga jagung pakan di tengah meningkatnya produksi jagung Sulsel mengindikasikan bahwa tambahan produksi belum sepenuhnya terserap sebagai bahan baku pakan lokal, sehingga turut mendorong penyesuaian harga daging ayam ras di tengah tingginya permintaan periode HBKN Iduladha. Lebih lanjut, informasi anekdotikal mengindikasikan bahwa kenaikan harga daging ayam ras juga

Tabel 2.1 Inflasi Kelompok Barang dan Jasa

Kelompok Inflasi (% YoY)	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Makanan, Minuman Dan Tembakau	6,03	4,06	2,68	0,69	1,61	2,48	5,52	4,46	5,65	5,69
Pakaian Dan Alas Kaki	1,54	0,71	0,88	1,30	1,95	1,87	1,17	0,46	(0,90)	(0,42)
Perumahan, Air, Listrik, Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,50	0,40	0,72	0,86	(6,95)	0,75	0,68	0,71	8,92	1,05
Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin RT	1,09	0,79	0,68	0,83	1,36	0,98	0,61	0,22	(0,34)	1,44
Kesehatan	2,25	1,71	1,77	2,26	1,18	2,16	1,93	1,63	1,10	0,88
Transportasi	2,12	0,90	0,61	(0,06)	(0,08)	0,51	0,27	0,42	0,39	2,57
Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	0,07	(0,12)	(0,14)	(0,28)	(0,47)	(0,52)	(0,58)	(0,46)	(0,12)	1,64
Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	1,17	1,43	1,12	1,28	1,24	1,65	1,43	1,26	0,69	1,04
Pendidikan	1,77	1,78	1,09	0,95	1,02	1,26	1,25	1,12	1,08	1,26
Penyediaan Makanan Dan Minuman/Restoran	1,23	1,27	1,34	2,66	3,23	3,10	2,90	1,25	2,15	3,10
Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	2,43	4,28	5,22	6,39	9,31	10,50	10,57	14,47	16,55	10,48

Sumber: BPS, diolah

sejalan dengan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga meningkatkan permintaan daging ayam ras secara tahunan.

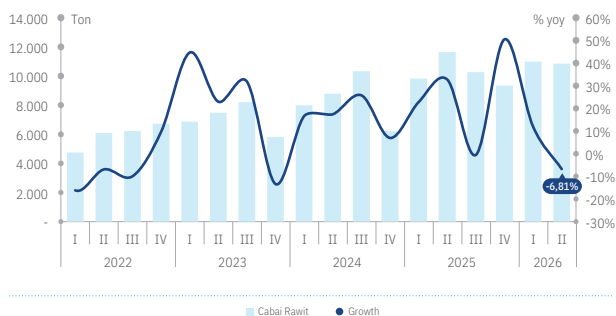
Selain itu, komoditas Sigaret Kretek Mesin (SKM) juga mencatatkan inflasi 4,61% (yoy) dengan andil 0,12% (andil yoy). Tekanan inflasi sejalan dengan kenaikan harga sigaret kretek mesin (SKM) sebagai dampak berlanjutnya transmisi penyesuaian Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) produk tembakau dalam negeri berdasarkan PMK No. 97 Tahun 2024 yang berlaku sejak awal 2025.

Adapun minyak goreng juga mengalami inflasi sebesar 9,87% (yoy) dengan andil 0,11% (andil yoy). Kenaikan harga komoditas ini dipengaruhi oleh harga minyak sawit mentah (CPO) global yang masih berada pada level relatif tinggi dan mengalami peningkatan secara tahunan, di tengah permintaan yang tetap kuat. Harga CPO global tercatat sebesar USD 1.103,34/metric ton pada triwulan laporan, meningkat 17,81% (yoy) dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Selain itu, kenaikan harga minyak goreng juga didorong oleh kenaikan biaya input akibat kenaikan harga plastik sebagai biaya kemasan.

Komoditas beras kembali mengalami inflasi pada triwulan II 2026 sebesar 2,39% (yoy) dengan andil 0,11%. Tekanan harga terutama dipengaruhi oleh peningkatan permintaan selama HBKN Iduladha di tengah berakhirnya periode panen raya pada triwulan sebelumnya. Selain itu, dampak lanjutan penyesuaian HPP GKP dari Rp5.000/kg menjadi Rp6.500/kg turut menahan harga beras pada level yang relatif tinggi.

Meski demikian, tekanan inflasi beras mulai mereda dibandingkan triwulan sebelumnya. Perkembangan ini didukung oleh penguatan distribusi beras SPHP melalui peningkatan alokasi dan batas maksimal pembelian dari 10 kg menjadi 25 kg, penyaluran bantuan pangan sebesar 20 kg per penerima, serta pelaksanaan GPM sebanyak 201 kali, termasuk GPM serentak menjelang HBKN. Percepatan penyaluran SPHP melalui sinergi lintas instansi dan perbaikan kelancaran distribusi turut mendukung stabilisasi harga beras.

Grafik 2.5. Produksi Cabai Rawit Sulsel



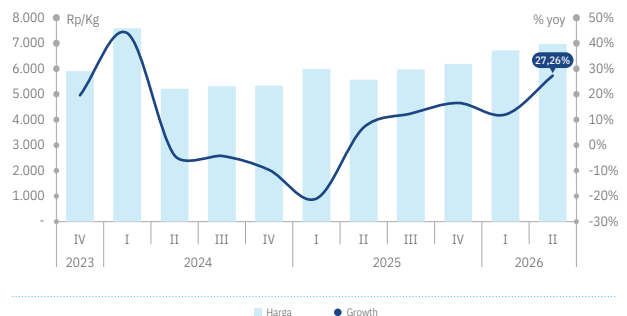
Sumber: Kementan dan Bapanas, diolah

Di sisi lain, tekanan inflasi tahunan Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada komoditas ayam hidup, bawang putih, dan wortel. Komoditas ayam hidup mengalami deflasi sebesar 7,88% (yoy) dengan andil -0,01% (andil yoy), terutama dipengaruhi oleh pasokan yang relatif berlimpah seiring peningkatan produksi serta penurunan biaya input peternakan. Kondisi tersebut menjaga harga ayam hidup tetap rendah sepanjang periode laporan.

Komoditas bawang putih dan wortel juga turut mencatat deflasi dan menjadi penahan tekanan inflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Komoditas bawang putih dan wortel masing-masing mengalami deflasi 4,21% (yoy) dengan andil -0,01% (andil yoy) dan 10,35% (yoy) dengan andil -0,01%. Penurunan harga bawang putih didukung oleh meningkatnya pasokan impor dan kelancaran distribusi, sementara harga wortel menurun seiring terjaganya pasokan dari sentra produksi lokal dan antarwilayah. Secara keseluruhan, kedua komoditas tersebut turut meredam tekanan inflasi pangan pada triwulan II 2026.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga menjadi penyumbang inflasi tahunan pada triwulan II 2026 yang mencatatkan inflasi sebesar 10,48% (yoy) dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,85% (andil yoy). Laju inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat 16,65% (yoy) dan andil 1,32% (andil yoy). Inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya terutama bersumber dari komoditas emas perhiasan yang tercatat inflasi 39,26% (yoy) dengan andil 0,77% (andil yoy). Kenaikan tersebut sejalan dengan berlanjutnya tren peningkatan harga emas global di tengah permintaan domestik terhadap emas perhiasan yang tetap kuat. Berdasarkan data Bloomberg, rata-rata harga emas global pada triwulan II 2026 mencapai USD4.228 per troy ounce, atau meningkat 28,57% (yoy) (Grafik 2.7). Penguatan harga emas turut didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap aset *safe haven* di tengah ketidakpastian ekonomi dan eskalasi tensi geopolitik global.

Grafik 2.6. Harga Jagung Tingkat Peternak Sulsel



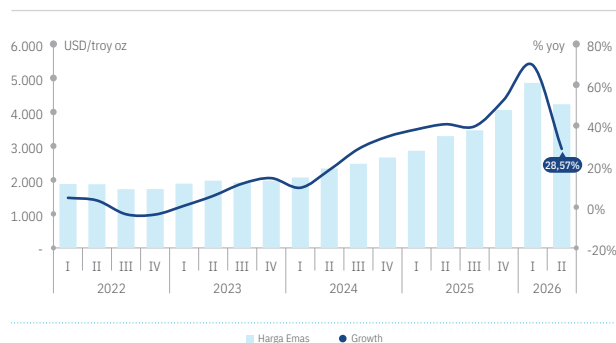
Sumber: Bapanas, diolah

Kelompok selanjutnya yang turut memberi tekanan pada inflasi Sulsel triwulan II 2026 adalah Kelompok Transportasi yang tercatat inflasi 2,57% (yoy) dengan andil 0,32% (andil yoy). Tekanan inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 0,39% (yoy) dengan andil 0,05% (andil yoy). Inflasi pada Kelompok Transportasi terutama disebabkan oleh komoditas bensin yang inflasi sebesar 2,22% (yoy) dengan andil 0,12%. Inflasi tersebut disebabkan oleh kenaikan harga BBM non-subsidi pertamax dan pertamax turbo, masing-masing 1,61% yoy dan 58,80% yoy.

Di sisi lain, Kelompok Pakaian dan Alas Kaki mencatatkan deflasi pada triwulan II 2026. Kelompok Pakaian dan Alas Kaki mencatat deflasi sebesar 0,42% (yoy) dengan andil -0,03% (andil yoy), lebih landai dibanding triwulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar 0,90% (yoy) dengan andil -0,07% (andil yoy). Deflasi terutama bersumber dari penurunan harga pada kelompok sandang, khususnya komoditas pakaian seperti kaos pria tanpa kerah, sepatu pria, dan celana panjang jeans pria. Perkembangan tersebut mencerminkan normalisasi permintaan sandang pasca-peak season HBKN Ramadan dan Idulfitri, di tengah persaingan penjualan yang tetap kuat antara ritel konvensional dan *platform e-commerce*. Kondisi ini mendorong berlanjutnya koreksi harga sejumlah komoditas pakaian dan alas kaki pada triwulan II 2026.

Secara keseluruhan, tekanan inflasi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 terutama bersumber dari kenaikan harga komoditas pangan strategis, emas perhiasan, dan BBM nonsubsidi. Tekanan pangan terutama berasal dari ikan layang, tomat, cabai rawit, dan beras akibat ketidakseimbangan pasokan dan permintaan selama HBKN Iduladha. Sementara itu, kenaikan harga emas perhiasan dipengaruhi oleh penguatan harga emas global, sedangkan tekanan BBM nonsubsidi sejalan dengan perkembangan harga minyak dunia. Meski demikian, inflasi tahunan melandai dibandingkan triwulan sebelumnya, ditopang oleh penurunan harga ayam hidup, bawang putih, dan wortel, serta penguatan program stabilisasi harga melalui GPM, penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan, serta koordinasi TPID dalam kerangka strategi 4K.

Grafik 2.7. Pergerakan Harga Emas Global



Sumber: Bloomberg, diolah

2.3. Perkembangan Inflasi Spasial Provinsi Sulawesi Selatan

Seluruh kota IHK di Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan inflasi pada triwulan II 2026 dan mayoritas berada di atas rentang sasaran inflasi Nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Inflasi tertinggi terjadi di Kab. Luwu Timur sebesar 4,32% (yoy), diikuti oleh Kab. Sidrap dan Kab. Wajo yang masing-masing sebesar 4,30% (yoy) dan 3,80% (yoy). Sementara itu, inflasi terendah terjadi di Kota Bulukumba dan Parepare yang tercatat sebesar 2,57% (yoy). Tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh terjaganya pasokan sejumlah komoditas pangan, terutama bayam, kangkung, dan ikan teri di Palopo, serta beras, udang basah, dan telur ayam ras di Parepare.

Kota Makassar mencatatkan inflasi sebesar 3,56% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih rendah dibanding triwulan I 2026 yang sebesar 4,54% (yoy). Kota Makassar memiliki bobot inflasi terbesar dalam pembentukan inflasi gabungan Sulawesi Selatan, didukung oleh jumlah penduduk yang relatif besar. Kondisi tersebut menyebabkan perubahan pola konsumsi dan perkembangan harga di Kota Makassar menjadi faktor utama yang memengaruhi dinamika inflasi Sulawesi Selatan. Pada triwulan II 2026, inflasi tahunan Kota Makassar terutama didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mencatat inflasi 6,52% (yoy) dengan andil 1,74%. Tekanan inflasi kelompok ini terutama bersumber dari kenaikan harga beras, cabai rawit, dan ikan layang. Beras mencatatkan inflasi 4,15% (yoy) dengan andil 0,15% (yoy) seiring meningkatnya permintaan periode HBKN Iduladha, berakhirnya masa panen, dan kenaikan harga HPP GKP. Cabai rawit juga mencatat inflasi sebesar 46,04% (yoy) dengan andil 0,15%, seiring terbatasnya pasokan dari daerah sentra akibat pola panen yang belum merata, di tengah permintaan yang tetap kuat. Selain itu, ikan layang mengalami inflasi sebesar 16,12% (yoy) dengan andil 0,14%, dipengaruhi oleh keterbatasan hasil tangkapan nelayan akibat kondisi cuaca dan gelombang laut yang kurang kondusif. Di samping itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami inflasi sebesar 9,69% (yoy) dengan andil 0,82%, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan penguatan harga emas global.

Tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada Kelompok Pakaian dan Alas Kaki pada triwulan II 2026 sebesar 1,37% (yoy) dengan andil -0,10%. Penurunan harga pada komponen Kelompok Pakaian dan Alas Kaki dipicu oleh penurunan harga pada komoditas baju kaos pria tanpa kerah dengan andil -0,03% (andil yoy) dan celana panjang jeans pria dengan andil -0,02% (andil yoy).

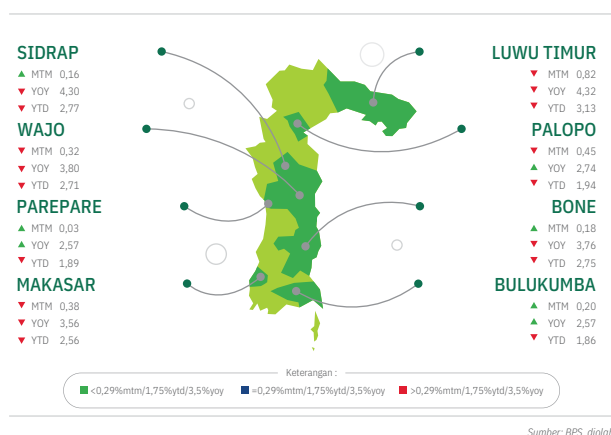
Kab. Bone mencatatkan inflasi sebesar 3,76% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih rendah dibanding 4,70% (yoy) pada triwulan I 2026. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau turut menjadi penyumbang inflasi tahunan utama dengan inflasi sebesar 5,56% (yoy) dengan andil 2,38%. Inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga ikan bandeng, tomat, dan ikan layang dengan andil masing-masing sebesar 0,37%, 0,31%, dan 0,24%. Kenaikan harga ikan bandeng dipengaruhi oleh terbatasnya hasil produksi tambak, sementara pasokan ikan layang menurun akibat kondisi cuaca laut yang kurang kondusif. Adapun tekanan harga tomat bersumber dari belum optimalnya pasokan dari daerah sentra di tengah permintaan yang tetap kuat. Tekanan inflasi juga dipicu oleh kenaikan harga komoditas daging ayam ras khususnya dengan 0,18% (andil yoy), seiring meningkatnya permintaan periode HBKN Iduladha dan MBG di tengah penyesuaian harga input kenaikan pakan ditingkat peternak. Selain itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga menjadi penyumbang inflasi tahunan sebesar 9,48% (yoy), terutama dipengaruhi oleh komoditas emas perhiasan (andil 0,71%) sejalan dengan harga emas global yang terjaga di level tinggi.

Secara tahunan, inflasi Bulukumba pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 2,57% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 3,92% (yoy). Kelompok dengan andil inflasi terbesar adalah Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,64% (andil yoy), diikuti Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,68% (andil yoy), dan Transportasi sebesar 0,12% (andil yoy). Tekanan inflasi terutama bersumber dari emas perhiasan, beras, ikan bandeng, minyak goreng, dan SKM. Inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi komoditas bawang putih, telur ayam ras, kangkung, pisang, dan asam.

Inflasi Kota Parepare pada triwulan II 2026 sebesar 2,57% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 4,04% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi terutama bersumber dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,90% (andil yoy), diikuti Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil 0,87% (yoy), serta Kelompok Transportasi sebesar 0,30% (andil yoy). Secara komoditas, inflasi didorong oleh peningkatan harga emas perhiasan, tomat, SKM, bawang merah, serta pengaruh kenaikan harga pelumas/oli mesin akibat pelemahan nilai tukar yang meningkatkan biaya impor. Adapun tekanan inflasi tertahan oleh komoditas beras, udang basah, telur ayam ras, minuman ringan, dan ikan bandeng.

Secara tahunan, inflasi Kota Palopo pada triwulan II 2026 tercatat 2,73% (yoy), melandai dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 2,81% (yoy). Inflasi didorong oleh Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,03% (andil yoy), Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,50% (andil yoy), serta

Gambar 2.1. Inflasi Menurut Kota IHK pada Triwulan II 2026



Transportasi sebesar 0,25% (andil yoy). Tekanan inflasi bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan, tomat, ikan bandeng, bakso siap santap, dan bawang merah. Sementara itu, inflasi tertahan oleh deflasi bayam, kangkung, ikan teri, jeruk nipis, dan bawang putih.

Secara tahunan, inflasi Kabupaten Sidrap pada triwulan II 2026 tercatat 4,30% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 5,73% (yoy). Inflasi terutama bersumber dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 2,23% (yoy), diikuti Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 1,21% (yoy), serta Kelompok Transportasi sebesar 0,11% (yoy). Secara komoditas, tekanan inflasi terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan, daging ayam ras, nasi dengan lauk, ikan layang, dan ikan bandeng. Sementara itu, inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga telur ayam ras, pendidikan tinggi, cumi-cumi, semen, dan pasta gigi.

Inflasi Kabupaten Wajo pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 3,80% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 4,35% (yoy). Inflasi didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,56% (andil yoy), Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 1,48% (andil yoy), serta Transportasi sebesar 0,37% (andil yoy). Tekanan inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga emas perhiasan, cabai merah, tomat, pelumas/oli mesin, dan bawang merah. Sementara itu, tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh deflasi pada komoditas telur ayam ras, ikan cakalang, ayam hidup, ikan bandeng, dan cumi-cumi yang turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga pada periode laporan.

Luwu Timur pada triwulan II 2026 tercatat mengalami inflasi sebesar 4,32% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2026 yang sebesar 4,80% (yoy). Kontributor utama inflasi adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,46% (andil yoy), diikuti Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,51% (andil yoy), dan Perawatan

Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,38% (andil yoy). Lebih lanjut inflasi didorong oleh tomat, penyediaan air dan minuman, ikan cakalang, nasi dengan lauk, dan bawang merah. Sementara itu, komoditas penahan inflasi berasal dari deflasi beras, telur ayam ras, semen, bola lampu, dan bawang putih.

Secara umum, inflasi kota-kota IHK di Sulawesi Selatan relatif terkendali dan bergerak di sekitar sasaran nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh normalisasi permintaan pascaberakhirnya *full impact* HBKN Ramadan dan Idulfitri, serta berakhirnya dampak *low-base effect* dari kebijakan diskon tarif listrik 50% yang mendorong tingginya inflasi pada triwulan I 2026. Terkendalnya inflasi turut ditopang oleh terjaganya pasokan hortikultura di sejumlah daerah serta penguatan sinergi TPID dalam mengawal berbagai program pengendalian inflasi yang sejalan dengan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan Sejahtera (GPIPS).

BOKS 2

Penguatan Sinergi Pengendalian Inflasi Sulawesi Selatan Melalui Pelaksanaan *High Level Meeting* TPID Jelang HBKN Iduladha 2026

Pada April 2026, Sulawesi Selatan mencatat deflasi sebesar 0,03% (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mengalami inflasi sebesar 0,59% (mtm). Secara tahunan, inflasi Sulawesi Selatan tercatat sebesar 3,50% (yoy), masih berada pada batas atas rentang sasaran nasional sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Sementara itu, inflasi tahun kalender tercatat sebesar 1,17% (ytd), sesuai dengan target indikatif April 2026. Deflasi bulanan terutama didorong oleh penurunan harga emas perhiasan, ikan layang, ikan cakalang, telur ayam ras, dan pepaya. Tekanan deflasi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan harga tomat, angkutan udara, minyak goreng, bawang merah, dan cabai merah.

Berdasarkan disagregasinya, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau mengalami deflasi secara bulanan, tetapi masih mencatat tekanan inflasi yang relatif tinggi secara tahun kalender. Pada April 2026, kelompok tersebut mengalami deflasi sebesar 0,06% (mtm), sementara inflasi tahun kalender dan tahunan masing-masing tercatat sebesar 2,79% (ytd) dan 5,65% (yoy). Inflasi tahun kalender kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau tersebut berada di atas target indikatif April 2026 sebesar 1,67%. Secara komoditas, tekanan inflasi pangan terutama bersumber dari kenaikan harga tomat, cabai rawit, ikan layang, ikan bandeng, dan telur ayam ras. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian inflasi pangan masih menjadi tantangan utama, khususnya menjelang HBKN Iduladha yang secara musiman diikuti peningkatan permintaan terhadap produk peternakan, pangan, dan kebutuhan pokok masyarakat.

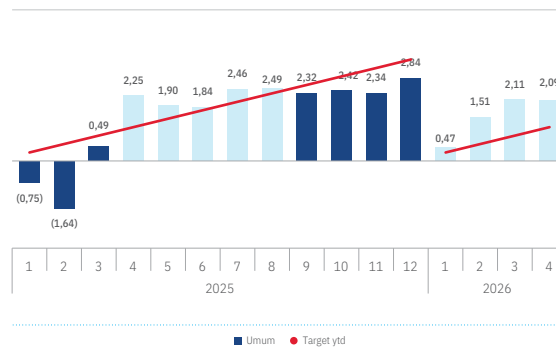
Selain peningkatan permintaan selama HBKN Iduladha, pengendalian inflasi Sulawesi Selatan menghadapi risiko gangguan produksi dan distribusi pangan akibat perkembangan kondisi cuaca. BMKG memprakirakan peristiwa El Nino dengan intensitas sangat kuat pada semester II 2026. Sejalan dengan itu, BMKG memprakirakan musim kemarau 2026 di sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan cenderung lebih kering dibandingkan kondisi normal, dengan 79% wilayah diperkirakan mengalami sifat musim kemarau bawah normal. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan September 2026. Kondisi tersebut dapat

meningkatkan risiko penurunan produktivitas pangan strategis, terutama pada lahan yang bergantung pada curah hujan dan memiliki keterbatasan infrastruktur pengairan. Di sisi lain, potensi gelombang tinggi turut meningkatkan risiko terhadap aktivitas penangkapan dan distribusi ikan. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi melalui penguatan sarana dan prasarana pengairan, optimalisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), penyediaan fasilitas penyimpanan dingin, serta intervensi stabilisasi harga dan pasokan.

Ketersediaan data stok pangan yang akurat juga menjadi faktor penting dalam mendukung ketepatan kebijakan pengendalian inflasi. Perkembangan stok dan inflasi sejumlah komoditas strategis masih menunjukkan ketidaksesuaian yang mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas pencatatan stok di tingkat distributor dan pedagang besar. Di samping itu, pelaksanaan KAD selama 2025–2026 masih perlu dioptimalkan agar tidak terbatas pada penandatanganan kesepakatan, tetapi dilanjutkan dengan realisasi perdagangan antardaerah. Pemanfaatan data neraca pangan, perkembangan harga, dan prakiraan cuaca secara terintegrasi diperlukan untuk memetakan daerah surplus dan defisit, menentukan komoditas prioritas, serta mendukung pelaksanaan KAD dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) secara lebih tepat sasaran.

Dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian inflasi menjelang HBKN Iduladha 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Bank Indonesia menyelenggarakan *High Level Meeting* (HLM) TPID

Gambar B2.1. Inflasi Mamintem Sulsel Tahun Berjalan – April 2026



Sumber: BPS, dialah (2026)

BOKS 2

Provinsi Sulawesi Selatan pada Mei 2026. Forum tersebut menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, Bulog, BUMD pangan, dan pemangku kepentingan terkait untuk mengevaluasi perkembangan inflasi serta merumuskan langkah antisipatif dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi menjelang HBKN Iduladha.

Dalam forum tersebut turut dibahas perkembangan tata kelola TPID, khususnya pengesahan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah 2025–2027 dan penyampaian laporan TPID Triwulan I 2026. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar daerah telah memenuhi kedua aspek tersebut, tetapi masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang belum menyelesaikan pengesahan Peta Jalan TPID atau menyampaikan laporan triwulanan secara lengkap. HLM juga menekankan perlunya peningkatan kualitas neraca pangan melalui penerbitan Surat Keputusan Bupati/Wali Kota mengenai pengumpulan data stok distributor dan pedagang besar, serta pengembangan situs SIGAP SULTAN dengan penambahan informasi harga, early warning system (EWS), dan informasi pendukung lainnya sebagai dasar pelaksanaan KAD dan FDP.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam forum tersebut, dirumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi daerah sebagai berikut:

1. **Memperkuat produksi pangan strategis dari sisi hulu** melalui percepatan program mandiri benih, Luas Tambah Tanam, optimalisasi lahan, cetak sawah, serta penyediaan alat dan mesin pertanian. Upaya tersebut dilengkapi dengan perluasan Gerakan Menanam Pangan Strategis melalui pemanfaatan pekarangan dan lahan kosong
2. **Memitigasi risiko kekeringan berdasarkan prakiraan BMKG** melalui penyediaan sarana dan prasarana pengairan, seperti embung, pompa air, dan sumur bor, serta perbaikan jaringan irigasi untuk menjaga produktivitas komoditas pangan strategis.

3. **Melaksanakan *Mini Distribution Center*, pasar murah, dan GPM secara masif dengan prinsip 4T**, yaitu tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat komoditas. Pelaksanaannya difokuskan pada komoditas penyumbang inflasi dan komoditas yang mengalami peningkatan permintaan menjelang Iduladha, antara lain aneka cabai, aneka bawang, serta produk unggas dan turunannya.
4. **Memperkuat peran BUMD pangan sebagai lembaga penyangga dan pembeli hasil produksi petani**, termasuk dalam penyediaan fasilitas *cold storage* yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, kapasitas listrik, dan biaya operasional. Langkah ini penting untuk memperpanjang daya simpan produk pangan dan perikanan serta menjaga kesinambungan pasokan.
5. **Memperkuat koordinasi pengawasan harga dan stok pangan strategis** melalui pelaksanaan inspeksi pasar serta optimalisasi peran Satgas Saber Pangan untuk mencegah penimbunan, menjaga kelancaran distribusi, dan memastikan kewajaran harga menjelang HBKN Iduladha.

Gambar B2.2. Pelaksanaan HLM TPID Prov. Sulsel Jelang HBKN Iduladha Tahun 2026



Sumber: Bank Indonesia (2026)

BOKS 2

6. **Meningkatkan kualitas dan integrasi data pangan daerah** melalui penerbitan regulasi pengumpulan data stok, penguatan kepatuhan pelaporan distributor dan pedagang besar, serta pengembangan SIGAP SULTAN sebagai dasar penyusunan kebijakan KAD, FDP, dan intervensi stabilisasi harga.
7. **Memperkuat komunikasi publik dan pengelolaan ekspektasi masyarakat** melalui Iklan Layanan Masyarakat dan diseminasi informasi pada berbagai kanal mengenai perkembangan inflasi, program pengendalian harga, ketersediaan pasokan, serta imbauan belanja bijak selama periode HBKN.





Pembiayaan Daerah



Stabilitas sistem keuangan Sulawesi Selatan pada tw II 2026 secara umum terjaga di tengah pertumbuhan ekonomi yang tetap didukung oleh konsumsi rumah tangga. Penyaluran kredit perbankan Sulawesi Selatan tumbuh 5,19% (yoy). Penguatan kredit terutama ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh lebih tinggi, sementara kredit konsumsi tetap solid dan kredit modal kerja masih mengalami kontraksi yang lebih dalam. Sementara itu, pembiayaan perbankan syariah juga tetap tumbuh kuat sebesar 23,87% (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh pembiayaan konsumsi dan modal kerja, meskipun pembiayaan investasi sedikit melandai. Perkembangan ini menunjukkan fungsi pembiayaan perbankan tetap terjaga dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Di tengah pertumbuhan pembiayaan yang masih positif, kualitas kredit perbankan relatif tetap terjaga. Rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan dan NPL UMKM masih terjaga, berada di bawah ambang batas 5%. Dari sisi kinerja, profitabilitas perbankan tetap kuat meskipun sedikit termoderasi, tercermin dari ROA yang menurun dari 4,97% menjadi 4,87%. Sejalan dengan itu, rasio BOPO tercatat 40,86% yang secara level tetap menunjukkan efisiensi operasional perbankan yang baik. Di sisi lain, pembiayaan fintech tetap tumbuh positif dengan kualitas risiko yang relatif terkendali.

Di tengah terjaganya stabilitas sistem keuangan, penguatan sektor riil yang inklusif terus didorong sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah. Dalam konteks tersebut, Bank Indonesia bersama stakeholder terkait memperkuat pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif melalui Karya Kreatif Sulawesi Selatan dan South Sulawesi Digital Festival (KKS x DIGIFEST) 2026, termasuk melalui perluasan akses pasar, pembiayaan, dan digitalisasi..

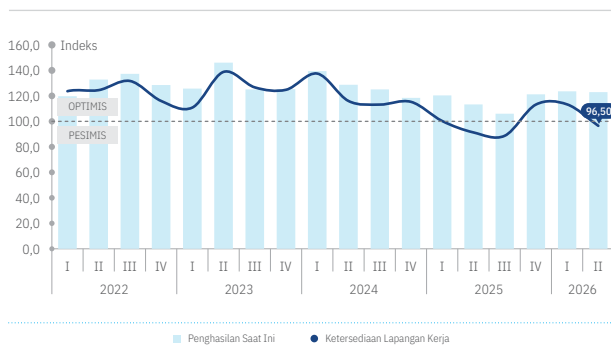
3.1. Stabilitas Keuangan Daerah

3.1.1. Asesmen Sektor Rumah Tangga¹

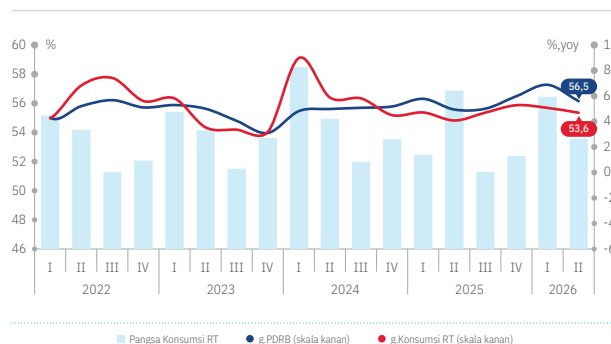
Tingkat optimisme konsumen tetap kuat, tercermin dari hasil survei konsumen di Kota Makassar pada triwulan II 2026. Indeks penghasilan saat ini tetap berada pada level optimis sebesar 123,00, relatif stabil dibandingkan 123,50 pada Triwulan I 2026. Namun demikian, persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja mengalami penurunan, tercermin dari indeks yang turun dari 113,33 menjadi 96,50, atau berada di bawah batas optimis 100. Di sisi lain, indeks konsumsi barang tahan lama meningkat dari 113,50 menjadi 118,00 (Grafik 3.1). Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa daya beli dan aktivitas konsumsi rumah tangga masih terjaga, di tengah moderasi persepsi masyarakat terhadap kondisi ketenagakerjaan.

Konsumsi rumah tangga (RT) tetap tumbuh kuat pada Triwulan II 2026, meskipun termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 3.2). Konsumsi RT dalam PDRB Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 4,69% (yoy), lebih rendah dibandingkan 5,07% (yoy) pada Triwulan I 2026. Perkembangan tersebut berlangsung sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang termoderasi dari 6,88% (yoy) menjadi 5,59% (yoy). Pangsa konsumsi RT terhadap PDRB juga menurun dari 56,45% menjadi 53,57%, namun tetap menjadi komponen utama pembentuk PDRB Sulawesi Selatan.

Grafik 3.1. Indeks Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Kerja Saat Ini



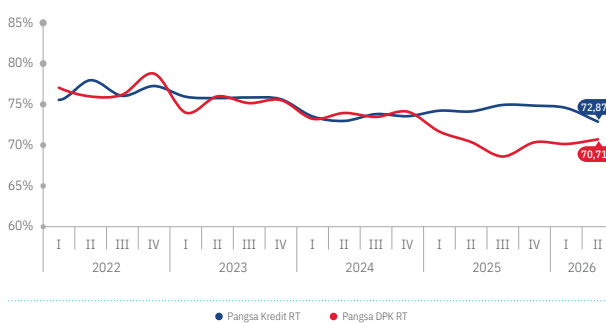
Grafik 3.2. Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga



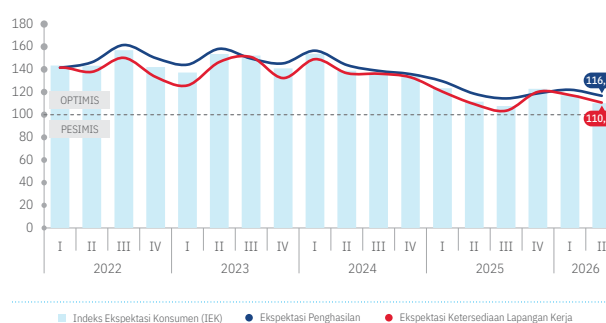
Dari sisi perbankan, pangsa DPK rumah tangga meningkat dari 70,14% menjadi 70,71%, sementara pangsa kredit rumah tangga menurun dari 74,55% menjadi 72,87% (Grafik 3.3). Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi keuangan rumah tangga secara umum masih relatif terjaga di tengah moderasi pertumbuhan konsumsi pada triwulan laporan.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga turut tercermin dari optimisme konsumen yang tetap terjaga terhadap kondisi ekonomi. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Triwulan II 2026 tercatat sebesar 111,36 dan masih berada pada level optimis (>100), meskipun lebih rendah dibandingkan 117,00 pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut sejalan dengan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tetap berada pada level optimis sebesar 110,22, meskipun menurun dibandingkan 117,22 pada Triwulan I 2026. Lebih lanjut, ekspektasi masyarakat terhadap penghasilan pada enam bulan mendatang menurun dari 122,00 menjadi 116,67. Sementara itu, ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja tercatat sebesar 110,67, lebih rendah dibandingkan 117,33 pada triwulan sebelumnya (Grafik 3.4). Meski mengalami moderasi, level ekspektasi yang tetap berada pada zona optimis menunjukkan bahwa keyakinan konsumen terhadap prospek ekonomi Sulawesi Selatan masih terjaga pada triwulan laporan.

Grafik 3.3. Pangsa Kredit dan DPK RT terhadap Total Kredit dan DPK Sulawesi Selatan



Grafik 3.4. Indeks Ekspektasi Penghasilan dan Ketersediaan Lapangan Kerja



1. Di dalam sistem keuangan, Rumah Tangga memiliki dua fungsi yaitu sebagai penyedia dana dan penerima dana dari institusi keuangan. Kondisi keuangan Rumah Tangga berfluktuatif sepanjang waktu dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya adalah tingkat pengangguran, tingkat konsumsi, dan kondisi pembiayaan/kredit yang dilakukan oleh Rumah Tangga.

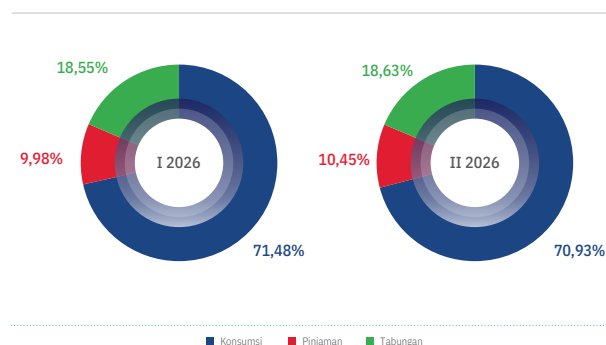
Tabel 3.1 Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran Per Bulan	TW I 2026 (%)			TW II 2026 (%)		
	Konsumsi	Pinjaman	Tabungan	Konsumsi	Pinjaman	Tabungan
Rp1-2jt	82,30	5,95	11,76	81,25	5,00	13,75
Rp2-3jt	72,94	10,88	16,18	73,38	6,75	19,88
Rp3-4jt	72,21	7,94	19,85	65,18	14,64	20,18
Rp4-5jt	65,00	14,24	20,76	65,71	14,40	19,88
Rp5-6jt	63,08	14,62	22,31	72,41	7,96	19,63
Rp6-7jt	70,63	6,25	23,13	66,39	13,33	20,28
Rp7-8jt	63,93	11,79	24,29	58,57	22,86	18,57
>Rp8jt	84,17	3,33	12,50	90,00	5,00	5,00

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan komposisi pengeluaran, dinamika konsumsi rumah tangga pada Triwulan II 2026 menunjukkan pergeseran pola konsumsi antar kelompok pengeluaran. Peningkatan konsumsi terutama terjadi pada kelompok >Rp8 juta yang meningkat dari 84,17% menjadi 90,00% serta kelompok Rp5–6 juta dari 63,08% menjadi 72,41%. Kenaikan juga tercatat pada kelompok Rp2–3 juta dan Rp4–5 juta. Sementara itu, konsumsi kelompok Rp1–2 juta, Rp3–4 juta, Rp6–7 juta, dan Rp7–8 juta mengalami moderasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi pembiayaan, porsi pinjaman meningkat terutama pada kelompok Rp7–8 juta, Rp3–4 juta, dan Rp6–7 juta, sementara pada beberapa kelompok lainnya mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya (Tabel 3.1).

Struktur pengeluaran rumah tangga tetap menunjukkan kondisi yang relatif terjaga pada Triwulan II 2026. Secara agregat, 71,86% menjadi 69,24% atau sebesar 2,62 ptp. Sementara itu, porsi pinjaman relatif stabil dari 10,37% menjadi 10,21%, di tengah peningkatan porsi tabungan dari 17,78% menjadi 20,55% atau sebesar 2,77 ptp (Grafik 3.5). Perkembangan tersebut mengindikasikan konsumsi rumah tangga tetap kuat pada triwulan laporan, disertai peningkatan alokasi pendapatan untuk tabungan.

Grafik 3.5. Porsi Pengeluaran RT Sulawesi Selatan

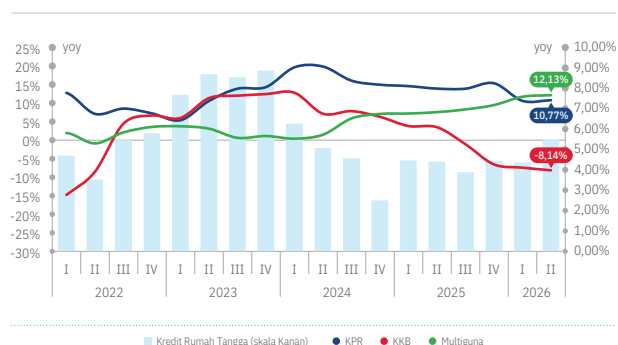
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Eksposur Perbankan Pada Sektor Rumah Tangga

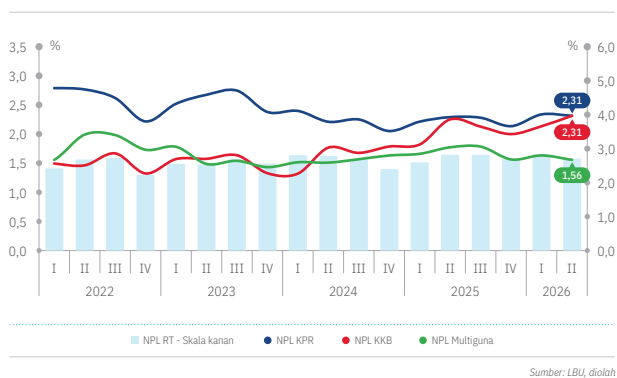
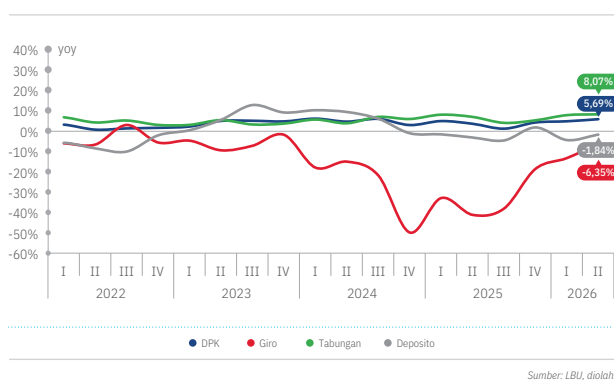
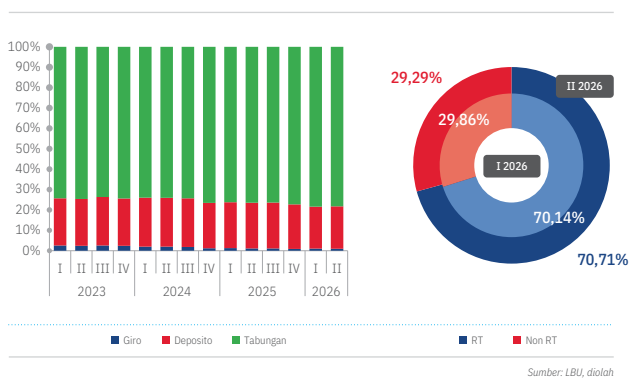
Penyaluran kredit rumah tangga (RT) di Sulawesi Selatan menguat pada Triwulan II 2026 dengan risiko NPL² yang tetap terkendali pada triwulan laporan. Kredit RT tumbuh sebesar 5,51% (yoy), meningkat dibandingkan 4,36% (yoy) pada Triwulan I 2026. Pertumbuhan tersebut masih ditopang oleh kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit multiguna yang masing-masing tumbuh sebesar 10,77% (yoy) dan 12,13% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10,60% (yoy) dan 11,70% (yoy). Di sisi lain, kredit kendaraan bermotor (KKB) masih mengalami kontraksi sebesar 8,14% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi 7,42% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, kredit lainnya tumbuh sebesar 1,69% (yoy), meningkat dari kontraksi 0,15% (yoy) pada Triwulan I 2026 (Grafik 3.6).

Risiko kredit rumah tangga secara umum tetap terkendali dan menunjukkan perbaikan pada triwulan laporan. Rasio kredit bermasalah (NPL) rumah tangga tercatat sebesar 2,71%, menurun dibandingkan 2,83% pada triwulan sebelumnya. Berdasarkan jenisnya, NPL kredit pemilikan rumah (KPR) menurun dari 2,34% menjadi 2,31%, sementara NPL kredit multiguna turun dari 1,63% menjadi 1,56%. Di sisi lain, NPL kredit kendaraan bermotor (KKB) meningkat dari 2,13% menjadi 2,31%. Meski demikian, tingkat risiko kredit rumah tangga masih berada di bawah ambang batas 5% sehingga ketahanan sektor rumah tangga secara umum tetap terjaga (Grafik 3.7).

Penghimpunan dana rumah tangga di perbankan pada Triwulan II 2026 tumbuh lebih kuat dibandingkan triwulan sebelumnya. Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga tercatat tumbuh 5,69% (yoy), meningkat dibandingkan 4,66% (yoy) pada Triwulan I 2026. Penguatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan tabungan yang meningkat dari 7,68% (yoy) menjadi 8,07% (yoy). Di sisi lain, deposito rumah tangga masih mengalami kontraksi sebesar 1,84% (yoy), meskipun membaik dibandingkan kontraksi 4,54% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Grafik 3.6. Pertumbuhan Kredit Sektor Rumah Tangga

Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.7. Non-performing Loan (NPL) Kredit Sektor Rumah Tangga**Grafik 3.8. Komposisi Pertumbuhan DPK Sektor Rumah Tangga****Grafik 3.9. Pangsa DPK Sektor Rumah Tangga**

Sementara itu, giro rumah tangga masih mengalami kontraksi sebesar 6,35% (yoy), namun membaik dibandingkan kontraksi 13,38% (yoy) pada Triwulan I 2026 (Grafik 3.8).

Berdasarkan porsinya, sektor RT masih terus mendominasi pangsa DPK perbankan hingga 70,71% pada Triwulan II 2026, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 70,14%. Dari seluruh DPK RT, tabungan masih memiliki porsi tertinggi sebesar 78,19% dari total DPK rumah tangga di Sulawesi Selatan. Sementara itu, deposito dan giro masing-masing memiliki pangsa sebesar 20,81% dan 1,00%. Struktur DPK rumah tangga pada triwulan laporan relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 3.9).

3.1.2. Asesmen Sektor Korporasi

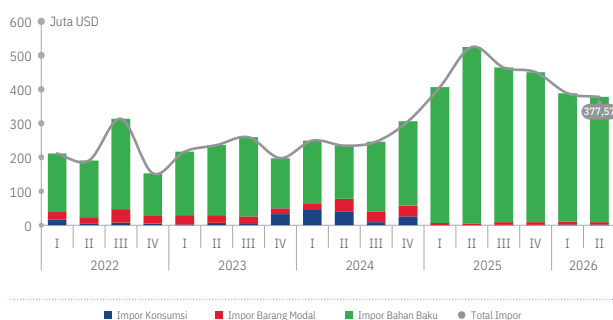
Ketidakpastian global masih menjadi sumber tekanan terhadap kinerja korporasi, meskipun aktivitas manufaktur negara mitra dagang utama menunjukkan perbaikan. Perbaikan aktivitas manufaktur di Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok mengindikasikan penguatan aktivitas ekonomi negara mitra dagang utama yang berpotensi mendukung permintaan eksternal Sulawesi Selatan. Namun demikian, ketidakpastian global, tensi geopolitik, serta risiko gangguan rantai pasok dan volatilitas harga komoditas tetap perlu dicermati karena berpotensi memengaruhi ketahanan sektor korporasi. Di tengah kondisi tersebut, penyaluran kredit korporasi di Sulawesi Selatan justru menunjukkan akselerasi yang kuat, disertai perbaikan kualitas kredit meskipun rasio NPL korporasi masih berada pada level yang relatif tinggi.

Sumber Kerentanan Sektor Korporasi

Secara volume, impor Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 mengalami kontraksi yang lebih dalam sebesar 27,98% (yoy), dibandingkan kontraksi 4,51% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Pendalaman kontraksi terutama dipengaruhi oleh impor bahan baku yang terkontraksi sebesar 29,12% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi 5,57% (yoy) pada triwulan I 2026. Di sisi lain, impor barang konsumsi dan barang modal tetap tumbuh tinggi dan masing-masing mengalami akselerasi menjadi 261,71% (yoy) dan 75,62% (yoy), dari sebelumnya 220,87% (yoy) dan 42,26% (yoy) (Grafik 3.10). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penurunan impor secara agregat terutama bersumber dari melemahnya impor bahan baku, sementara impor barang modal yang meningkat mengindikasikan masih berlangsungnya aktivitas investasi dan penguatan kapasitas usaha. Namun demikian, kontraksi impor bahan baku yang semakin dalam perlu dicermati karena dapat mengindikasikan tertahannya kebutuhan *input* produksi, khususnya pada industri yang masih bergantung pada bahan baku impor.

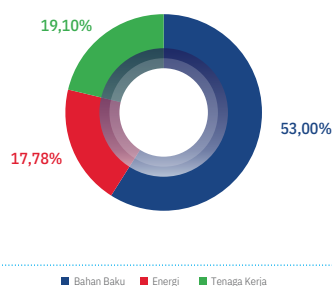
Berdasarkan hasil liaison triwulan II 2026, biaya bahan baku masih menjadi komponen biaya terbesar bagi pelaku usaha. Pangsa biaya bahan baku tercatat sebesar 53,00% dari total biaya, meningkat dibandingkan 51,57% pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, pangsa biaya energi dan tenaga kerja tercatat masing-masing sebesar 17,78% dan 19,10%, lebih rendah dibandingkan 22,71% dan 21,29% pada triwulan I 2026 (Grafik 3.11). Peningkatan pangsa biaya bahan baku menunjukkan bahwa struktur biaya usaha semakin terkonsentrasi pada kebutuhan input produksi. Kondisi tersebut meningkatkan sensitivitas dunia usaha terhadap perubahan harga bahan baku dan gangguan rantai pasok, terutama di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Grafik 3.10. Komposisi Impor Sulawesi Selatan



Sumber: Bea Cukai, diolah

Grafik 3.11. Liaison Komposisi Biaya Korporasi

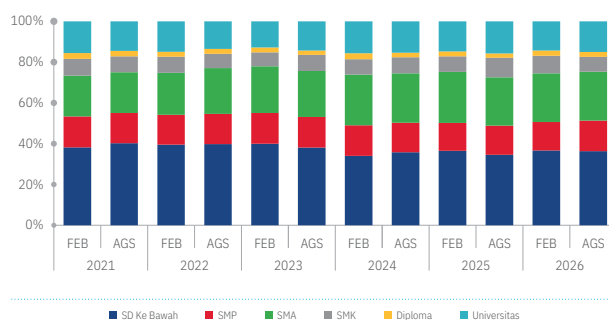


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi tenaga kerja Sulawesi Selatan masih didominasi oleh lulusan SD ke bawah, meskipun pangsaanya sedikit menurun (Grafik 3.12). Pangsa tenaga kerja lulusan SD ke bawah menurun dari 36,68% pada Februari 2021 menjadi 36,37% pada Mei 2026. Sebaliknya, pangsa lulusan SMP meningkat dari 13,92% menjadi 14,94%, lulusan SMA meningkat tipis dari 23,87% menjadi 23,99%, dan lulusan universitas meningkat dari 14,27% menjadi 15,05%. Sementara itu, pangsa lulusan SMK dan diploma masing-masing menurun dari 8,61% menjadi 7,31% dan dari 2,65% menjadi 2,35%. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perbaikan terbatas pada struktur pendidikan tenaga kerja, tercermin dari meningkatnya pangsa lulusan universitas, meskipun tenaga kerja berpendidikan dasar masih mendominasi.

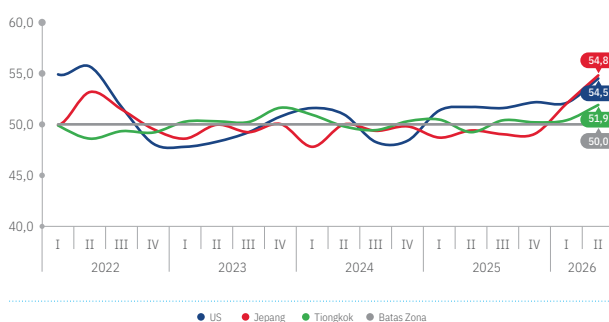
Aktivitas manufaktur negara mitra dagang utama menunjukkan penguatan pada triwulan II 2026. PMI Amerika Serikat meningkat menjadi 54,50 dari 52,10 pada triwulan sebelumnya. PMI Jepang juga meningkat cukup kuat dari 52,03 menjadi 54,80, sementara PMI Tiongkok naik dari 50,40 menjadi 51,90. Dengan seluruh indikator tetap berada di atas level 50, perkembangan tersebut menunjukkan berlanjutnya ekspansi manufaktur negara mitra dagang utama dan memberikan sinyal positif terhadap prospek permintaan eksternal Sulawesi Selatan. Meski demikian, risiko geopolitik

Grafik 3.12. Persentase Penduduk Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.13. PMI Negara Mitra Dagang



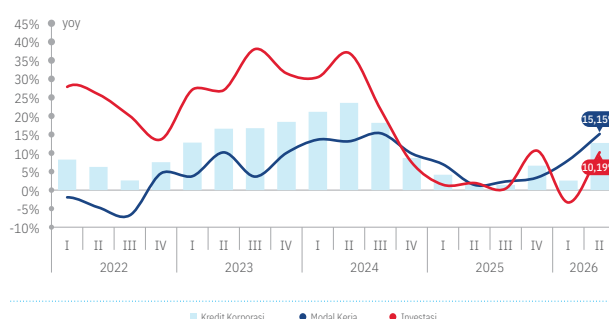
Sumber: Bloomberg, diolah

dan ketidakpastian perdagangan global tetap perlu dicermati karena berpotensi memengaruhi rantai pasok dan volatilitas harga komoditas (Grafik 3.13).

Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi

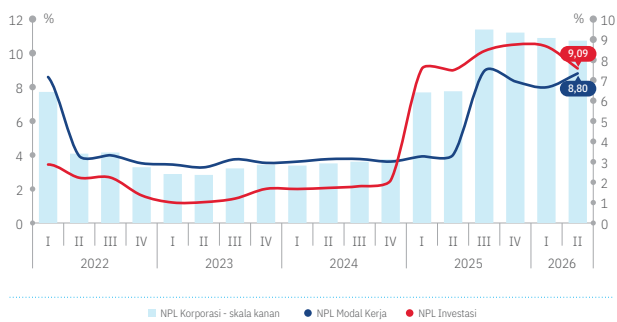
Penyaluran kredit korporasi pada triwulan II 2026 mengalami akselerasi signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit korporasi tumbuh sebesar 12,72% (yoy), meningkat dibandingkan 2,57% (yoy) pada triwulan I 2026 (Grafik 3.14). Penguatan tersebut terjadi baik pada kredit modal kerja maupun kredit investasi. Kredit modal kerja tumbuh 15,15% (yoy), meningkat dari 8,06% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, kredit investasi berbalik tumbuh tinggi sebesar

Grafik 3.14. Perkembangan Kredit Korporasi



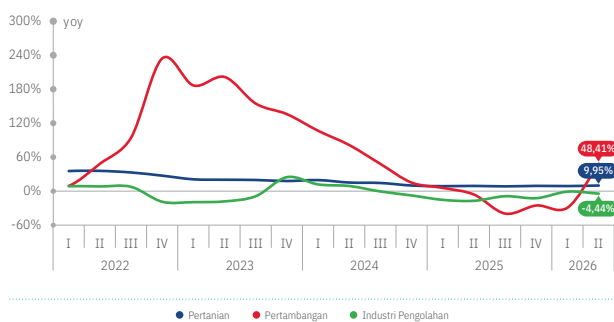
Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.15. NPL Kredit Korporasi



Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.16. Perkembangan Kredit Berdasarkan Sektor Tradable



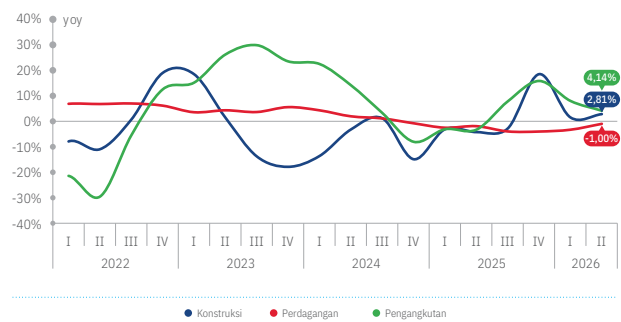
Sumber: LBU, diolah

10,19% (yoy), setelah pada triwulan I 2026 berkontraksi 3,34% (yoy). Perkembangan ini mengindikasikan peningkatan kebutuhan pembiayaan korporasi tidak hanya untuk mendukung aktivitas operasional, tetapi juga mulai mengarah pada ekspansi dan investasi usaha.

Dari sisi kualitas kredit, rasio NPL korporasi membaik menjadi 8,94% dari 9,07% pada triwulan sebelumnya, meskipun masih berada pada level yang relatif tinggi (Grafik 3.15). Perbaikan terutama terjadi pada NPL kredit investasi yang menurun dari 10,39% menjadi 9,09%. Di sisi lain, NPL kredit modal kerja meningkat dari 7,99% menjadi 8,80%. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran kredit korporasi masih diikuti oleh kualitas kredit agregat yang membaik, namun peningkatan NPL modal kerja tetap perlu dicermati. Secara keseluruhan, akselerasi kredit korporasi serta kembali positifnya pertumbuhan kredit investasi memberikan indikasi membaiknya aktivitas pembiayaan sektor usaha pada triwulan II 2026, meskipun risiko kredit korporasi masih perlu terus dimonitor.

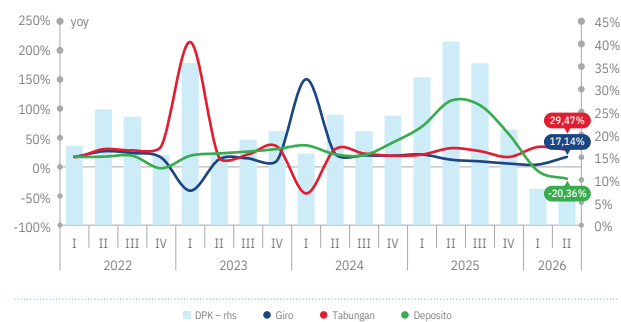
Kinerja kredit sektoral pada triwulan II 2026 menunjukkan perkembangan yang beragam antar lapangan usaha. Pada sektor *tradable*, kredit pertanian tumbuh sebesar 9,95% (yoy), meningkat dibandingkan 9,00% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perbaikan signifikan terjadi pada kredit pertambangan yang berbalik tumbuh tinggi sebesar 48,41% (yoy), setelah pada triwulan I 2026 berkontraksi sebesar

Grafik 3.17. Perkembangan Kredit Berdasarkan Sektor Non-Tradable



Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.18. Pertumbuhan DPK Korporasi Sulawesi Selatan



Sumber: LBU, diolah

29,02% (yoy). Di sisi lain, kredit industri pengolahan mengalami kontraksi yang lebih dalam menjadi 4,44% (yoy), dibandingkan kontraksi 0,78% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut menunjukkan penguatan pembiayaan pada sektor pertanian dan terutama pertambangan, sementara penyaluran kredit kepada sektor industri pengolahan masih tertahan.

Pada sektor *non-tradable*, kredit konstruksi tumbuh lebih tinggi sebesar 2,81% (yoy), dibandingkan 1,52% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kredit perdagangan masih mengalami kontraksi sebesar 1,00% (yoy), namun membaik dibandingkan kontraksi 3,30% (yoy) pada triwulan I 2026. Sementara itu, pertumbuhan kredit sektor pengangkutan melambat dari 8,00% (yoy) menjadi 4,14% (yoy) (Grafik 3.16 dan 3.17). Secara umum, perkembangan tersebut menunjukkan perbaikan penyaluran kredit pada sebagian besar sektor utama, terutama pertambangan, pertanian, konstruksi, dan perdagangan. Namun demikian, kontraksi kredit industri pengolahan yang semakin dalam serta perlambatan kredit pengangkutan perlu tetap dicermati.

Di sisi lain, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) korporasi pada triwulan II 2026 sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. DPK korporasi tercatat tumbuh sebesar 7,38% (yoy), lebih rendah dibandingkan 8,04% (yoy) pada triwulan I 2026. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi

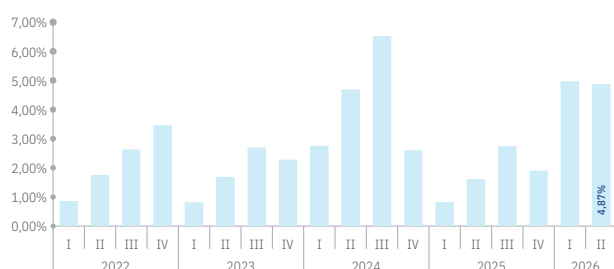
oleh deposito yang mengalami kontraksi lebih dalam, dari -7,08% (yoy) menjadi -20,36% (yoy). Pertumbuhan tabungan juga melambat dari 34,19% (yoy) menjadi 29,47% (yoy), meskipun tetap tumbuh tinggi. Sebaliknya, pertumbuhan giro korporasi meningkat signifikan dari 4,04% (yoy) menjadi 17,14% (yoy) (Grafik 3.18). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perlambatan DPK korporasi terutama bersumber dari penurunan penempatan dana pada instrumen deposito, sementara dana yang lebih likuid dalam bentuk giro masih menunjukkan penguatan. Dari sisi struktur, giro tetap menjadi komponen terbesar DPK korporasi dengan pangsa yang meningkat dari 43,51% pada triwulan I 2026 menjadi 44,03% pada triwulan II 2026. Pangsa tabungan juga meningkat tipis dari 30,40% menjadi 30,50%, sementara pangsa deposito menurun dari 26,09% menjadi 25,47%. Pergeseran tersebut sejalan dengan penguatan pertumbuhan giro dan kontraksi deposito yang semakin dalam pada triwulan laporan.

3.1.3. Asesmen Sektor Institusi Keuangan Perbankan³ Kondisi Umum

Profitabilitas perbankan Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tetap kuat, meskipun mengalami moderasi dibandingkan triwulan sebelumnya. *Return on Asset (ROA)* tercatat sebesar 4,87%, melandai dibandingkan 4,97% pada triwulan I 2026. Sejalan dengan itu, *Return on Equity (ROE)* menurun dari 173% menjadi 153%. Dari sisi neraca, pertumbuhan aset perbankan meningkat dari 3,89% (yoy) menjadi 4,66% (yoy), sementara pertumbuhan kewajiban juga terakselerasi dari 8,92% (yoy) menjadi 11,01% (yoy). Di sisi lain, ekuitas masih mengalami kontraksi yang lebih dalam, dari -59,51% (yoy) menjadi -61,82% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kinerja perbankan Sulawesi Selatan tetap solid, ditopang oleh pertumbuhan laba yang masih tinggi dan peningkatan aset, meskipun rasio profitabilitas mengalami sedikit moderasi dan tekanan terhadap ekuitas masih berlanjut.

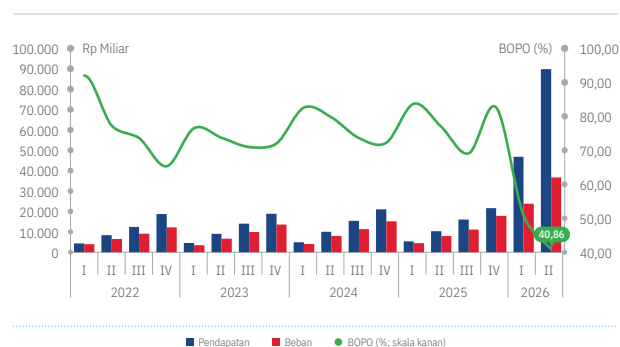
Efisiensi operasional perbankan juga menunjukkan perbaikan pada triwulan II 2026. Rasio Beban Operasional terhadap

Grafik 3.19. Rasio ROA Perbankan di Sulawesi Selatan



Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.20. Rasio BOPO Perbankan di Sulawesi Selatan



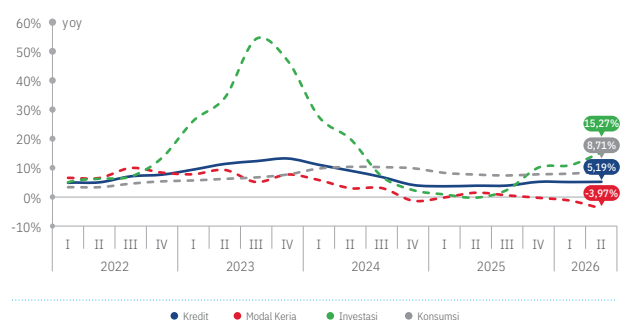
Sumber: LBU, diolah

Pendapatan Operasional (BOPO) menurun dari 50,79% menjadi 40,86% (Grafik 3.20). Penurunan rasio tersebut mencerminkan peningkatan pendapatan operasional yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan beban operasional. Pendapatan operasional meningkat dari Rp46,84 triliun menjadi Rp89,78 triliun, sementara beban operasional meningkat dari Rp23,79 triliun menjadi Rp36,69 triliun. Perkembangan tersebut mengindikasikan semakin efisiennya aktivitas operasional perbankan, sehingga turut menopang ketahanan kinerja perbankan Sulawesi Selatan pada triwulan laporan.

Kinerja Intermediasi Perbankan

Kinerja penyaluran kredit perbankan Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tetap kuat dan tumbuh sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kredit perbankan tercatat tumbuh sebesar 5,19% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan 5,11% (yoy) pada triwulan I 2026. Peningkatan terutama ditopang oleh kredit investasi yang terakselerasi dari 10,88% (yoy) menjadi 15,27% (yoy), serta kredit konsumsi yang meningkat dari 7,98% (yoy) menjadi 8,71% (yoy). Di sisi lain, kredit modal kerja mengalami kontraksi yang lebih dalam, dari -1,27% (yoy) menjadi -3,97% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit masih kuat, terutama didukung oleh pembiayaan investasi dan konsumsi, sementara pembiayaan untuk kebutuhan operasional usaha masih tertahan.

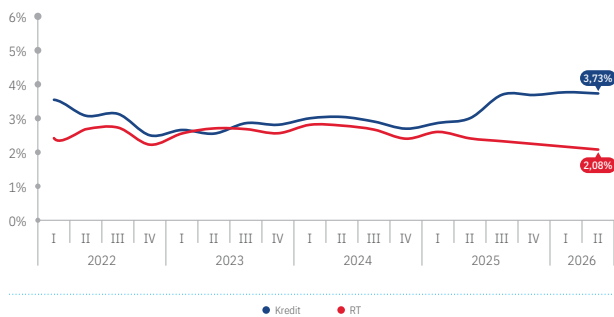
Grafik 3.21. Pertumbuhan Kredit Perbankan Sulawesi Selatan



Sumber: LBU, diolah

3. Data perbankan berdasarkan lokasi bank

Grafik 3.22. NPL Perbankan di Sulawesi Selatan



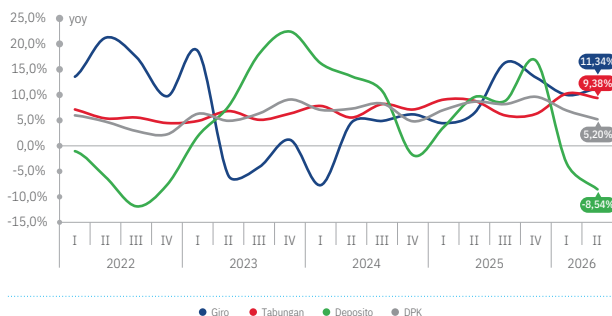
Sumber: LBU, diolah

Dari sisi jenis penggunaan, kredit konsumsi tetap menjadi pendorong utama penyaluran kredit perbankan di Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026. Pangsa kredit konsumsi tercatat sebesar 46,91% dari total kredit, meningkat dibandingkan 46,49% pada triwulan I 2026. Pangsa kredit investasi juga meningkat dari 19,02% menjadi 19,39%. Sementara itu, pangsa kredit modal kerja menurun dari 34,49% menjadi 33,70%. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa struktur penyaluran kredit semakin ditopang oleh pembiayaan konsumsi dan investasi, sementara kontribusi kredit modal kerja mengalami penurunan sejalan dengan kontraksi pertumbuhannya yang semakin dalam pada triwulan laporan.

Kualitas kredit perbankan Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tetap terjaga. NPL perbankan mengalami perbaikan dari 3,77% pada triwulan I 2026 menjadi 3,73% pada triwulan laporan dan tetap berada di bawah ambang batas 5%. Sejalan dengan itu, NPL rumah tangga juga membaik dari 2,16% menjadi 2,08%. Perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa risiko kredit perbankan secara agregat masih relatif terkendali di tengah penyaluran kredit yang tetap kuat pada triwulan laporan (Grafik 3.22).

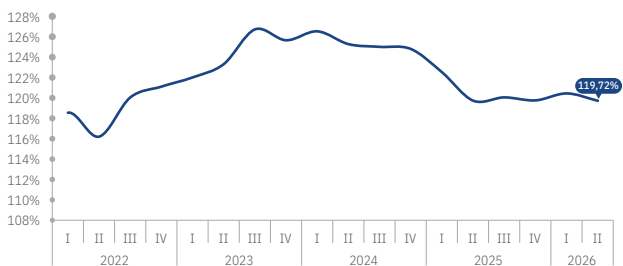
Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan yang berkantor di Sulawesi Selatan tumbuh melambat pada triwulan II 2026. DPK tercatat tumbuh 5,20% (yoy), lebih rendah dibandingkan 6,93% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

Grafik 3.23. Pertumbuhan DPK Perbankan Sulawesi Selatan



Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.24. Pertumbuhan LDR Perbankan Sulawesi Selatan



Sumber: LBU, diolah

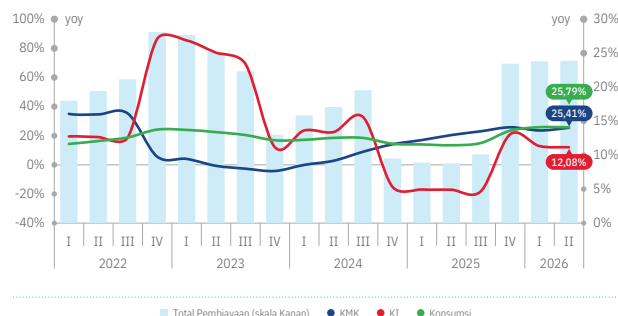
Perlambatan terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan tabungan yang melandai dari 10,26% (yoy) menjadi 9,38% (yoy), serta deposito yang mengalami kontraksi lebih dalam dari -3,47% (yoy) menjadi -8,54% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan giro meningkat dari 9,99% (yoy) menjadi 11,34% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penghimpunan dana masih tumbuh positif, meskipun termoderasi, dengan peningkatan terutama terjadi pada instrumen giro yang relatif lebih likuid untuk mendukung kebutuhan transaksi.

Rasio LDR perbankan tetap berada pada level tinggi meskipun sedikit menurun pada triwulan II 2026. Loan to Deposit Ratio (LDR) bank umum di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 119,72%, menurun dari 120,44% pada triwulan I 2026 (Grafik 3.24). Penurunan LDR terjadi di tengah pertumbuhan kredit yang relatif lebih lambat dibandingkan pertumbuhan DPK. Level LDR yang masih tinggi menunjukkan kuatnya fungsi penyaluran kredit perbankan dibandingkan penghimpunan dana lokal, sehingga perkembangan likuiditas perbankan tetap perlu dicermati untuk menjaga kesinambungan fungsi intermediasi.

Kinerja Intermediasi Perbankan Syariah

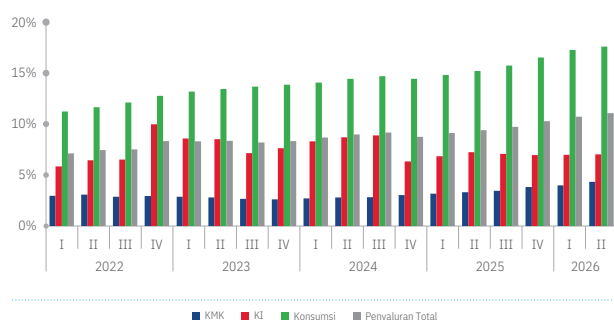
Kinerja pembiayaan perbankan syariah tetap kuat pada Triwulan II 2026. Pembiayaan syariah di Sulawesi Selatan tercatat tumbuh 23,87% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan 23,81% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama didukung oleh pembiayaan modal kerja yang

Grafik 3.25. Penyaluran Pembiayaan Syariah



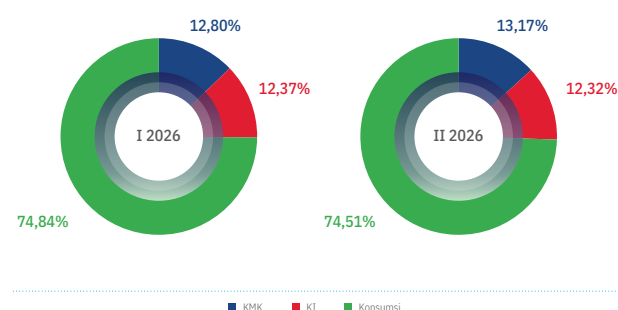
Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.26. Pangsa Pembiayaan Syariah Terhadap Total



Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.27. Penyaluran Kredit Perbankan Pangsa Pembiayaan Syariah



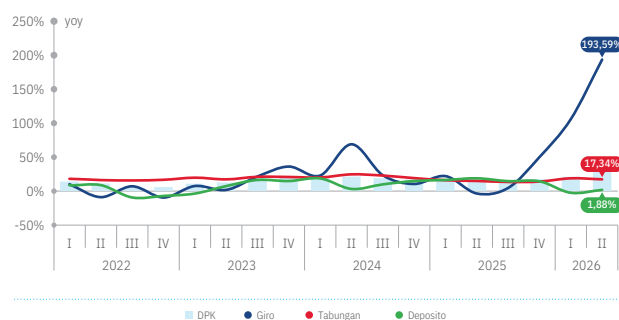
Sumber: LBU, diolah

tumbuh lebih tinggi dari 23,61% (yoy) menjadi 25,41% (yoy). Pembiayaan konsumsi juga tetap tumbuh tinggi sebesar 25,79% (yoy), meskipun sedikit melandai dari 25,86% (yoy) pada Triwulan I 2026. Sementara itu, pertumbuhan pembiayaan investasi melambat dari 12,88% (yoy) menjadi 12,08% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tetap ekspansif, terutama ditopang oleh kebutuhan modal kerja dan konsumsi, di tengah moderasi pembiayaan investasi (Grafik 3.25).

Pangsa pembiayaan syariah terhadap total kredit perbankan meningkat pada Triwulan II 2026. Secara keseluruhan, pangsa pembiayaan syariah meningkat dari 9,74% menjadi 10,28%. Peningkatan terutama terjadi pada pembiayaan modal kerja, dengan pangsa terhadap kredit modal kerja perbankan meningkat dari 10,47% menjadi 13,92%. Pangsa pembiayaan investasi juga meningkat tipis dari 9,34% menjadi 9,41%, sedangkan pangsa pembiayaan konsumsi sedikit menurun dari 10,40% menjadi 10,27% (Grafik 3.26). Secara komposisi, pembiayaan konsumsi masih menjadi kontributor terbesar dalam penyaluran pembiayaan syariah, diikuti modal kerja dan investasi.

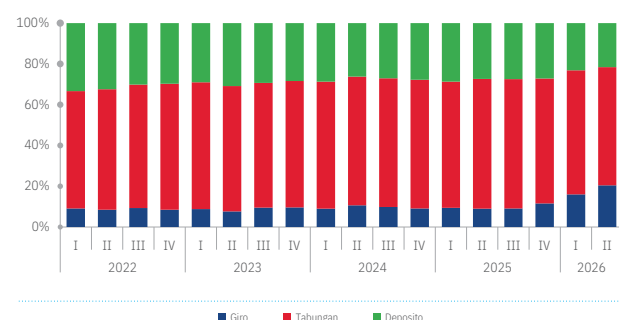
Sementara itu, ditinjau dari komposisinya, pembiayaan konsumsi masih menjadi kontributor terbesar dalam penyaluran pembiayaan syariah, diikuti modal kerja dan investasi. Pada

Grafik 3.28. Penghimpun DPK Syariah



Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.29. Pangsa DPK Syariah

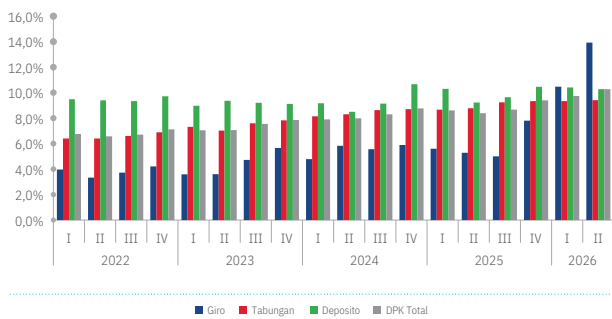


Sumber: LBU, diolah

Triwulan II 2026, porsi pembiayaan modal kerja terhadap total pembiayaan syariah meningkat, sementara investasi dan konsumsi mengalami sedikit penurunan (Grafik 3.27).

Sejalan dengan pembiayaan yang tetap kuat, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah mengalami akselerasi pada Triwulan II 2026. DPK syariah tumbuh 28,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan 20,96% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 3.28).

Akselerasi terutama ditopang oleh giro yang tumbuh signifikan sebesar 193,59% (yoy), meningkat dari 105,89% (yoy). Deposito juga berbalik tumbuh positif sebesar 1,88% (yoy) setelah pada triwulan sebelumnya mengalami kontraksi 2,45% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan tabungan tetap tinggi meskipun melambat dari 18,86% (yoy) menjadi 17,34% (yoy). Perkembangan tersebut menunjukkan penghimpunan dana perbankan syariah yang semakin kuat, terutama ditopang oleh peningkatan dana pada instrumen giro. Dari sisi struktur, DPK perbankan syariah masih didominasi oleh tabungan, meskipun pangsaanya menurun pada Triwulan II 2026. Pangsa tabungan menurun dari 60,82% menjadi 57,92%, sementara pangsa deposito turut menurun dari 23,13% menjadi 21,62%. Sebaliknya, pangsa giro meningkat cukup signifikan dari 16,05% menjadi 20,45%, sejalan dengan tingginya pertumbuhan giro

Grafik 3.30. Pangsa DPK Syariah Terhadap Total Penyaluran DPK Perbankan

Sumber: LBU, diolah

pada triwulan laporan. Pergeseran tersebut mengindikasikan meningkatnya proporsi dana yang lebih likuid dan berorientasi transaksi dalam struktur DPK perbankan syariah.

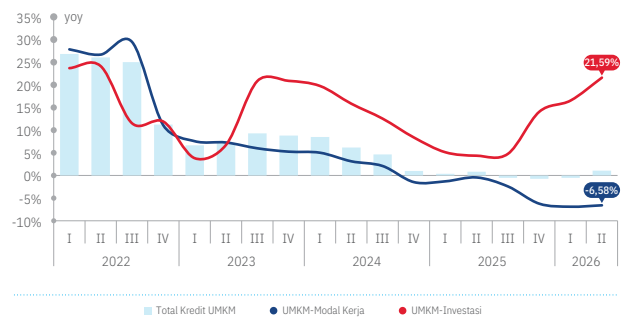
Pada triwulan laporan, pangsa tabungan syariah relatif stabil, sementara pangsa giro meningkat cukup besar dan pangsa deposito sedikit menurun (Grafik 3.30). Perkembangan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran preferensi masyarakat ke arah instrumen simpanan yang lebih likuid dan mendukung kebutuhan transaksi pada perbankan syariah.

3.2. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kinerja Intermediasi Perbankan kepada UMKM

Penyaluran kredit UMKM berbalik tumbuh positif pada Triwulan II 2026. Kredit UMKM tercatat tumbuh 1,06% (yoy), membaik dibandingkan kontraksi 0,52% (yoy) pada Triwulan I 2026. Perbaikan terutama ditopang oleh kredit investasi yang tetap tumbuh tinggi sebesar 21,59% (yoy), meningkat dari 16,54% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, kredit modal kerja masih mengalami kontraksi sebesar 6,58% (yoy), meskipun membaik dibandingkan kontraksi 6,89% (yoy) pada Triwulan I 2026. Perkembangan tersebut menunjukkan mulai membaiknya penyaluran kredit UMKM, terutama untuk mendukung kebutuhan investasi, sementara pembiayaan untuk kebutuhan operasional usaha masih relatif tertahan (Grafik 3.31).

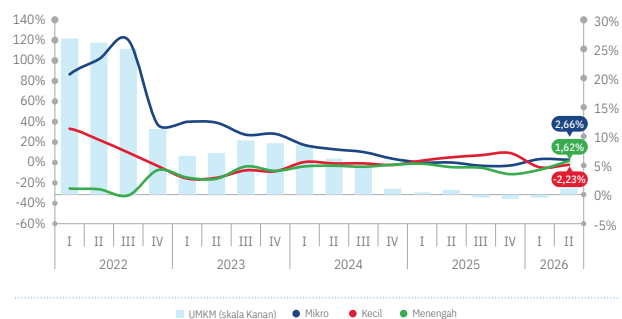
Ditinjau dari segmennya, perbaikan kredit UMKM terutama didorong oleh segmen menengah. Kredit UMKM segmen menengah berbalik tumbuh positif sebesar 1,62% (yoy) setelah pada Triwulan I 2026 mengalami kontraksi 7,13% (yoy). Kredit kecil juga menunjukkan perbaikan, dengan kontraksi menyempit dari 4,61% (yoy) menjadi 2,23% (yoy). Di sisi lain, pertumbuhan kredit mikro melambat dari 3,31% (yoy) menjadi 2,66% (yoy). Secara umum, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan kredit UMKM semakin meluas, terutama pada segmen menengah, meskipun tekanan masih berlangsung pada segmen kecil.

Grafik 3.31. Pertumbuhan Kredit UMKM

Sumber: LBU, diolah

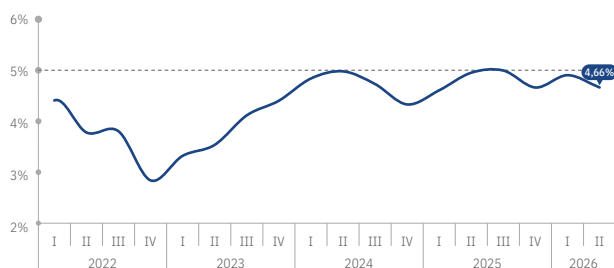
Kualitas kredit UMKM menunjukkan perbaikan pada Triwulan II 2026. Rasio kredit bermasalah (NPL) UMKM menurun dari 4,90% pada Triwulan I 2026 menjadi 4,66%, dan tetap berada di bawah ambang batas 5% (Grafik 3.33). Penurunan NPL di tengah membaiknya pertumbuhan kredit mengindikasikan bahwa pemulihan penyaluran kredit UMKM berlangsung dengan kualitas yang relatif terjaga.

Secara sektoral, penyaluran kredit perbankan di Sulawesi Selatan masih terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan pertanian pada Triwulan II 2026. Pangsa kredit sektor perdagangan tercatat paling besar sebesar 28,47%, meskipun sedikit menurun dibandingkan 28,65% pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, pangsa kredit sektor pertanian meningkat dari 16,87% menjadi 17,37%, sekaligus menjadi sektor dengan pangsa terbesar kedua. Peningkatan pangsa juga terjadi pada sektor jasa dunia usaha dari 2,33% menjadi 2,89%, jasa sosial masyarakat dari 4,54% menjadi 4,73%, serta pertambangan dari 0,29% menjadi 0,39%. Di sisi lain, pangsa kredit industri pengolahan menurun terbatas dari 3,23% menjadi 3,16%, pengangkutan dari 1,55% menjadi 1,47%, serta listrik, gas, dan air dari 0,10% menjadi 0,08%, sementara konstruksi tetap sebesar 2,37%. Perkembangan tersebut menunjukkan struktur penyaluran kredit sektoral yang relatif stabil, dengan peningkatan eksposur terutama pada sektor pertanian dan jasa dunia usaha pada triwulan laporan.

Grafik 3.32. Pertumbuhan Sub Kredit UMKM

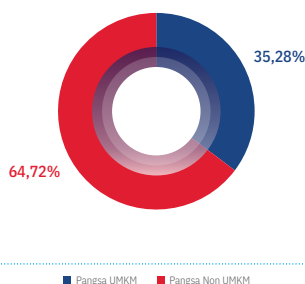
Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.33. Rasio NPL Kredit UMKM



Sumber: LBU, diolah

Grafik 3.34. Pangsa Kredit UMKM Terhadap Total Kredit



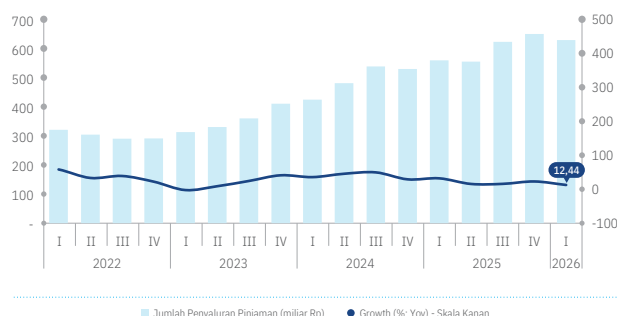
Sumber: LBU, diolah

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa mendorong pengembangan akses keuangan khususnya kepada UMKM. Pada triwulan laporan, pangsa kredit UMKM tercatat sebesar 35,28% (Grafik 3.34). Berbagai program berupa pelatihan, pembinaan, dan pendampingan serta business matching dilakukan melalui program *UMKM Resilient, World Class, Agile, Knowledgeable* (REWAKO). Program pengembangan akses keuangan UMKM juga dilakukan melalui pengenalan penggunaan SiAPIK (Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan) kepada pelaku UMKM dan klaster binaan serta fasilitasi akses keuangan kepada perbankan. Selain itu, dalam upaya mendorong digitalisasi pada pelaku UMKM, juga diakselerasi implementasi pembayaran QRIS dalam transaksi pelaku UMKM melalui berbagai kegiatan yang Bank Indonesia lakukan maupun kegiatan yang diadakan oleh instansi lain. Sinergi dengan berbagai *stakeholder* termasuk OJK dan pemerintah daerah dilakukan dalam mendukung berkembangnya para pelaku UMKM yang *go digital* dan *go global*.

Perkembangan Pembiayaan oleh Fintech

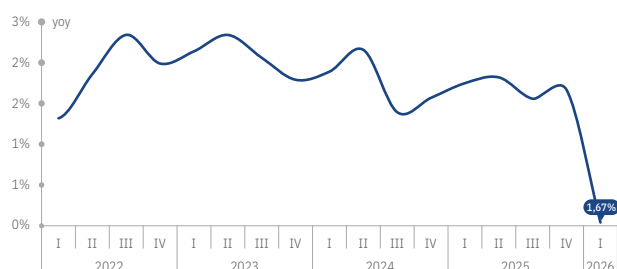
Penyaluran pembiayaan oleh fintech di Sulawesi Selatan tetap tumbuh positif pada Triwulan I 2026, meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran pinjaman tumbuh sebesar 12,44% (yoy), lebih rendah dibandingkan 22,74% (yoy) pada Triwulan IV 2025. Secara nominal,

Grafik 3.35. Penyaluran Pinjaman Oleh Fintech Kepada Penerima di Sulawesi Selatan



Sumber: OJK, diolah

Grafik 3.36. TWP90 Sulawesi Selatan



Sumber: OJK, diolah

penyaluran pinjaman pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp629 miliar, menurun dibandingkan Rp649 miliar pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, jumlah rekening penerima pinjaman aktif meningkat dari 625.413 rekening menjadi 634.781 rekening, mengindikasikan bahwa pemanfaatan pembiayaan fintech tetap meningkat meskipun nominal penyaluran mengalami moderasi. *Outstanding* pinjaman juga menurun dari Rp2,39 triliun menjadi Rp2,20 triliun. Dari sisi kualitas pembiayaan, risiko kredit fintech menunjukkan perbaikan signifikan, tercermin dari Tingkat Wanprestasi 90 (TWP90) yang menurun dari 1,67% menjadi 0,04% pada Triwulan I 2026 (Grafik 3.36). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan fintech tetap tumbuh positif dengan basis pengguna yang meningkat, di tengah moderasi nominal penyaluran dan perbaikan kualitas pembiayaan.

Sejalan dengan berbagai upaya penguatan akses keuangan tersebut di atas, Bank Indonesia bersama *stakeholder* terkait terus memperkuat pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan Karya Kreatif Sulawesi Selatan dan South Sulawesi Digital Festival (KKS x DIGIFEST) 2026. Program ini didorong oleh besarnya potensi ekonomi kreatif Sulawesi Selatan, khususnya pada subsektor wastra, fashion, kriya, dan kuliner, yang memiliki nilai tambah tinggi serta didukung oleh kekayaan budaya lokal yang kuat. Melalui KKS x DIGIFEST 2026,

penguatan kapasitas dan daya saing UMKM dilakukan secara terintegrasi melalui perluasan akses pasar domestik dan global, fasilitasi akses pembiayaan, penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya, serta perluasan pemanfaatan sistem pembayaran digital. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat mendorong UMKM semakin bankable, produktif, dan berdaya saing, sekaligus memperluas inklusi keuangan dan memperkuat ekosistem ekonomi digital di Sulawesi Selatan. Selain mendukung penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru dan peningkatan nilai tambah produk lokal, penguatan UMKM melalui KKS x DIGIFEST 2026 juga turut mendukung ketahanan perekonomian daerah melalui diversifikasi kegiatan usaha, perluasan pasar, dan penguatan akses terhadap layanan keuangan formal.



BOKS 3

KKS x DIGIFEST 2026: Wastra Naik Kelas, Digitalisasi Meluas, Ekonomi Kreatif Sulawesi Selatan Melesat

Ekonomi kreatif telah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menciptakan nilai tambah, namun juga mendorong inovasi serta mengangkat kekayaan budaya sebagai identitas dan keunggulan produk Indonesia. Secara nasional, pada tahun 2025, sektor tersebut berkontribusi sekitar 7% terhadap perekonomian nasional dan 18,7% terhadap penyerapan tenaga kerja, dengan fashion, kuliner, dan kriya sebagai tiga subsektor pendorong utama.

Potensi tersebut juga tercermin di Sulawesi Selatan yang memiliki kekayaan wastra dan fashion dengan karakteristik budaya yang kuat, serta didukung oleh beragam produk aksesoris dan kerajinan lokal. Potensi dan kekayaan merupakan modal penting untuk terus dikembangkan agar mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar, membuka lapangan kerja, memperluas peluang ekspor, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Di samping itu, optimalisasi potensi ekonomi kreatif juga perlu berjalan beriringan dengan pemanfaatan teknologi digital secara lebih luas, termasuk pada aspek sistem pembayaran. Digitalisasi sistem pembayaran dapat menjadi salah satu akselerator bagi UMKM dalam meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas jangkauan pasar.

Salah satu upaya untuk mengangkat potensi UMKM Sulawesi Selatan sebagai kekuatan ekonomi kreatif berbasis budaya dan berdaya saing, sekaligus memperkuat ekosistem digital yang semakin inklusif, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan berkolaborasi

dengan *Indonesian Fashion Chamber* (IFC) Chapter Makassar menyelenggarakan rangkaian kegiatan **Karya Kreatif Sulawesi Selatan dan South Sulawesi Digital Festival (KKS x DIGIFEST) presents Wastra Heritage Market 2026** pada 28 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Mall Ratu Indah Makassar. Kegiatan tersebut melibatkan UMKM dari berbagai subsektor ekonomi kreatif dan berhasil menarik lebih dari 8.000 pengunjung.

1. *Business Matching* Perluasan Akses Pasar

Dalam mendorong perluasan akses pasar domestik, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan melalui gelaran KKS x DIGIFEST 2026 menyelenggarakan rangkaian *exhibition*, *fashion show*, dan *talkshow* dalam rangka promosi tenun dan wastra lokal dengan melibatkan ±100 UMKM binaan produk *wastra/fashion*, serta kriya dan kuliner.

Secara keseluruhan, transaksi penjualan UMKM selama KKS x DIGIFEST 2026 tercatat lebih dari Rp1,6 Miliar, yang didominasi oleh pembayaran non-tunai dengan volume lebih dari 10.000 transaksi. Capaian tersebut mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap produk UMKM lokal sekaligus meningkatnya adopsi pembayaran digital.

Tidak hanya di pasar domestik, perluasan akses pasar UMKM juga terus didorong hingga ke pasar global melalui fasilitasi *business matching* dengan *potential buyer* luar negeri. Melalui penyelenggaraan Anging Mammiri *Business Fair* (AMBF) tahun lalu, tercatat total komitmen ekspor senilai Rp228 miliar dari 30 UMKM binaan ke 17 negara,

Gambar box 3.1. Opening Ceremony KKS x DIGIFEST 2026



Gambar box 3.2. Fashion Show KKS x DIGIFEST 2026



BOKS 3

Gambar box 3.3. Pelepasan Ekspor PT. OSP Farm



yang hingga Juli 2026, telah terealisasi sebesar Rp123,5 miliar atau 54,2% dari total komitmen ekspor yang dihasilkan.

Salah satu realisasi tersebut ditandai dengan kegiatan pelepasan ekspor 10,2 ton *whole candlenut* (kemiri bulat) PT Onstar Pop Farm ke Jeddah, Arab Saudi, senilai US\$33.660, yang dilaksanakan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Luwu, dan *stakeholder* terkait.

2. Business Matching Pembiayaan

Dalam memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan formal, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan Bank Mandiri dan BPD Sulselbar menyelenggarakan *workshop* pembiayaan yang diikuti oleh lebih dari 150 UMKM. Kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku UMKM dalam melakukan pengelolaan keuangan usaha, sekaligus memperkuat *product knowledge* pembiayaan perbankan.

Selain itu, selama rangkaian kegiatan KKS x DIGIFEST 2026 juga memfasilitasi *business matching* pembiayaan antara UMKM dengan lembaga keuangan yang berhasil mencatatkan komitmen pembiayaan senilai total Rp18,27 miliar. **Komitmen tersebut terdiri atas penyaluran Bank Mandiri sebesar Rp12,18 miliar dan BPD Sulselbar sebesar Rp6,09 miliar.** Capaian tersebut mencerminkan kuatnya sinergi dengan lembaga keuangan formal dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.

Gambar box 3.4. Workshop dan Business Matching Pembiayaan



Melalui penguatan kapasitas yang diikuti dengan fasilitas akses pembiayaan, UMKM diharapkan semakin *bankable* dan mampu memanfaatkan pembiayaan secara produktif untuk meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, serta mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas secara berkelanjutan.

3. Penguatan Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya

Dalam upaya mendorong peningkatan daya saing wastra dan *fashion* Sulawesi Selatan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan **Lomba Desain Motif Wastra Sulawesi Selatan**, sebagai wadah untuk menggali kreativitas dan mendorong lahirnya inovasi motif wastra yang mampu mengangkat kekayaan budaya lokal sekaligus memiliki nilai tambah ekonomi.

Penguatan kapasitas juga dilakukan melalui penyelenggaraan *inspirational talk* dengan tema "**Wastra**

Gambar box 3.5. Lomba Desain Motif Wastra Sulawesi Selatan



BOKS 3

Traditional Reimagined and Discover the Future of Fashion” yang menghadirkan narasumber lokal maupun nasional. Kegiatan ini memberikan wawasan dan inspirasi kepada UMKM serta masyarakat mengenai pengembangan wastra yang adaptif terhadap tren pasar, tanpa meninggalkan identitas dan karakter budaya Sulawesi Selatan.

Melalui perpaduan **pelestarian budaya, inovasi, dan penguatan kapasitas**, wastra Sulawesi Selatan diharapkan tidak hanya terjaga sebagai warisan budaya, tetapi terus berkembang menjadi produk kreatif yang relevan, bernilai tambah, dan berdaya saing sehingga mampu memperkuat kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah.

4. Perluasan Keuangan Sosial Syariah pada Aplikasi Digital Satu Wakaf

Dari sisi filantropi dan keuangan sosial syariah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dompot Dhuafa menghadirkan inisiatif wakaf produktif **Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Melalui Pekarangan Pangan Terpadu** dengan komoditas cabai dan seledri. Penghimpunan dana dilakukan melalui kanal digital QRIS yang berhasil menghimpun dana wakaf sebesar **Rp29 juta** melalui *booth* Wakafein selama rangkaian kegiatan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya menghadirkan kemudahan dan efisiensi dalam sistem pembayaran, namun juga membuka ruang partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam berwakaf, sehingga dapat memperkuat peran keuangan sosial syariah sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi pangan di daerah.

Gambar box 3.6. Strategi Perluasan Keuangan Sosial Syariah







04

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah



Indikator sistem pembayaran (SP) terutama SP ritel di Sulawesi Selatan menunjukkan perkembangan positif sejalan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan II sebesar 5,59% (yoy).

Layanan BI-FAST dengan sejumlah keunggulannya terus bertumbuh dengan nominal transaksi sebesar Rp94,31 triliun atau tumbuh 51,74% (yoy), dengan volume 41,39 juta transaksi atau meningkat 57,20% (yoy).

Pada kanal lainnya, nominal transaksi SKNBI tercatat Rp5,93 triliun atau tumbuh 5,6% (yoy), sementara nominal BI-RTGS sebesar Rp26,75 triliun atau turun 1,26% (yoy), meskipun volumenya meningkat 15,37% (yoy).

Adopsi QRIS terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Hingga triwulan II 2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 1,48 juta dan *merchant* mencapai 1,46 juta. Nominal transaksi QRIS sebesar Rp7,64 triliun atau tumbuh 82,79% (yoy), sedangkan volumenya mencapai 88,14 juta transaksi atau meningkat 149,72% (yoy).

Sejalan dengan pergeseran preferensi masyarakat ke kanal digital, volume transaksi kartu ATM/D menurun 6,49% (yoy) dan jumlah mesin ATM berkurang menjadi 2.722 unit. Di sisi lain, transaksi *e-Commerce* dan uang elektronik masing-masing tumbuh 32,49% (yoy) dan 30,85% (yoy).

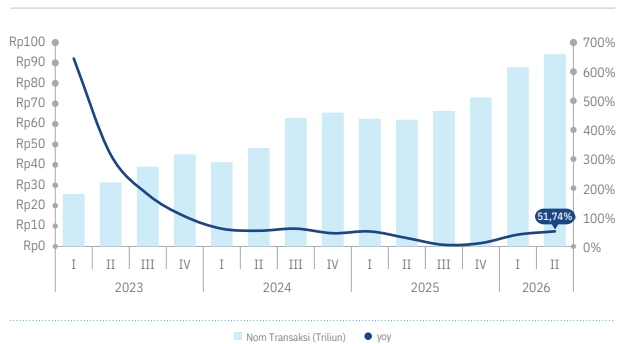
Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Sulawesi Selatan mencatat *net inflow* Rp1,80 triliun, dengan *inflow* sebesar Rp4,98 triliun dan *outflow* Rp3,18 triliun. *Inflow* turun 1,28% (yoy), sementara *outflow* meningkat 27,02% (yoy).

4.1. Sistem Pembayaran

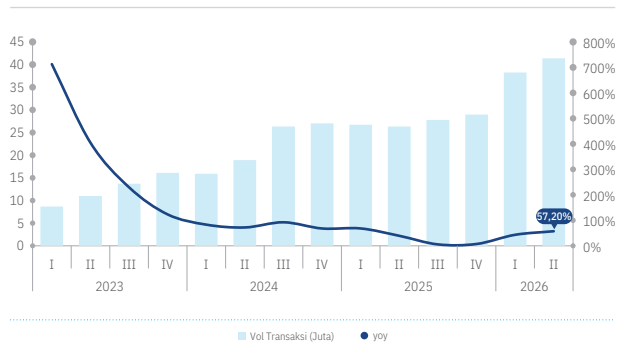
4.1.1. Transaksi BI-FAST

Transaksi nominal dan volume BI-FAST mencatat pertumbuhan, baik secara triwulanan maupun tahunan. Pada triwulan II 2026, BI-FAST mencatat nominal transaksi sebesar Rp94,31 triliun atau tumbuh sebesar 51,74% (Grafik 4.1). Sementara dari sisi volume, BI-FAST telah digunakan sebanyak 41,39 juta kali sepanjang triwulan II 2026 atau tumbuh sebesar 57,2% (Grafik 4.2). Angka ini menegaskan peran BI-FAST yang kian dominan dalam mendukung aktivitas transfer dana masyarakat, baik untuk kebutuhan personal sehari-hari maupun mendukung aktivitas ekonomi dan sosial dalam skala yang lebih luas.

Grafik 4.1. Perkembangan Nominal Transaksi BI-FAST 2023-2026



Grafik 4.2. Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS 2023-2026



4.1.2. Transaksi SKNBI

Nominal transaksi SKNBI pada triwulan II 2026, baik melalui kredit/transfer maupun kliring warkat debit mengalami tren peningkatan, baik tahunan maupun triwulanan. Nominal transaksi kliring pada triwulan II 2026 adalah sebesar Rp5,93 triliun, naik 5,6% (yoy) serta 9,5% (qtq). Hal serupa juga terjadi di sisi jumlah perputaran warkat yang mencapai 120.551 warkat sepanjang triwulan II 2026 atau naik 10,7% (yoy) serta 14,3% (qtq).

Ditinjau dari aspek rata-rata harian transaksi kliring warkat debit, baik nominal maupun jumlah perputaran warkat, mengalami kontraksi secara triwulanan. Nominal rata-rata harian nilai transaksi SKNBI melalui warkat turun sebesar 3,73% (qtq), meskipun secara volume sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,54% (qtq). Hal yang sama terjadi juga secara tahunan, rata-rata harian nilai transaksi SKNBI melalui warkat turun sebesar 7,11% (yoy) menjadi Rp102,33 miliar per hari, sementara volume transaksi warkat harian turun sebesar 2,66% (yoy) menjadi 2.078 warkat per hari. (Tabel 4.1).

Wilayah kerja kliring debit KPwBI Provinsi Sulsel mencakup 4 (empat) Koordinator Pertukaran Warkat Debit (KPWD), yaitu Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Bone (Watampone), dan Kota Palopo. Terdapat 60 bank peserta yang mengikuti kegiatan PWD di Makassar dan 33 bank peserta di tiga wilayah lainnya. KPWD sebagai perpanjangan tangan Bank Indonesia, memiliki tugas untuk menyelenggarakan kegiatan pertukaran warkat debit di wilayah masing-masing. Pada triwulan II 2026, rata-rata harian jumlah warkat debit kliring penyerahan pada empat KPWD berkontraksi 16,97% (yoy) ke angka 626 warkat (Tabel 4.2). Ditinjau dari rata-rata harian jumlah warkat debit kliring pengembalian, angka tersebut mencapai 17 warkat atau turun 16,55% (yoy).

Tabel 4.1 Perkembangan Transaksi SKNBI (Kliring Warkat Debit) 2024-2026

Uraian	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Total Perputaran Kliring										
- Nominal (triliun rupiah)	6,63	6,33	7,33	7,39	5,95	5,62	6,39	6,83	5,42	5,62
- Lembar (ribuan)	118,358	116,299	136,190	150,008	112,295	108,899	129,334	155,15	105,435	108,899
Rata-rata Harian Total Perputaran Kliring										
- Nominal (triliun rupiah)	108,76	117,25	112,73	115,53	102,50	110,16	98,36	106,66	106,29	110,16
- Lembar (ribuan)	1,94	2,15	2,10	2,34	1,94	2,14	1,99	2,42	2,067	2,14

Sumber: Bank Indonesia

Tabel 4.2 Perkembangan Transaksi SKNBI (Kliring Warkat Debit) 2025-2026 Berdasarkan Wilayah Kerja

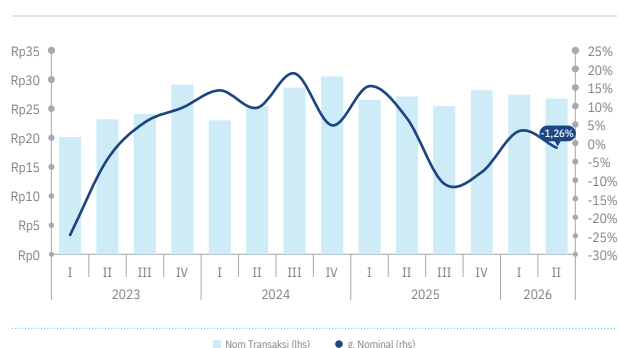
Wilayah Kerja	Rata-rata Harian Jumlah Warkat Debit Kliring Penyerahan					Rata-rata Harian Jumlah Warkat Debit Kliring Pengembalian				
	II-25	III-25	IV-25	I-26	II-26	II-25	III-25	IV-25	I-26	II-26
Kota Makassar	711	612	613	686	592	20	15	16	21	17
Kota Pare-pare	8	5	6	5	6	1	0	0	0	0
Kota Palopo	26	22	21	26	21	0	0	0	0	0
Kabupaten Watampone	9	7	6	8	7	0	0	0	0	0
Total	754	646	646	726	626	21	15	17	21	18

Sumber: Bank Indonesia

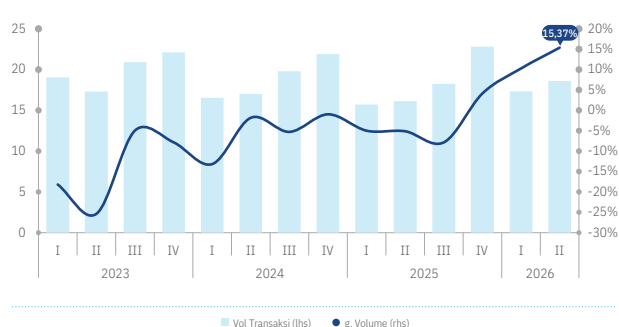
4.1.3. Transaksi BI-RTGS

Pada triwulan II 2026, nominal BI RTGS terkontraksi secara tahunan dan triwulan sebelumnya. Dengan nominal Rp26,75 triliun, transaksi BI - RTGS turun sebesar 1,26% (yoy), dan 2,30% (qtq) (Grafik 4.3).

Dari sisi volume, transaksi BI-RTGS mengalami pertumbuhan sebesar 15,37% (yoy), dan 7,39% (qtq) ke angka 18,61 ribu transaksi (Grafik 4.4).

Grafik 4.3. Perkembangan Nominal Transaksi BI-RTGS 2023-2026

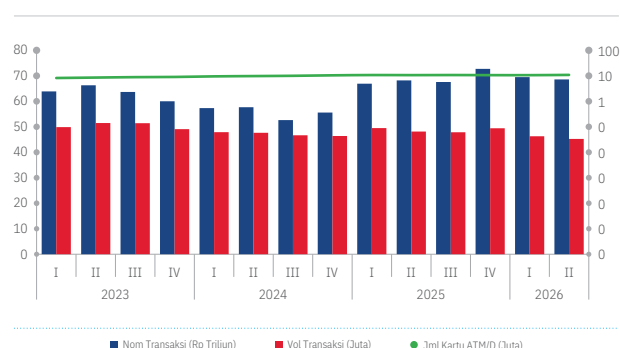
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4. Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS 2023-2026

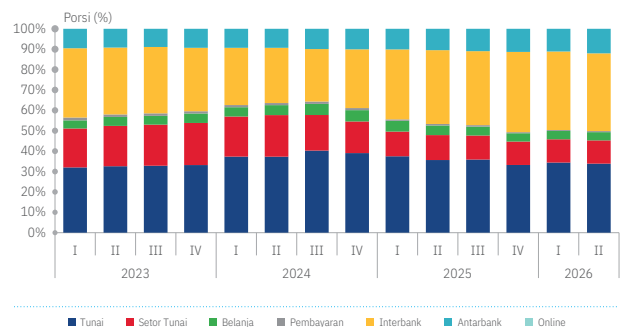
Sumber: Bank Indonesia, diolah

4.1.4. Transaksi APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu)

Pada triwulan II 2026, jumlah kartu ATM/D mencapai 10,85 juta unit atau naik 1,98% (yoy) dan 2,22% (qtq). Peningkatan jumlah kartu diikuti juga dengan peningkatan nominal transaksi kartu ATM/D sebesar 0,56% (yoy) namun turun sebesar 4,46% (qtq). Dari sisi volume, baik secara triwulanan maupun tahunan terjadi penurunan transaksi kartu ATM sebesar 6,40% (qtq) dan

Grafik 4.5. Perkembangan Nominal dan Volume Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) 2023-2026

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.6. Pangsa Jenis Transaksi ATM/D Berdasarkan Nominal 2023-2026

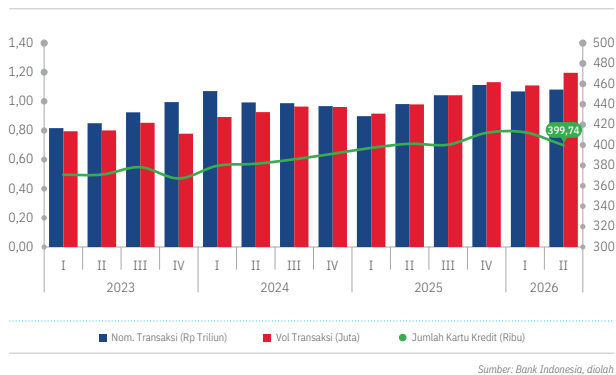
Sumber: Bank Indonesia, diolah

6,49% (yoy). Tren penurunan transaksi ATM/D tersebut disinyalir didorong oleh meningkatnya preferensi masyarakat akan transaksi ekonomi dan keuangan digital.

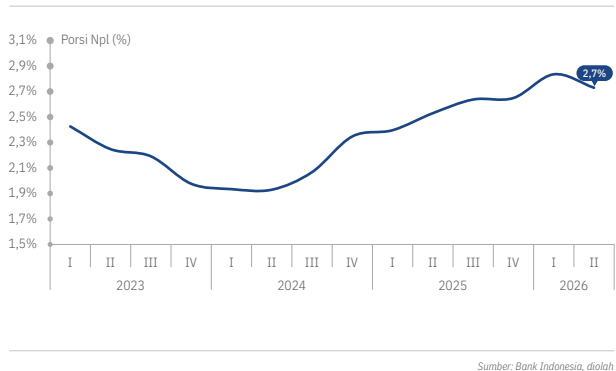
Dilihat berdasarkan jenis transaksinya, mayoritas Kartu ATM/D masih digunakan untuk transaksi *interbank* dengan porsi 38% dan tarik tunai dengan porsi sebesar 34% (Grafik 4.6). Hal tersebut menunjukkan bahwa kartu ATM/D di Sulsel mayoritas masih digunakan untuk keperluan pemindahan dana *interbank* dan tarik tunai.

Sementara itu, jumlah kartu kredit di Sulsel mengalami penurunan sebesar 3,84% (yoy) menjadi 399 ribu keping. Meskipun demikian, transaksi menggunakan Kartu Kredit menunjukkan tren pertumbuhan secara tahunan. Pada triwulan II 2026, nominal transaksi mencapai Rp1,23 triliun atau naik sebesar 10,1% (yoy). Demikian juga dari sisi volume yang mengalami kenaikan sebesar 22,1% (yoy) menjadi 1,36 juta transaksi (Grafik 4.7). Perpanjangan kebijakan Kartu Kredit (KK) sampai dengan 30 Juni 2026, yang meliputi batas minimum pembayaran sebesar 5% dari total tagihan dan kebijakan nilai denda keterlambatan sebesar maksimum 1% dari total tagihan serta tidak melebihi Rp100.000, masih menjadi salah satu faktor pendorong peningkatan transaksi kartu kredit.

Grafik 4.7. Perkembangan Volume dan Nominal Transaksi Kartu Kredit 2023-2026



Grafik 4.8. Perkembangan NPL Kartu Kredit 2023-2026



Di tengah meningkatnya transaksi yang menggunakan kartu kredit, *Non Performing Loan* (NPL) Kartu Kredit mengalami penurunan secara triwulanan dan masih terjaga pada tingkat yang rendah di angka 2,7% (Grafik 4.8).

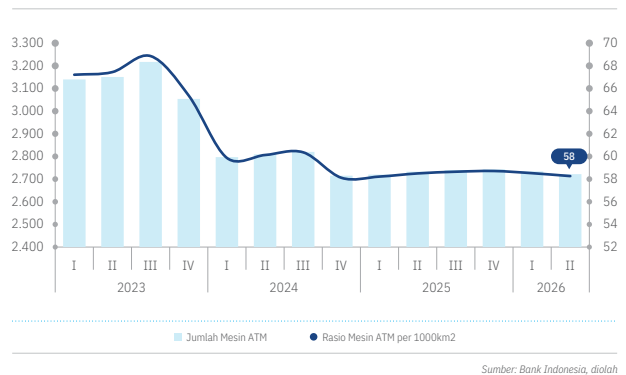
4.1.5. Ketersediaan Layanan Infrastruktur Sistem Pembayaran Nontunai

Sejalan dengan penurunan transaksi menggunakan ATM/D, jumlah mesin ATM di Sulsel pada triwulan II 2026 mengalami pengurangan sebanyak 12 unit atau menjadi 2.722 mesin jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan dimaksud juga mengubah rasio ketersediaan layanan keuangan melalui mesin ATM menjadi 58 mesin per 1.000 km² (Grafik 4.9). Kondisi tersebut mencerminkan adanya pergeseran preferensi masyarakat yang semakin mengandalkan kanal pembayaran digital, sehingga kebutuhan terhadap layanan transaksi melalui mesin ATM secara bertahap mengalami penurunan.

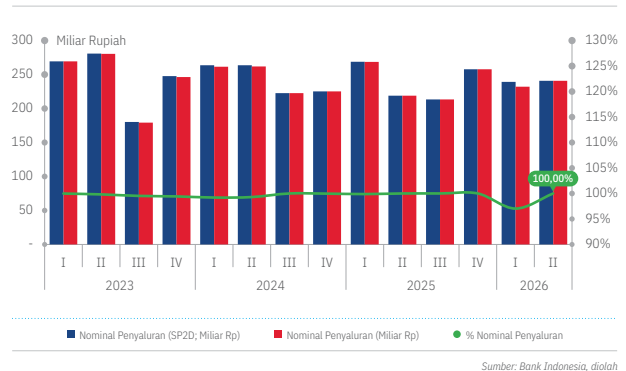
4.1.6. Proses Elektronifikasi Bantuan Sosial Nontunai (BSNT)

Nominal penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan II 2026 di Provinsi Sulsel mencapai 100%. Hal ini berdasarkan data bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)

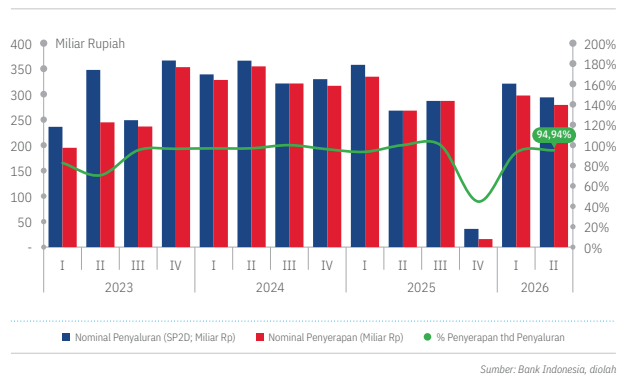
Grafik 4.9. Jumlah Mesin ATM dan Rasionya per 1.000 km² 2023-2026



Grafik 4.10. Perkembangan BSNT PKH 2023-2026



Grafik 4.11. Perkembangan BSNT Program Sembako 2023-2026



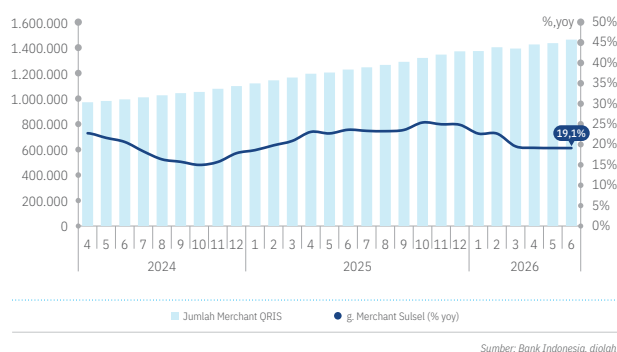
dan PT Pos Indonesia yang dihimpun secara terpusat di Bank Indonesia. Adapun nominal penyaluran pada triwulan II 2026 adalah sebesar Rp240,83 miliar (Grafik 4.10). Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang telah tersalurkan pada periode ini mencapai 306.889 KPM dengan tingkat penyaluran KPM mencapai 100%.

Sementara itu, sesuai Rapat Tingkat Menteri (RTM) pada tanggal 17 Februari 2022 sebagai tindak lanjut dari Rapat Terbatas (Ratas) pada tanggal 15 Februari 2022, terdapat alternatif penyaluran bansos Program Sembako (PS) yang dapat dilakukan melalui PT Pos secara tunai. Adapun nominal penyaluran untuk Program Sembako pada triwulan II 2026 sebesar Rp278,94 miliar (Grafik 4.11).

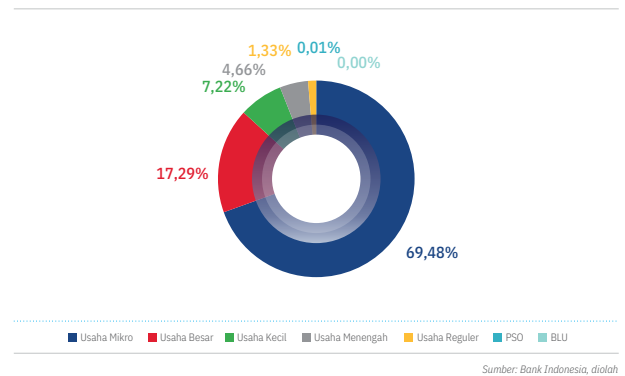
4.1.7. Progres Implementasi QRIS

Pada 2026, Bank Indonesia menargetkan 70 juta pengguna QRIS, 17 miliar transaksi QRIS dan 47 juta *merchant* QRIS secara nasional, yang diharapkan dapat akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, khususnya mengakomodir implementasi QRIS Antar Negara & QRIS Tap sebagai perluasan fitur QRIS.

Grafik 4.12. Perkembangan Jumlah Merchant QRIS Bulanan 2023-2026



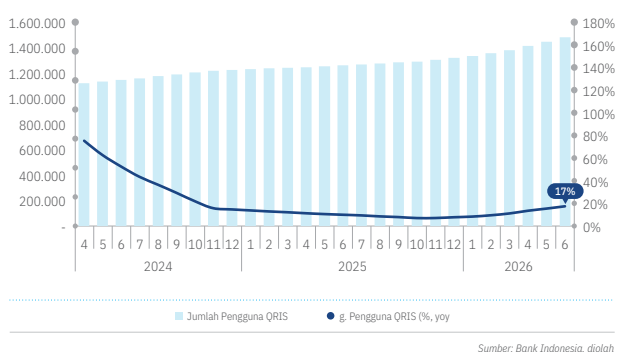
Grafik 4.13. Pangsa Merchant QRIS Berdasarkan Kategorinya Triwulan II 2026



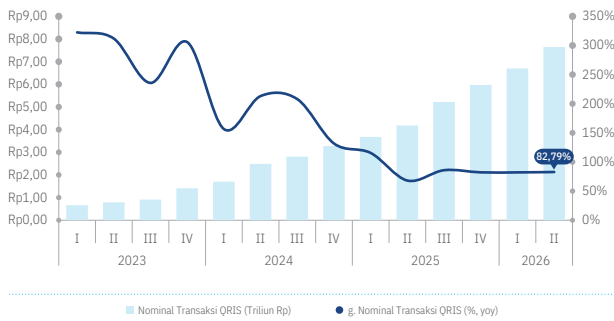
Jumlah *merchant* QRIS di Sulsel pada triwulan II 2026 mencapai 1.462.879 *merchant* atau tumbuh sebesar 19,1% (yoy) jika dibandingkan posisi triwulan yang sama di tahun 2025 (Grafik 4.12). Dari jumlah tersebut, 41,37% *merchant* terkonsentrasi di Kota Makassar, diikuti oleh Kabupaten Gowa (10,21%); Kabupaten Bone (4,70%); Kabupaten Maros (4,69%); dan daerah lainnya dengan pangsa masing-masing di bawah 4%. Dari sisi kategori usaha, *merchant* QRIS di Sulsel masih didominasi oleh kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 81,37% atau sebanyak 1.190.277 *merchant* (Grafik 4.13).

Dari sisi *demand*, hingga triwulan II 2026, sebanyak 1.481.464 penduduk Sulsel telah menggunakan QRIS (Grafik 4.14). Dari angka tersebut, sebanyak 101.330 merupakan pengguna baru di triwulan II 2026 (tertinggi sejak triwulan I 2024). Sejalan dengan hal tersebut, transaksi QRIS di Sulsel tumbuh signifikan baik secara nominal maupun volume. Pada triwulan II 2026, nominal transaksi QRIS tercatat meningkat 82,79% (yoy) atau sebesar Rp7,64 triliun (Grafik 4.15). Adapun volume transaksi QRIS meningkat 149,72% (yoy) atau sebesar 88,14 juta transaksi pada triwulan II 2026 (Grafik 4.16).

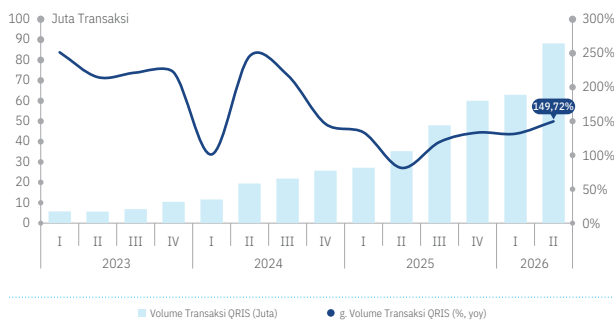
Grafik 4.14. Perkembangan Jumlah Pengguna QRIS Bulanan Sulsel 2023-2026



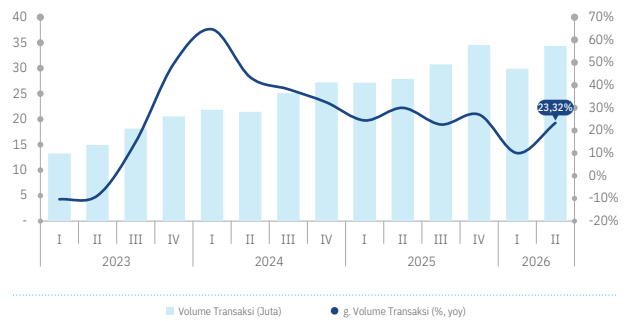
Grafik 4.15. Perkembangan Nominal Transaksi QRIS Sulsel 2023-2026



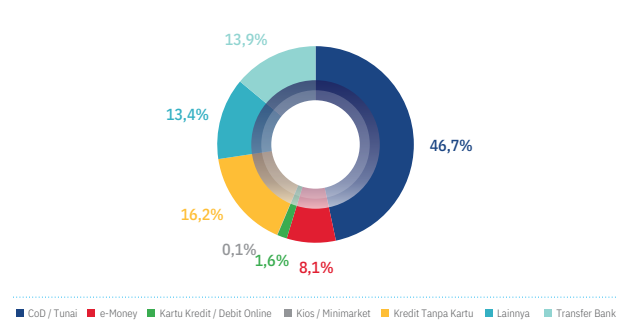
Grafik 4.16. Perkembangan Volume Transaksi QRIS Sulsel 2023-2026



Grafik 4.18. Perkembangan Volume Transaksi e-Commerce 2023-2026



Grafik 4.19. Metode Pembayaran Transaksi e-Commerce Triwulan I 2026

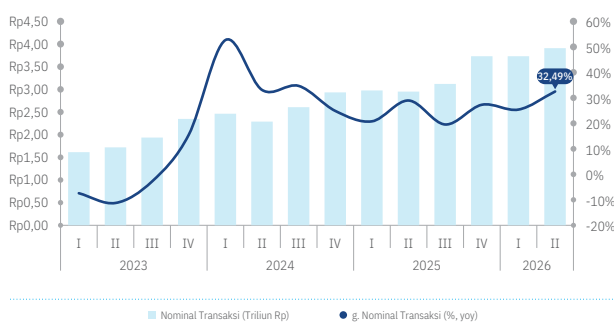


4.1.8. Perkembangan Ekonomi Digital Berdasarkan Transaksi e-Commerce

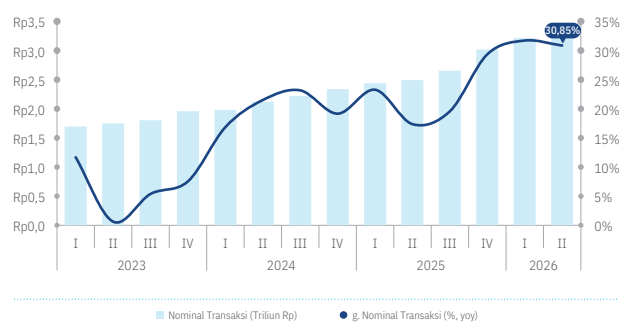
Nominal transaksi *e-Commerce* di Sulsel pada triwulan II 2026 tercatat tumbuh sebesar 32,49% (yoy) menjadi Rp3,91 triliun (Grafik 4.17). Sejalan dengan itu, volume transaksi *e-Commerce* juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 23,32% (yoy) menjadi 34,37 juta transaksi sepanjang triwulan II 2026 (Grafik 4.18).

Dari sisi kategori belanja, *fashion* (26,84%), rumah tangga & kantor (17,64%), serta *personal care* dan kosmetik (16,05%) masih merupakan kategori dengan pangsa transaksi tertinggi pada triwulan II 2026.

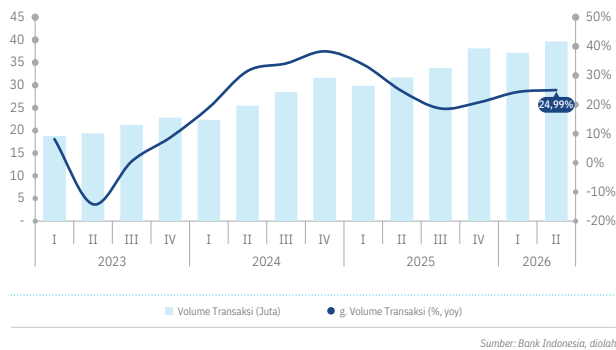
Grafik 4.17. Perkembangan Nominal Transaksi e-Commerce 2023-2026



Grafik 4.20. Perkembangan Nominal Transaksi Uang Elektronik 2023-2026



Grafik 4.21. Perkembangan Volume Transaksi Uang Elektronik 2023-2026

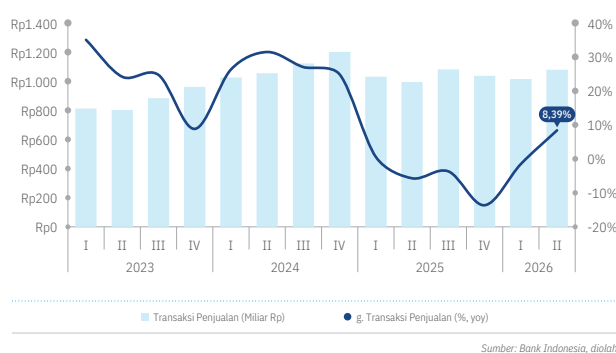


30,85% (yoy) atau mencapai Rp3,26 triliun (Grafik 4.20). Dari angka tersebut, 70,2% transaksi digunakan untuk keperluan belanja; 26,9% untuk keperluan transfer; dan hanya 2,9% digunakan untuk keperluan tarik tunai. Dari sisi volume transaksi, jumlah transaksi pada triwulan II 2026 mencapai 39,64 juta transaksi atau tumbuh 24,99% (yoy) (Grafik 4.21).

4.1.10. Transaksi Jual-Beli Valuta Asing

Aktivitas Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) pada triwulan II 2026 mengalami peningkatan sebesar 6,88% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama di 2025. Total transaksi KUPVA BB pada triwulan II 2026 tercatat sebesar Rp2.132 miliar di mana 50,56% merupakan transaksi penjualan valas (Rp1.078 miliar) dan 49,44% di antaranya merupakan

Grafik 4.22. Perkembangan Transaksi Pembelian Valas 2023-2026



Grafik 4.23. Perkembangan Transaksi Penjualan Valas 2023-2026



transaksi pembelian (Rp1.054 miliar) (Grafik 4.22 dan Grafik 4.23). Adapun nominal transaksi penjualan meningkat sebesar 8,39% (yoy), sementara pembelian tumbuh sebesar 5,37% (yoy).

Berdasarkan jenis mata uang, transaksi penjualan dan pembelian valuta asing di Sulsel pada triwulan II 2026 masih didominasi oleh mata uang Dollar Amerika Serikat (USD) dan Dollar Singapura (SGD) (Grafik 4.24 dan Grafik 4.25). USD mencatatkan pangsa 54,87% untuk transaksi penjualan dan pangsa 55,94% untuk transaksi pembelian. Adapun SGD mencatatkan pangsa 19,54% untuk transaksi penjualan dan pangsa 17,42% untuk transaksi pembelian.

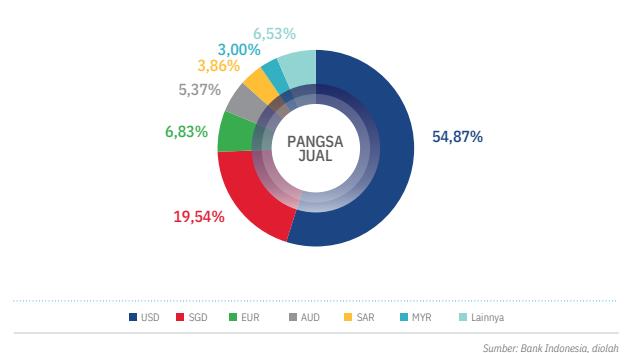
4.2. Pengelolaan Uang Rupiah

4.2.1. Perkembangan Aliran Uang Kartal

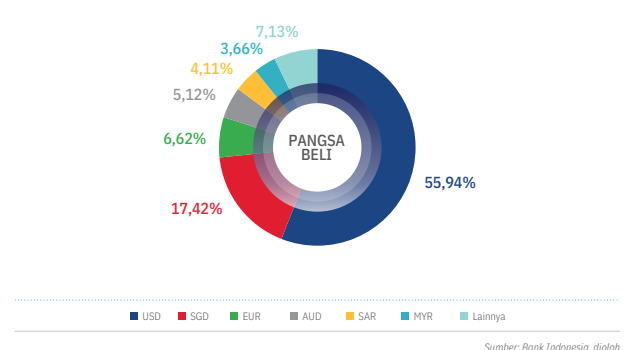
Karakteristik aliran uang kartal di Sulawesi Selatan cenderung menunjukkan tren aliran masuk (*net inflow*). Hal ini dikarenakan Kota Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulsel merupakan hub atau penghubung antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kondisi ini menyebabkan tingginya aktivitas perdagangan antardaerah di Kota Makassar, baik yang antarprovinsi maupun intraprovinci Sulawesi Selatan.

Aliran uang Rupiah ke Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 mengalami *net inflow* sebesar Rp1,8 triliun dengan nilai *inflow* sebesar Rp4,98 triliun dan nilai *outflow*

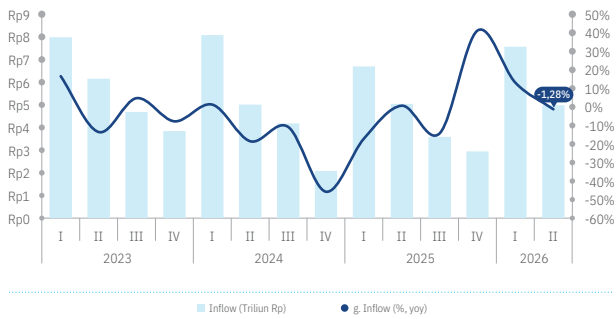
Grafik 4.24. Penjualan Valas Berdasarkan Pangsa Jenis Mata Uang Triwulan II 2026



Grafik 4.25. Pembelian Valas Berdasarkan Pangsa Jenis Mata Uang Triwulan II 2026



Grafik 4.26. Aliran Uang Kartal Inflow 2023-2026



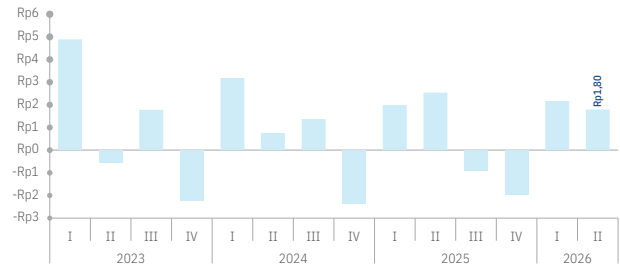
Sumber: Bank Indonesia, diolah

sebesar Rp3,18 triliun. Dibandingkan triwulan I 2026, *inflow* dan *outflow* mengalami kontraksi 34,2% (qtq) dan 41,02% (qtq) sebagai dampak menurunnya arus balik penyetoran Rupiah dari masyarakat ke bank dan menurunnya kebutuhan uang di masyarakat setelah konsumsi dan transaksi yang meningkat pada periode HBKN Ramadan dan Idul Fitri pada Februari dan Maret 2026.

Dibandingkan dengan aliran uang Rupiah periode triwulan II 2025, *inflow* pada triwulan II 2026 mengalami kontraksi 1,28% (yoy) dengan nominal *inflow* Rp4,98 triliun (Grafik 4.26). Berbeda halnya dengan *inflow*, aliran *outflow* pada triwulan II 2026 mengalami ekspansi 27,02% (yoy) dibandingkan triwulan II 2025 dengan aliran *outflow* Rp3,18 triliun (Grafik 4.27). *Inflow* triwulan II 2026 yang menurun dibandingkan triwulan II 2025 dipengaruhi dampak *inflow* setelah HBKN Ramadan dan Idulfitri yang jatuh di akhir triwulan I 2025, sementara di tahun 2026 sebagian proses pengembalian uang paska HBKN Ramadan dan Idul Fitri sudah terjadi pada akhir Maret dan tercatat sebagai *inflow* TWI 2026.

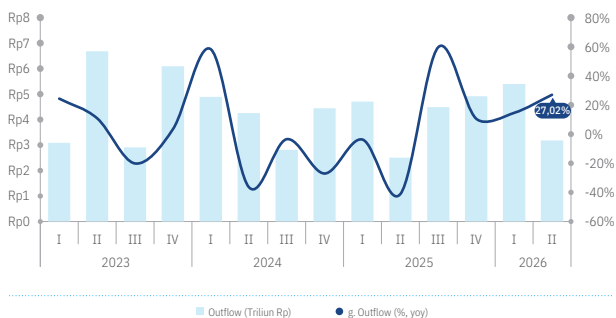
Net inflow aliran uang Rupiah pada triwulan II 2026 sebesar Rp1,80 triliun, lebih rendah dibandingkan *net inflow* pada triwulan II 2025 sebesar Rp2,54 triliun (Grafik 4.28).

Grafik 4.28. Netflow Uang Kartal 2023-2026



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.27. Aliran Uang Kartal Outflow 2023-2026



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sultan Qris Run 2026: 7 Tahun Qris Menuju Ekosistem Pembayaran Digital yang Semakin Inklusif

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan kembali memperkuat edukasi dan perluasan akseptasi pembayaran digital melalui penyelenggaraan Sultan QRIS Run 2026 pada 22 Agustus 2026. Kegiatan yang dirangkaikan dengan Penutupan Pekan Olahraga dan Seni Perbankan (PORSEBANK) Sulawesi Selatan 2026 tersebut menjadi momentum untuk memperingati perjalanan tujuh tahun *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019.

Mengusung tema “*Seven Color, Seven Journey, One QRIS*”, Sultan QRIS Run 2026 menggambarkan perjalanan transformasi QRIS selama tujuh tahun dalam menghadirkan pembayaran digital yang semakin mudah, cepat, aman, dan inklusif. **Seven Color** menggambarkan ragam perkembangan QRIS dari pembayaran menggunakan kode QR statis hingga hadirnya berbagai inovasi baru, termasuk QRIS TAP, sementara **Seven Journey** menggambarkan tujuh tahun perjalanan QRIS. Namun semuanya bertemu pada satu semangat yang sama: **One QRIS**, satu standar pembayaran Indonesia yang inklusif dan semakin dekat dengan masyarakat.

Kegiatan diikuti ribuan peserta yang berasal dari perbankan, instansi, mitra strategis, komunitas, media, serta masyarakat. Selain lari sejauh 10 kilometer, rangkaian Sultan QRIS Run 2026 juga diisi dengan *fun walk*, hiburan, edukasi, serta berbagai aktivitas interaktif dan *doorprize*. Melalui pendekatan tersebut, edukasi mengenai sistem pembayaran digital dikemas secara lebih dekat, menarik, dan relevan dengan gaya hidup masyarakat.

Salah satu keunikan kegiatan ini adalah hadirnya QRIS Station di sepanjang rute lari, mulai dari kilometer 3 hingga kilometer 9. Setiap station memperkenalkan perjalanan dan inovasi QRIS dari waktu ke waktu, yaitu QRIS *Merchant Presented Mode* (MPM) Statis; QRIS MPM Dinamis; QRIS *Customer Presented Mode* (CPM); QRIS Tanpa Tatap Muka (TTM); QRIS Transfer, Tarik Tunai, dan Setor Tunai (TUNTAS); QRIS Antarnegara (*Cross Border*); dan QRIS Tanpa Pindai (TAP). Dengan demikian, setiap kilometer yang ditempuh peserta tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan menuju garis finis, tetapi juga menggambarkan perjalanan QRIS yang terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi pembayaran.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Wimanda menyampaikan bahwa keberhasilan QRIS bukan semata-mata mengenai perkembangan teknologi, tetapi terutama bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Per 30 Juni 2026, QRIS telah menjangkau sekitar 66 juta pengguna dan 44,86 juta merchant di seluruh Indonesia, yang sebagian besar merupakan UMKM. Sejak implementasinya, QRIS telah memfasilitasi sekitar 37 miliar transaksi dengan nilai mencapai Rp600 triliun. Perkembangan tersebut juga terlihat nyata di Sulawesi Selatan. Per 30 Juni 2026, jumlah pengguna QRIS di Sulawesi Selatan telah mencapai sekitar 1,48 juta pengguna, 1,46 juta merchant, dengan volume transaksi



BOKS 4

mencapai 151 juta transaksi, dan nominal transaksi mencapai Rp14,3 triliun. Hal ini terlihat nyata di kehidupan sehari-hari, bagaimana QRIS digunakan mulai dari pedagang pasar, warung kopi, UMKM, pusat perbelanjaan, transportasi, destinasi wisata, hingga berbagai layanan publik.

Memasuki tahun kedelapannya, tantangan pengembangan QRIS juga terus berkembang. Upaya perluasan tidak lagi hanya diarahkan pada penambahan pengguna maupun merchant, tetapi juga pada peningkatan frekuensi dan ragam penggunaan QRIS dalam berbagai aktivitas ekonomi. Perluasan tersebut perlu berjalan beriringan dengan peningkatan literasi masyarakat agar transaksi digital dilakukan secara aman dan masyarakat semakin memahami berbagai risiko serta modus kejahatan di era digital.

Sultan QRIS Run 2026 sekaligus menjadi representasi bahwa transformasi digital membutuhkan perjalanan dan kolaborasi yang berkesinambungan. Sinergi Bank Indonesia bersama pemerintah daerah, industri perbankan, Penyedia Jasa Pembayaran, pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat menjadi kunci agar manfaat digitalisasi sistem pembayaran dapat dirasakan secara semakin luas dan merata.

Sejalan dengan upaya memperluas manfaat QRIS bagi masyarakat dan pelaku usaha, Bank Indonesia juga memperkuat dukungan kebijakan melalui perluasan *Merchant Discount Rate* (MDR) QRIS 0% yang berlaku efektif mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan MDR 0% tetap diberlakukan bagi *merchant* kategori Usaha Mikro (UMI) untuk transaksi sampai dengan Rp500.000, serta diperluas kepada merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000, yang sebelumnya dikenakan MDR sebesar 0,7%. Perluasan kebijakan ini diharapkan semakin meningkatkan efisiensi biaya transaksi bagi pelaku usaha, mendorong peningkatan penggunaan QRIS untuk transaksi bernilai kecil, serta memperluas manfaat digitalisasi pembayaran bagi masyarakat.

Melalui momentum tujuh tahun QRIS, Bank Indonesia akan terus mendorong inovasi sistem pembayaran yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif. Sebagaimana semangat “*Seven Color, Seven Journey, One QRIS*”, beragam inovasi dan perjalanan yang telah dilalui pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yaitu menghadirkan QRIS sebagai solusi pembayaran digital Indonesia yang semakin dekat, bermanfaat, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat.







Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan



Tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan pada periode Maret 2026 menurun dibandingkan periode September 2025. Penurunan tingkat kemiskinan ini terjadi pada penduduk yang tempat tinggal berada di perkotaan yang menunjukkan perbaikan kondisi kemiskinan secara berkelanjutan, terutama dalam tiga tahun terakhir.

Kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan menunjukkan penurunan nilai indeks Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 67,59% pada Februari 2026 menjadi 66,83% pada Mei 2026. Angka tersebut menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka pada Mei 2026 turut menunjukkan penurunan dari Februari 2026. Hal ini terutama didorong oleh pengurangan penduduk bekerja dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran serta lapangan usaha Jasa Keuangan.

5.1. Ketenagakerjaan

Pada periode Mei 2026, kondisi ketenagakerjaan Sulawesi Selatan menunjukkan penurunan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi jika dibandingkan pada periode Februari 2026 (Tabel 5.1). Berdasarkan rilis data BPS, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)⁵ pada periode Mei 2026 sebesar 66,83%, turun sebesar 0,76 persen poin dibanding periode Februari 2026 (Tabel 5.1). Sementara itu, jumlah penduduk usia kerja tercatat meningkat sebanyak 24 ribu orang atau menjadi 7.415 ribu orang dibanding periode Februari 2026. Meski demikian, jumlah angkatan kerja mengalami penurunan sebanyak 40 ribu orang, dari 4.995 ribu orang pada Februari 2026 menjadi 4.955 ribu orang pada Mei 2026. Begitu pula dengan penduduk yang menganggur juga mengalami penurunan sebanyak 16 ribu orang atau menjadi 230 ribu orang pada periode Mei 2026. Di sisi lain, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)⁶ pada Mei 2026 turun sebesar 0,29 persen poin, dari 4,95% menjadi 4,66%.

5.1.1 Konsumsi Pemerintah

Berdasarkan rilis data BPS, penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan sepanjang periode Februari 2026 sampai dengan Mei 2026 mencatat penurunan. Total angkatan kerja, berada di angka 4,955 ribu orang atau turun 40 ribu orang dari periode Februari 2026 sampai dengan Mei 2026. Sementara itu, tingkat pengangguran turun sebesar 16 ribu orang dengan jumlah angkatan kerja yang menganggur sebanyak 230 ribu orang. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki tercatat sebesar 83,55 persen pada Mei 2026, lebih tinggi dibandingkan pada periode Februari 2026 yang tercatat 83,27 persen atau meningkat 0,28 persen poin, sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan 1,77 persen poin dengan nilai TPAK sebesar 50,59% pada Mei 2026, lebih rendah dibandingkan pada periode Februari 2026 yang tercatat 52,36%.

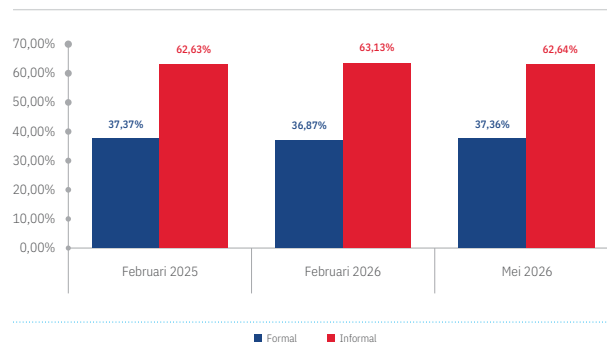
Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. LU Perdagangan Besar dan Eceran, LU Jasa Keuangan, LU Informasi dan Komunikasi menunjukkan tren penurunan terbesar pada periode Mei 2026 jika dibandingkan Februari 2026 (Tabel 5.2). Pada Mei 2026, LU Pertanian masih mendominasi serapan tenaga kerja terbesar di Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 38,33% dari total tenaga kerja. Sementara itu, serapan tenaga kerja pada LU Perdagangan Besar dan Eceran, menjadi penyumbang kedua dari penyerapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan sebesar 16,85%, diikuti LU Industri Pengolahan sebesar 7,72%. Hal tersebut menggambarkan pola lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Sulawesi Selatan.

Tabel 5.1 Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama

Kegiatan Utama	Februari 2026 (ribu orang)	Mei 2026 (ribu orang)	Perubahan Feb 2026 - Mei 2026 (ribu orang)
Penduduk usia Kerja	7391,28	7415,29	24,01
Angkatan Kerja	4995,61	4955,54	-40,07
a. Bekerja	4748,49	4724,69	-23,80
b. Menganggur	247,12	230,85	-16,27
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,59%	66,83%	-0,76%
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,95%	4,66%	-0,29%

Sumber: BPS

Grafik 5.1. Penduduk Bekerja Menurut Kegiatan



Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan status pekerjaan utama, tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi kelompok sektor formal⁷ dan sektor informal⁸. Pada Mei 2026, penduduk bekerja pada kegiatan sektor informal sebanyak 2,96 juta orang atau 62,64%, sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 1,76 juta orang atau 37,36%. Jika dibandingkan Februari 2026, persentase penduduk bekerja pada kegiatan formal mengalami penurunan 0,49 persen poin (Grafik 5.1). Sebaliknya, tenaga kerja informal pada Mei 2026 meningkat 0,49 persen poin dibandingkan dengan periode Februari 2026.

5.1.2. Pengangguran

Sejalan dengan perkembangan ekonomi Sulawesi Selatan yang tumbuh, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 terpantau menurun. Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan menurun sebesar 0,29% dibandingkan dengan Februari 2026. Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan pada Mei 2026 sebesar 4,66%, atau dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar empat orang penganggur. Penurunan TPT sejalan dengan peningkatan pada penduduk usia kerja sebesar 24 ribu orang jika dibandingkan dengan Februari 2026.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi

6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

8. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal merupakan penduduk yang berstatus berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai.

9. Penduduk kegiatan informal merupakan penduduk yang melakukan kegiatan usaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga/tak dibayar

Tabel 5.2 Lapangan Pekerjaan Utama

Lapangan Pekerjaan Utama	Februari 2026			Mei 2026		
	Jumlah (ribu)	Pangsa	Growth (yoy)	Jumlah (ribu)	Pangsa	Growth (yoy)
A Pertanian	1.617,36	34,06%	4,03%	1.811,01	38,33%	11,97%
B Pertambangan	41,03	0,86%	-10,77%	37,04	0,78%	-9,72%
C Industri Pengolahan	371,44	7,82%	29,73%	364,81	7,72%	-1,78%
D Pengadaan Listrik dan Gas	12,69	0,27%	-30,96%	23,17	0,49%	82,58%
E Pengadaan Air	5,07	0,11%	-56,56%	14,88	0,31%	193,49%
F Konstruksi	288,97	6,09%	1,09%	275,79	5,84%	-4,56%
G Perdagangan Besar dan Eceran	887,30	18,69%	-2,03%	796,13	16,85%	-10,27%
H Transportasi dan Pergudangan	181,04	3,81%	-12,00%	191,06	4,04%	5,53%
I Penyediaan Akomodasi	261,74	5,51%	-12,11%	261,50	5,53%	-0,09%
J Informasi dan Komunikasi	56,83	1,20%	6,88%	22,93	0,49%	-59,65%
K Jasa Keuangan dan Asuransi	97,63	2,06%	80,00%	60,47	1,28%	-38,06%
L Real Estate	27,19	0,57%	51,98%	10,65	0,23%	-60,83%
M,N Jasa Perusahaan	75,79	1,60%	18,63%	56,33	1,19%	-25,68%
O Administrasi Pemerintahan	250,48	5,28%	-1,35%	240,68	5,09%	-3,91%
P Jasa Pendidikan	284,88	6,00%	3,44%	295,83	6,26%	3,84%
Q Jasa Kesehatan	119,37	2,51%	15,98%	99,25	2,10%	-16,86%
R,S,T,U Jasa Lainnya	169,69	3,57%	18,58%	163,17	3,45%	-3,84%
Total	4.748,50	100,00%	454,01%	4.724,69	100,00%	-0,50%

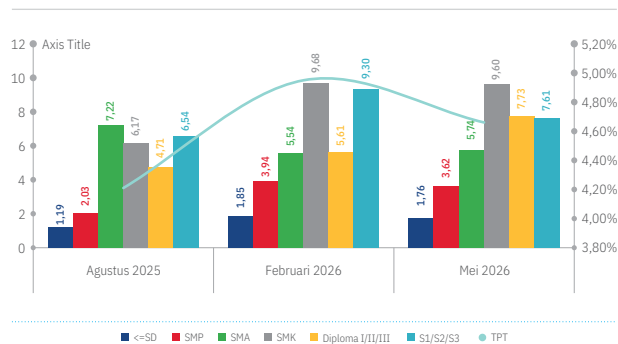
Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan lapangan usaha, sektor pertanian, sektor jasa Pendidikan, serta sektor pengadaan listrik dan gas menjadi sektor lapangan usaha yang berkontribusi pada penurunan TPT pada periode Mei 2026 yang menyumbang pertambahan pekerja sebanyak masing-masing 193 ribu orang, 10,95 ribu orang, dan 10,48 ribu orang.

Berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, nilai TPT terendah terjadi pada tingkat Sekolah Dasar (SD) ke bawah sebesar 1,76%. Sementara itu, nilai TPT tertinggi pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa serapan tenaga kerja di Sulawesi Selatan pada periode laporan sebagian besar bersumber dari penduduk pendidikan dasar hingga sekolah menengah pertama. Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I/II/III, dan S1/S2/S3 merupakan tiga besar tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang nilainya masing-masing sebesar 9,60%, 7,73%, dan 7,61%. Nilai TPT yang mengalami peningkatan tertinggi ada pada tingkat Diploma I/II/III dan tingkat Sekolah Menengah Atas, yaitu masing-masing sebesar 2,12% dan 0,20% dibandingkan Februari 2026. Sementara itu, penurunan pengangguran terbesar adalah tamatan S1/S2/S3, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Dasar yaitu sebesar 1,69%, 0,32% dan 0,09% pada Februari 2026 (Grafik 5.2).

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas ketenagakerjaan guna mendorong peningkatan partisipasi angkatan kerja di Sulawesi Selatan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui perluasan akses informasi pasar kerja melalui penyelenggaraan *job fair* oleh Pemerintah Daerah, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Selain itu, penguatan kualitas tenaga kerja turut didukung oleh implementasi Program Magang Nasional dan Vokasi Nasional melalui Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP)

Grafik 5.2. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan

Sumber: BPS, diolah

Makassar yang telah berjalan sejak tahun 2025. Program tersebut berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja berbasis kebutuhan industri, peningkatan pengalaman kerja, serta penguatan keterhubungan antara pencari kerja dan dunia usaha (*link and match*), sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesiapan kerja dan mendorong penyerapan tenaga kerja.

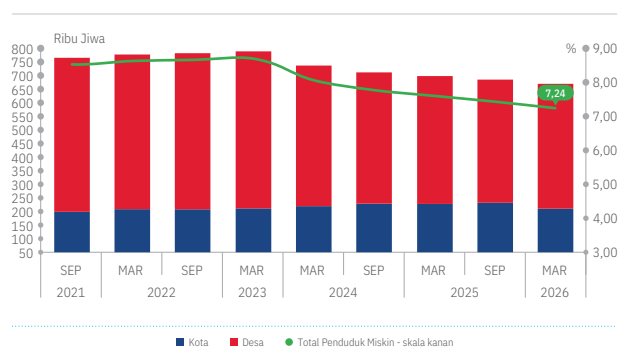
Dari sisi penciptaan kesempatan kerja, implementasi program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) juga diperkirakan turut memberikan dampak positif terhadap pasar tenaga kerja. Operasionalisasi program tersebut berpotensi mendorong kebutuhan tenaga kerja baru melalui pembentukan ekosistem pendukung, terutama pada aktivitas penyediaan pangan, distribusi, logistik, UMKM, serta kegiatan ekonomi lokal.

Kesejahteraan

Tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan pada periode Maret 2026 sebesar 7,24% menurun 2,56% terhadap September 2025. Tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan pada Maret 2026 mengalami penurunan dalam empat kali berturut-turut, yakni sebesar 7,24% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 669 ribu orang. Tren kemiskinan terus menunjukkan penurunan sejak Maret 2024. Kondisi ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang kuat karena angka kemiskinan saat ini sudah jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelum pandemi di Maret 2020. Penurunan tingkat kemiskinan pada Maret 2026 ini dipengaruhi oleh perekonomian Sulsel pada triwulan II 2026 yang tumbuh positif 6,88% (yoy).

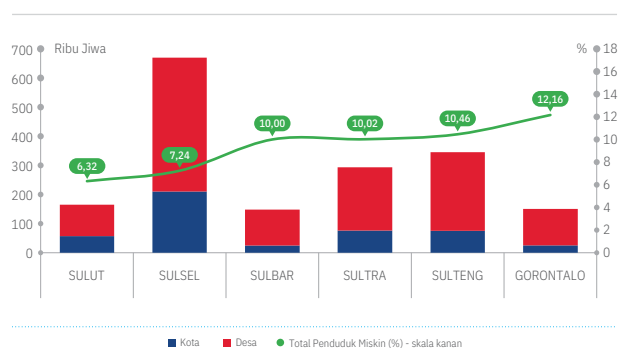
Berdasarkan tempat tinggal, jumlah penduduk miskin pada periode September 2025 hingga Maret 2026 mengalami penurunan di perkotaan namun naik di daerah pedesaan. Jumlah penduduk miskin perkotaan turun 21 ribu orang atau menjadi 210,43 ribu orang dengan persentase penurunan penduduk miskin sebesar 9,30%, sedangkan jumlah penduduk pedesaan meningkat 6,07 ribu orang atau menjadi 459,20 ribu orang dengan persentase peningkatan sebesar 1,34%. Tingkat kemiskinan yang menurun juga sejalan dengan perkembangan indeks harga konsumen pada Maret 2026 yang mengalami inflasi 2,11% (ytd), masih dalam kategori terkendali dan dalam rentang sasaran nasional. Hal ini juga didukung oleh peningkatan kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang juga mengalami inflasi sebesar 4,79% (ytd). Gambaran ini mencerminkan peningkatan daya beli dan perbaikan pasar tenaga kerja yang membaik dimana TPT pada Februari 2026 menurun 0,50% jika dibandingkan pada periode November 2025.

Grafik 5.3. Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi Selatan



Sumber: BPS, diolah

Grafik 5.4. Jumlah Penduduk Miskin Sulawesi

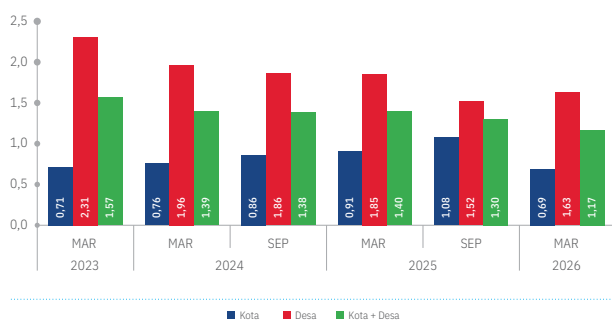


Sumber: BPS, diolah

5.2. Kemiskinan dan Kesenjangan

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Maret 2026 adalah 669,63 ribu orang, menurun 15 ribu orang terhadap September 2025. Perkembangan jumlah penduduk miskin juga menurun 28,50 ribu orang jika dibandingkan terhadap Maret 2025 (Grafik 5.3). Berdasarkan hal tersebut, persentase penduduk miskin Sulawesi Selatan pada Maret 2026 tercatat sebesar 7,24%, menurun 2,56% terhadap September 2025 dan terhadap Maret 2025 juga mengalami penurunan 4,74%.

Perkembangan tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan berfluktuasi pada periode September 2018 hingga Maret 2023 dan mulai konsisten menurun dari Maret 2024 sampai Maret 2026. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan harga barang dan bahan pokok. Sementara itu, kenaikan jumlah penduduk miskin pada periode 2021-2022 disebabkan adanya pandemi Covid-19. Pada Maret 2026, Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan, komoditas makanan yang memberikan sumbangan 75,43% terhadap garis kemiskinan sedangkan komoditi bukan makanan menyumbang 24,57%. Beras menjadi penyumbang terbesar terhadap garis kemiskinan dari komoditas makanan, yakni sebesar 23,02% di perkotaan dan 26,34% di pedesaan, disusul rokok kretek filter

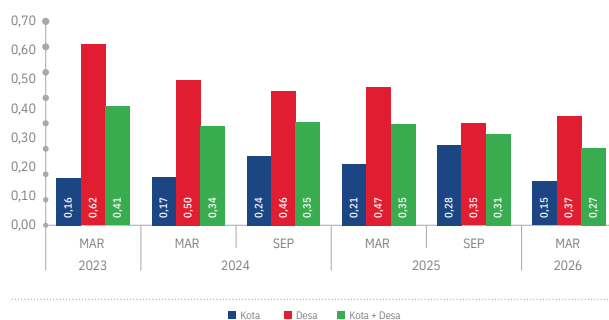
Grafik 5.5. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Sumber: BPS, diolah

menjadi penyumbang kedua terbesar terhadap garis kemiskinan, yakni 11,17% di perkotaan dan 12,23% di pedesaan. Komoditas lainnya adalah telur ayam ras (4,33% di perkotaan dan 3,58% di pedesaan), ikan bandeng (3,61% di perkotaan dan 3,58% di pedesaan) serta mie instan (2,60% di perkotaan dan 2,04% di pedesaan) sedangkan komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terhadap garis kemiskinan terbesar, baik pada garis kemiskinan di perkotaan dan pedesaan adalah jenis komoditi perumahan, bensin, listrik, pendidikan, perlengkapan mandi, perawatan kulit, dan sabun cuci.

Persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada Maret 2026 masih berada pada urutan kedua terendah setelah Sulawesi Utara, jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau Sulawesi. Persentase jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan tercatat 7,24% sedangkan persentase jumlah penduduk miskin di Sulawesi Utara tercatat 6,32% (Grafik 5.4). Di sisi lain, persentase jumlah penduduk miskin tertinggi untuk wilayah Sulawesi berada di Provinsi Gorontalo yang tercatat sebesar 12,16%. Namun dari sisi jumlah, Sulawesi Selatan memiliki jumlah penduduk miskin terbesar di wilayah Pulau Sulawesi, yaitu sebanyak 669,63 ribu orang.

Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2026 mengalami penurunan dan Indeks Keparahan Kemiskinan tercatat juga cenderung menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar 1,17 turun dibandingkan September 2025 yang sebesar 1,30 atau turun 0,13 poin (Grafik 5.5). Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan pada

Grafik 5.6. Indeks Keparahan Kemiskinan

Sumber: BPS, diolah

Maret 2026 menurun dibandingkan kondisi September 2025 yang turun sebesar 0,05 poin. Penurunan tersebut menggambarkan berkurangnya tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin dan meskipun tingkat kemiskinan membaik tantangan kemiskinan di wilayah pedesaan masih relatif lebih dalam dan lebih berat dibandingkan daerah perkotaan (Grafik 5.6). Tingginya proporsi tenaga kerja yang terserap pada LU Pertanian, yaitu 38,33% pada Mei 2026, memperlihatkan bahwa pada sektor lapangan usaha ini belum memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat pedesaan dan belum memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Secara spasial, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Sulawesi Selatan di daerah pedesaan memiliki angka yang tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan. Hal tersebut sejalan dengan komposisi jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan yang mayoritas masih berada di daerah pedesaan.

Pada Maret 2026, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan daerah perkotaan dan pedesaan masing-masing bernilai 0,69 dan 1,63. Sedangkan nilai Indeks Keparahan Kemiskinan daerah perkotaan dan pedesaan pada Maret 2026 masing-masing bernilai 0,15 dan 0,37. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kondisi rata-rata pengeluaran dan ketimpangan pengeluaran di daerah perkotaan lebih kecil dibandingkan daerah pedesaan. Dengan kata lain, penduduk di daerah perkotaan di Sulawesi Selatan mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya lebih baik karena memiliki banyak pilihan serta memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan tersebut. Dengan pembangunan desa yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja di wilayah pedesaan, kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan akan semakin kecil.

Pada Maret 2026, tingkat kesenjangan pengeluaran penduduk Sulawesi Selatan yang diukur dengan *Gini Ratio* adalah sebesar 0,36 (Tabel 5.3). *Gini Ratio* di daerah perkotaan Sulawesi Selatan pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,360 atau turun 0,003 poin dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,363 dan *Gini Ratio* di daerah pedesaan tercatat sebesar 0,332 pada Maret

Tabel 5.3 Gini Ratio Sulawesi

Provinsi	2024		2025		2026
	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar
Sulawesi Selatan	0,36	0,36	0,36	0,35	0,36
Gorontalo	0,41	0,41	0,39	0,38	0,38
Sulawesi Tenggara	0,37	0,37	0,36	0,36	0,36
Sulawesi Utara	0,36	0,35	0,34	0,34	0,34
Sulawesi Tengah	0,30	0,31	0,28	0,28	0,28
Sulawesi Barat	0,35	0,33	0,32	0,31	0,31

Sumber: BPS

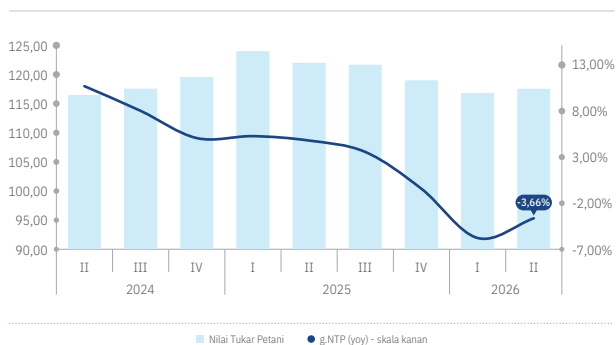
Tabel 5.4 IPM Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Komponen Penyusunnya

Komponen	Satuan	2024	2025
Umur Panjang dan Hidup Sehat			
Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73,83	74,15
Pengetahuan			
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,55	13,56
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,86	9,00
Standar Hidup Layak			
Pengeluaran per Kapita Yang Disesuaikan (PPP)	Rp 000	12.275	12.773
IPM		75,18	75,92

Sumber: BPS

2026 meningkat 0,017 poin dibandingkan September 2025 sebesar 0,315. Perbedaan Gini Ratio antara daerah perkotaan dan pedesaan di Sulawesi Selatan disebabkan oleh peluang usaha yang berbeda terutama di daerah pedesaan yang masih belum memiliki infrastruktur perekonomian yang cukup baik jika dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan pada tahun 2025 mencapai angka 75,92 meningkat 0,98% dibandingkan capaian tahun 2024 yang berada di angka 75,18. Perkembangan kualitas manusia di Sulawesi Selatan terus mengalami kemajuan. Sejak 2020, status pembangunan manusia Sulawesi Selatan sudah berada di level yang tergolong tinggi. Selama periode 2020-2025, IPM Sulawesi Selatan rata-rata meningkat sebesar 0,77% per tahun, dari 73,08 pada tahun 2020 menjadi 75,92 pada 2025. Peningkatan IPM Sulawesi Selatan 2025 didukung oleh komponen penyusunnya terutama standar hidup layak (Tabel 5.4). Indikator yang mengalami percepatan pertumbuhan adalah pengeluaran riil per kapita. Hal yang sama terjadi pada indikator Umur Harapan Hidup (UHH) yang bertumbuh begitu juga dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS).

Grafik 5.7. Perkembangan NTP Sulawesi Selatan

Sumber: BPS, diolah

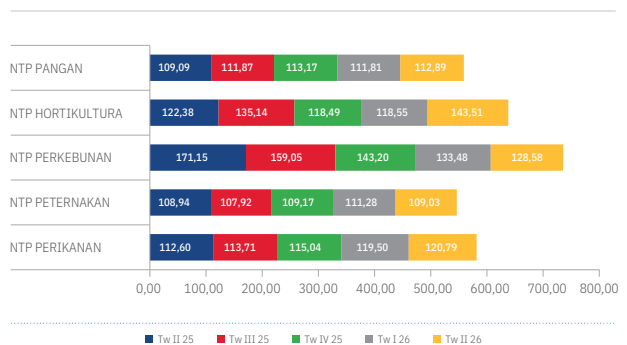
5.2.1. Kesejahteraan Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tercatat berkontraksi 3,66% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Hal ini terkonfirmasi melalui Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 yang tercatat sebesar 117,54 (Grafik 5.7). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan dan daya beli petani sedikit menurun pada triwulan II. Nilai tukar petani yang menurun ini menggambarkan penurunan kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga petani baik untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi pertanian.

Secara sektoral, NTP di sektor Perkebunan pada triwulan II 2026 tercatat menurun sebesar 3,67% (qtq) dibandingkan dengan triwulan I 2026. Hal yang sama terjadi pada NTP sektor Peternakan yang mengalami penurunan sebesar 2,02% (qtq). Sementara itu, NTP sektor Hortikultura meningkat signifikan sebesar 21,05% atau menjadi 143,51 pada triwulan II 2026 dan sektor Perikanan meningkat sebesar 1,08% atau menjadi 120,79 pada triwulan II 2026 (Grafik 5.8).

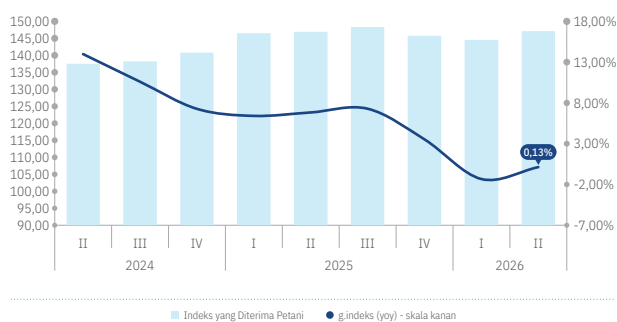
Pada triwulan II 2026, rata-rata indeks yang diterima petani di Sulawesi Selatan sebesar 147,11 meningkat 1,77% (qtq) dibanding dengan triwulan I 2026 dan meningkat 0,13% dibanding dengan periode yang sama di tahun sebelumnya (Grafik 5.9). Di sisi lain, rata-rata indeks yang dibayar petani di Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 adalah sebesar 125,16 atau tumbuh meningkat 3,92% dibandingkan triwulan II 2025 dan meningkat sebesar 1,15% dibandingkan triwulan I 2026 (Grafik 5.10).

Berdasarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja, lapangan usaha (LU) sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi LU yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Sulawesi Selatan sebesar 38,33%. Namun di sisi lain, penduduk miskin di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh penduduk di daerah pedesaan. Oleh karena itu, perlu upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, antara lain melalui upaya peningkatan kapasitas petani dan nelayan untuk

Grafik 5.8. Perkembangan NTP Menurut Lapangan Usaha

Sumber: BPS, diolah

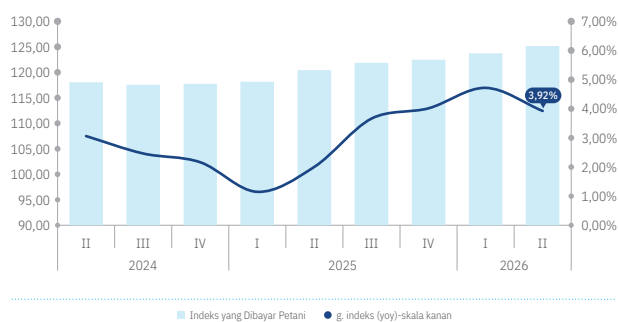
Grafik 5.9. Perkembangan Rata-rata Indeks yang Diterima Petani



Sumber: BPS, diolah

mendorong produktivitas dan efisiensi. Selain itu, upaya pengendalian inflasi pada kelompok pengeluaran komoditas makanan, minuman, dan tembakau perlu menjadi fokus perhatian dari seluruh pihak pemangku kebijakan. Hal ini mengingat komoditas pada kelompok tersebut menjadi penyumbang terbesar pada indeks harga konsumen yang yang berisiko menahan penurunan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Peran Pemerintah Daerah menjadi penting dalam mendorong dan mengawasi efektivitas pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.

Grafik 5.10. Perkembangan Rata-rata Indeks yang Dibayar Petani



Sumber: BPS, diolah



Prospek Perekonomian Daerah



Ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dalam rentang 5,4%–6,2% (yoy), terutama ditopang oleh kuatnya permintaan domestik dan berlanjutnya investasi. Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah diperkirakan meningkat, didukung daya beli dan pendapatan masyarakat yang tetap terjaga serta peningkatan belanja pemerintah. PMTB juga diperkirakan meningkat sejalan dengan keberlanjutan proyek pemerintah dan swasta. Sementara itu, ekspor luar negeri diperkirakan melambat akibat tertahannya kinerja komoditas utama, sedangkan impor meningkat sejalan dengan kuatnya permintaan domestik dan aktivitas investasi.



Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan terutama ditopang oleh LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, dan LU Konstruksi yang diperkirakan meningkat, didukung permintaan domestik, aktivitas produksi dan distribusi, serta keberlanjutan proyek pemerintah dan swasta. Sementara itu, LU Pertanian dan LU Pertambangan diperkirakan melambat, masing-masing sejalan dengan normalisasi produksi tanaman pangan dan penyesuaian produksi nikel.

Tekanan inflasi Sulawesi Selatan tahun 2026 diperkirakan lebih rendah dibandingkan 2025 dan tetap berada dalam rentang sasaran nasional $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Peningkatan permintaan domestik seiring terjaganya daya beli, kenaikan harga energi nonsubsidi, serta potensi *imported inflation* menjadi pendorong utama, namun tekanan inflasi diperkirakan tertahan oleh perbaikan produksi pertanian, penguatan cadangan pangan, kebijakan stabilisasi harga, serta moderasi harga komoditas global. Sinergi pengendalian inflasi melalui TPID dalam kerangka 4K terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga

6.1. Prospek Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sulawesi Selatan pada tahun 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2025 dan berada dalam rentang 5,4%–6,2% (yoy) (Grafik 6.1). Pertumbuhan terutama ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik dan berlanjutnya aktivitas investasi. Dari sisi pengeluaran, peningkatan terutama didukung oleh Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, dan PMTB, sementara dari sisi lapangan usaha ditopang oleh LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, dan LU Perdagangan. Namun demikian, akselerasi pertumbuhan diperkirakan tertahan oleh perlambatan ekspor serta kinerja LU Pertanian dan LU Pertambangan.

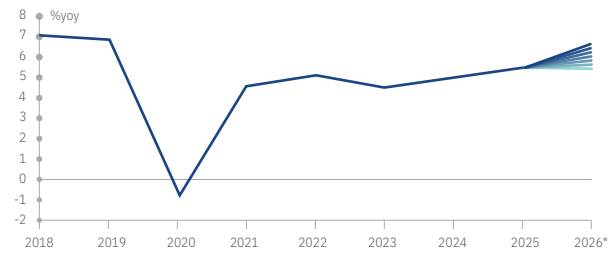
Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan meningkat didukung oleh daya beli masyarakat yang tetap terjaga, peningkatan pendapatan, optimisme konsumen, serta dukungan pembiayaan konsumsi. Dukungan program perlindungan sosial pemerintah turut menopang ketahanan konsumsi masyarakat sepanjang tahun. Konsumsi Pemerintah juga diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah secara tahunan, terutama melalui belanja operasional dan belanja barang. Sementara itu, PMTB diperkirakan menguat didukung oleh berlanjutnya aktivitas investasi serta pembangunan proyek pemerintah dan swasta.

Dari sisi eksternal, ekspor luar negeri diperkirakan melambat seiring tertahannya kinerja sejumlah komoditas utama, baik tambang maupun non-tambang, di tengah dinamika permintaan eksternal dan harga komoditas global. Sementara itu, impor luar negeri diperkirakan meningkat sejalan dengan kebutuhan konsumsi domestik dan aktivitas distribusi barang, serta berlanjutnya aktivitas investasi dan konstruksi.

Dari sisi lapangan usaha, LU Industri Pengolahan diperkirakan meningkat didukung oleh tetap kuatnya permintaan domestik serta aktivitas LU Konstruksi dan LU Perdagangan yang menopang kegiatan produksi. LU Konstruksi diperkirakan meningkat sejalan dengan keberlanjutan proyek multiyears dan proyek swasta. Sejalan dengan itu, LU Perdagangan diperkirakan meningkat didukung oleh konsumsi rumah tangga dan aktivitas distribusi barang yang tetap kuat sepanjang tahun.

Di sisi lain, LU Pertanian diperkirakan melambat sejalan dengan normalisasi produksi pascapanen raya dan perkembangan produksi tanaman pangan. LU Pertambangan juga diperkirakan melambat, terutama dipengaruhi oleh penyesuaian produksi nikel terkait kuota RKAB 2026. Perkembangan LU Pertanian dan LU Pertambangan tersebut diperkirakan menahan akselerasi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2026.

Grafik 6.1. Perkembangan dan Proyeksi PDRB Sulawesi Selatan



Sumber: BPS, diolah
*) Proyeksi Bank Indonesia Sulsel

Prospek Sisi Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2026 diperkirakan tetap ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, terutama Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Konsumsi masyarakat diperkirakan tetap terjaga, sementara aktivitas investasi meningkat sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek pemerintah dan swasta. Dari sisi eksternal, ekspor luar negeri diperkirakan melambat, sedangkan impor luar negeri diperkirakan meningkat sejalan dengan perkembangan permintaan domestik dan aktivitas investasi. Arah tersebut konsisten dengan prospek perekonomian Sulawesi Selatan 2026 yang terutama ditopang konsumsi dan investasi.

Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2025, didukung oleh daya beli masyarakat yang tetap terjaga, peningkatan pendapatan, serta optimisme konsumen yang masih berada pada level optimis. Dukungan pembiayaan konsumsi dan keberlanjutan program perlindungan sosial pemerintah turut menjaga ketahanan konsumsi masyarakat sepanjang tahun. Prospek tersebut juga didukung perkembangan terkini, antara lain kredit konsumsi yang tetap tumbuh positif serta peningkatan produksi padi pada triwulan III 2026 yang berpotensi menopang pendapatan rumah tangga pertanian. Dengan perkembangan tersebut, Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan tetap menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2026.

Konsumsi Pemerintah diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah secara tahunan. Peningkatan terutama didukung oleh realisasi belanja operasional dan belanja barang, serta keberlanjutan pelaksanaan program prioritas pemerintah. Perkembangan realisasi belanja hingga pertengahan tahun juga menunjukkan

aktivitas fiskal pemerintah yang tetap kuat, sehingga diperkirakan turut menopang aktivitas ekonomi daerah sepanjang tahun 2026.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh berlanjutnya aktivitas investasi serta pembangunan proyek pemerintah dan swasta. Arah penguatan tersebut telah tercermin dari kinerja PMTB pada triwulan II 2026 dan diperkirakan berlanjut pada paruh kedua tahun seiring keberlanjutan proyek multiyears dan proyek swasta. Prospek tersebut turut didukung oleh perkembangan investasi serta pembiayaan investasi yang tetap positif. Berlanjutnya aktivitas konstruksi juga diperkirakan menjaga kebutuhan barang modal dan mendukung kinerja PMTB sepanjang tahun 2026. Secara umum, investasi memang menjadi salah satu penopang utama prospek ekonomi wilayah pada tahun 2026.

Dari sisi eksternal, ekspor luar negeri Sulawesi Selatan pada tahun 2026 diperkirakan melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh tertahannya kinerja sejumlah komoditas utama, baik tambang maupun non-tambang, di tengah dinamika permintaan negara mitra dagang dan harga komoditas global. Dari sisi domestik, penyesuaian produksi komoditas utama, terutama nikel, turut menahan kinerja ekspor sepanjang tahun. Meski terdapat indikasi perbaikan kinerja ekspor pada triwulan III 2026, perkembangan tersebut diperkirakan belum mengubah arah perlambatan ekspor secara keseluruhan pada tahun 2026.

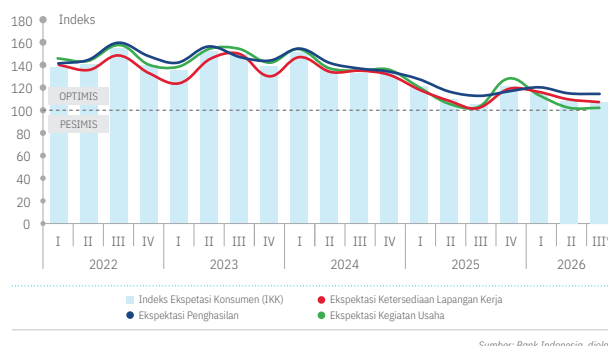
Sementara itu, impor luar negeri diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2025, sejalan dengan tetap kuatnya permintaan domestik dan aktivitas distribusi barang. Prospek peningkatan Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan menjaga kebutuhan barang konsumsi, sementara penguatan PMTB dan LU Konstruksi turut menjaga kebutuhan barang modal untuk mendukung aktivitas investasi. Dengan demikian, peningkatan impor pada tahun 2026 diperkirakan berlangsung sejalan dengan aktivitas konsumsi, distribusi, dan investasi yang tetap kuat.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dari sisi pengeluaran pada tahun 2026 diperkirakan tetap ditopang oleh permintaan domestik, terutama Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, dan PMTB. Di sisi lain, perlambatan ekspor diperkirakan menjadi faktor penahan pertumbuhan, sementara peningkatan impor berlangsung sejalan dengan kuatnya aktivitas ekonomi domestik.

Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi Rumah Tangga Sulawesi Selatan pada tahun 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh daya beli masyarakat yang tetap terjaga,

Grafik 6.2. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)



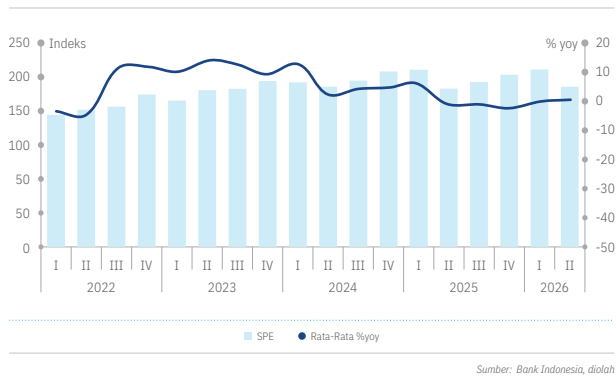
Sumber: Bank Indonesia, diolah

peningkatan pendapatan, serta dukungan kebijakan pemerintah dalam menjaga konsumsi. Keberlanjutan program perlindungan sosial pemerintah diperkirakan turut menjaga ketahanan konsumsi masyarakat sepanjang tahun. Selain itu, peningkatan produksi tanaman pangan pada paruh kedua 2026 berpotensi menopang pendapatan rumah tangga pertanian dan memberikan dukungan tambahan terhadap konsumsi masyarakat.

Prospek peningkatan Konsumsi Rumah Tangga turut didukung oleh keyakinan konsumen yang masih berada pada zona optimis. Pada triwulan III 2026, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat sebesar 105,2, dengan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) sebesar 101,2 dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) sebesar 109,3. Meskipun termoderasi, seluruh indeks tetap berada di atas level 100, menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi ke depan yang masih positif. Kondisi tersebut diperkirakan mendukung keberlanjutan aktivitas konsumsi masyarakat hingga akhir tahun 2026 (Grafik 6.2).

Aktivitas penjualan eceran yang tetap berlangsung turut mendukung prospek konsumsi masyarakat pada tahun 2026. Perkembangan Indeks Penjualan Riil (IPR) pada triwulan III 2026 menunjukkan permintaan masyarakat yang tetap terjaga pada paruh kedua tahun. Kondisi tersebut, sejalan dengan optimisme konsumen yang masih positif, diperkirakan mendukung peningkatan Konsumsi Rumah Tangga secara keseluruhan pada tahun 2026 (Grafik 6.3).

Secara keseluruhan, Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2026 diperkirakan meningkat dan tetap menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Prospek tersebut didukung oleh daya beli dan pendapatan masyarakat yang tetap terjaga, optimisme konsumen yang masih positif, serta aktivitas penjualan eceran yang tetap berlangsung. Perkembangan tersebut diperkirakan menjaga ketahanan permintaan rumah tangga dan menopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2026.

Grafik 6.3. Indeks Penjualan Riil

Konsumsi Pemerintah

Konsumsi Pemerintah Sulawesi Selatan pada tahun 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh peningkatan realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah secara tahunan. Prospek tersebut terutama sejalan dengan peningkatan belanja operasional dan belanja barang, serta berlanjutnya pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Perkembangan tersebut diperkirakan menjaga peran Konsumsi Pemerintah dalam menopang aktivitas ekonomi Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2026.

Prospek peningkatan Konsumsi Pemerintah didukung oleh kinerja belanja pemerintah pusat yang tetap kuat. Peningkatan belanja terutama ditopang oleh belanja pegawai dan belanja barang, sejalan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan program prioritas. Meskipun sebagian belanja pemerintah telah terealisasi lebih awal pada semester I, secara keseluruhan kinerja belanja pemerintah diperkirakan tetap meningkat secara tahunan dan mendukung Konsumsi Pemerintah pada 2026.

Dukungan fiskal pemerintah daerah juga diperkirakan tetap berlanjut, terutama melalui belanja operasi dan belanja barang. Penyaluran Transfer ke Daerah turut mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan publik dan pelaksanaan program pemerintah. Keberlanjutan realisasi belanja daerah tersebut diperkirakan turut menjaga aktivitas Konsumsi Pemerintah sepanjang tahun 2026.

Selain itu, pelaksanaan program prioritas pemerintah diperkirakan turut menopang Konsumsi Pemerintah, termasuk program di bidang perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Keberlanjutan berbagai program tersebut diperkirakan menjaga aktivitas belanja pemerintah sekaligus memberikan dukungan terhadap permintaan domestik.

Secara keseluruhan, Konsumsi Pemerintah pada tahun 2026 diperkirakan meningkat, ditopang oleh peningkatan belanja pemerintah pusat dan daerah serta keberlanjutan program prioritas pemerintah. Perkembangan tersebut diperkirakan

menjaga kontribusi Konsumsi Pemerintah dalam menopang permintaan domestik dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2026.

Investasi

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Sulawesi Selatan pada tahun 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, didukung oleh berlanjutnya aktivitas investasi serta pembangunan proyek pemerintah dan swasta. Peningkatan terutama ditopang oleh keberlanjutan investasi bangunan sejalan dengan pembangunan infrastruktur dan proyek konstruksi, serta investasi nonbangunan untuk mendukung peningkatan kapasitas usaha. Perkembangan tersebut diperkirakan menjaga PMTB sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2026.

Prospek peningkatan investasi bangunan tetap kuat sejalan dengan berlanjutnya pembangunan proyek multiyears dan proyek swasta pada paruh kedua tahun 2026. Perkembangan terkini menunjukkan keberlanjutan sejumlah proyek pembangunan, termasuk pembangunan fasilitas kesehatan, infrastruktur konektivitas, dan kawasan perumahan. Berlanjutnya aktivitas pembangunan tersebut diperkirakan menjaga kebutuhan material bangunan dan aktivitas konstruksi hingga akhir tahun, sejalan dengan prospek LU Konstruksi yang juga diperkirakan meningkat.

Investasi nonbangunan juga diperkirakan tetap terjaga, sejalan dengan kebutuhan dunia usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas produksi. Prospek tersebut turut didukung oleh berlanjutnya realisasi investasi pemerintah dan swasta serta kebutuhan barang modal untuk mendukung aktivitas usaha. Kondisi permintaan domestik yang tetap kuat juga diperkirakan memberikan dukungan terhadap keberlanjutan investasi sepanjang tahun 2026.

Dari sisi pembiayaan, dukungan intermediasi perbankan diperkirakan turut menopang aktivitas investasi. Kebijakan makroprudensial yang tetap akomodatif dan diarahkan untuk mendorong penyaluran kredit ke sektor prioritas memberikan dukungan bagi pembiayaan kegiatan produktif dan investasi. Secara nasional, pertumbuhan kredit juga terus meningkat hingga Juli 2026, menunjukkan dukungan intermediasi perbankan terhadap aktivitas ekonomi yang tetap kuat.

Secara keseluruhan, PMTB pada tahun 2026 diperkirakan meningkat, ditopang oleh keberlanjutan proyek pemerintah dan swasta, aktivitas konstruksi, investasi nonbangunan, serta dukungan pembiayaan. Perkembangan tersebut diperkirakan menjaga investasi sebagai salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2026.

Ekspor-Impor

Kinerja ekspor luar negeri Sulawesi Selatan pada tahun 2026 diperkirakan melambat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dipengaruhi oleh tertahannya kinerja sejumlah komoditas utama, baik komoditas tambang maupun non-tambang. Dari sisi komoditas tambang, penyesuaian produksi nikel sejalan dengan penurunan kuota produksi dalam RKAB 2026 diperkirakan membatasi ruang peningkatan ekspor. Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan ekspor Sulawesi Selatan sepanjang 2026 yang masih lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain faktor domestik, prospek ekspor juga dipengaruhi oleh dinamika permintaan negara mitra dagang dan perkembangan harga komoditas global. Ketidakpastian perekonomian global berpotensi menahan permintaan terhadap sejumlah komoditas ekspor utama Sulawesi Selatan. Meski demikian, permintaan terhadap beberapa komoditas unggulan daerah diperkirakan tetap memberikan dukungan dan menahan perlambatan ekspor lebih lanjut. Dengan perkembangan tersebut, secara keseluruhan kinerja ekspor luar negeri Sulawesi Selatan pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Arah perlambatan tersebut juga tercermin dari kinerja ekspor Sulawesi Selatan yang masih terkontraksi hingga Triwulan II 2026, terutama pada komoditas utama seperti nikel serta besi dan baja.

Sementara itu, impor luar negeri Sulawesi Selatan pada tahun 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan tetap kuatnya permintaan domestik dan aktivitas distribusi barang. Peningkatan konsumsi rumah tangga diperkirakan menjaga kebutuhan barang konsumsi, sementara berlanjutnya aktivitas produksi dan distribusi turut menjaga kebutuhan input usaha. Perkembangan tersebut sejalan dengan prospek permintaan domestik yang tetap menjadi penopang utama perekonomian Sulawesi Selatan pada 2026.

Peningkatan impor juga diperkirakan didukung oleh menguatnya aktivitas investasi dan konstruksi. Prospek PMTB yang meningkat sejalan dengan keberlanjutan proyek pemerintah dan swasta diperkirakan menjaga kebutuhan barang modal untuk mendukung aktivitas investasi dan peningkatan kapasitas produksi. Dengan demikian, peningkatan impor pada tahun 2026 diperkirakan berlangsung sejalan dengan menguatnya konsumsi, aktivitas produksi, dan investasi domestik.

Secara keseluruhan, kinerja sektor eksternal Sulawesi Selatan pada tahun 2026 diperkirakan ditandai oleh perlambatan ekspor dan peningkatan impor. Ekspor terutama tertahan oleh penyesuaian produksi komoditas utama serta dinamika permintaan eksternal dan harga komoditas global. Sebaliknya, impor diperkirakan meningkat sejalan dengan kuatnya

permintaan domestik serta meningkatnya aktivitas investasi dan konstruksi. Perkembangan tersebut konsisten dengan struktur pertumbuhan Sulawesi Selatan pada 2026 yang lebih banyak ditopang oleh permintaan domestik.

Prospek Sisi Lapangan Usaha

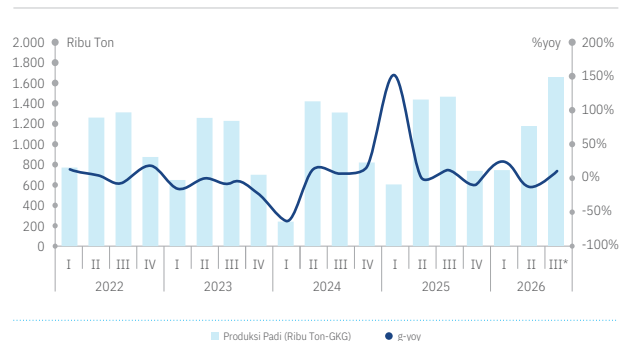
Kinerja LU Pertanian Sulawesi Selatan pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif, namun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Perlambatan terutama dipengaruhi oleh normalisasi produksi tanaman pangan setelah tingginya produksi pada tahun 2025. Produksi padi Sulawesi Selatan pada 2025 tercatat meningkat 13,45% (yoy), sehingga membentuk basis produksi yang relatif tinggi pada 2026. Meski demikian, perbaikan produksi tanaman pangan pada paruh kedua tahun diperkirakan menahan perlambatan LU Pertanian lebih lanjut.

Perkembangan produksi padi pada triwulan III 2026 menunjukkan perbaikan setelah mengalami penurunan pada triwulan sebelumnya. Berdasarkan angka sementara KSA BPS, produksi padi pada triwulan III 2026 diperkirakan tumbuh sebesar 13,14% (yoy), disertai peningkatan luas panen sebesar 10,32% (yoy). Perbaikan tersebut mengindikasikan meningkatnya aktivitas produksi tanaman pangan pada paruh kedua tahun dan diperkirakan menjadi faktor penahan perlambatan LU Pertanian pada 2026 (Grafik 6.4).

Namun demikian, perbaikan produksi padi pada paruh kedua tahun diperkirakan belum mengubah arah perlambatan LU Pertanian secara keseluruhan pada 2026, terutama mempertimbangkan normalisasi setelah tingginya produksi tanaman pangan pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, perbaikan produksi pada triwulan III lebih berperan dalam menahan perlambatan, alih-alih mendorong akselerasi LU Pertanian secara tahunan.

Secara keseluruhan, LU Pertanian pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh positif, namun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Normalisasi produksi setelah tingginya capaian

Grafik 6.4. Produksi Padi



Sumber: Dinas TPHBun, diolah

tahun 2025 menjadi faktor utama yang menahan pertumbuhan, sementara perbaikan produksi padi pada paruh kedua tahun diperkirakan menjaga kinerja LU Pertanian tetap positif sepanjang 2026.

Kinerja LU Pertambangan Sulawesi Selatan pada tahun 2026 diperkirakan melambat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama dipengaruhi oleh penyesuaian produksi nikel.

Prospek tersebut sejalan dengan target produksi nikel matte Sorowako pada 2026 yang sebesar 67.645 ton, lebih rendah sekitar 6% dibandingkan realisasi 2025 sebesar 72.027 ton, antara lain terkait kegiatan pemeliharaan *furnace*.

Perkembangan produksi pada awal 2026 juga menunjukkan aktivitas pertambangan nikel yang masih tertahan. Produksi nikel matte tercatat sebesar 13.620 ton pada triwulan I 2026, lebih rendah dibandingkan 17.027 ton pada periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan dengan optimalisasi kegiatan pemeliharaan termasuk *Furnace 3 Rebuild*. Perkembangan tersebut mendukung arah perlambatan LU Pertambangan secara keseluruhan pada 2026.

Di sisi lain, persetujuan RKAB 2026 memberikan kepastian bagi keberlanjutan operasional pertambangan, khususnya Blok Sorowako yang memperoleh kuota 100% dari volume yang diajukan. Namun, perkembangan produksi tetap diperkirakan berlangsung lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga dukungan komoditas nikel terhadap pertumbuhan LU Pertambangan pada 2026 relatif tertahan.

Secara keseluruhan, LU Pertambangan pada tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Penyesuaian produksi nikel menjadi faktor utama yang menahan kinerja, sementara keberlanjutan operasional pascapersetujuan RKAB diperkirakan menjaga aktivitas pertambangan tetap berlangsung sepanjang tahun 2026.

Kinerja LU Industri Pengolahan Sulawesi Selatan pada tahun 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama didukung oleh tetap kuatnya permintaan domestik dan berlanjutnya aktivitas produksi.

Penguatan terutama bersumber dari industri makanan dan minuman, sejalan dengan konsumsi masyarakat yang tetap terjaga sepanjang tahun. Sebagai subsektor utama Industri Pengolahan Sulawesi Selatan, perkembangan industri makanan dan minuman diperkirakan menjadi salah satu penopang peningkatan kinerja sektor ini pada 2026. Secara struktural, industri makanan dan minuman merupakan subsektor dengan kontribusi terbesar terhadap Industri Pengolahan Sulawesi Selatan.

Prospek peningkatan Industri Pengolahan juga didukung oleh menguatnya aktivitas LU Perdagangan dan LU Konstruksi. Peningkatan aktivitas perdagangan diperkirakan menjaga permintaan dan distribusi produk industri, sementara keberlanjutan proyek pemerintah dan swasta serta meningkatnya aktivitas konstruksi turut menopang kebutuhan produk industri terkait. Perkembangan tersebut diperkirakan menjaga aktivitas produksi dan memperkuat kinerja Industri Pengolahan sepanjang tahun 2026.

Secara keseluruhan, LU Industri Pengolahan pada tahun 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik, kinerja industri makanan dan minuman, serta meningkatnya aktivitas LU Perdagangan dan LU Konstruksi. Perkembangan tersebut diperkirakan menjaga Industri Pengolahan sebagai salah satu penopang utama peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada 2026.

Kinerja LU Perdagangan Sulawesi Selatan pada tahun 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama didukung oleh tetap kuatnya permintaan domestik.

Prospek Konsumsi Rumah Tangga yang meningkat diperkirakan menjaga permintaan barang konsumsi serta aktivitas perdagangan besar dan eceran. Daya beli masyarakat yang tetap terjaga dan optimisme konsumen yang masih berada pada zona positif turut mendukung keberlanjutan aktivitas perdagangan sepanjang tahun 2026.

Prospek peningkatan LU Perdagangan juga didukung oleh menguatnya aktivitas produksi dan distribusi barang. Kinerja LU Industri Pengolahan yang diperkirakan meningkat akan mendorong aktivitas distribusi produk industri melalui jaringan perdagangan. Sejalan dengan itu, keberlanjutan aktivitas investasi dan konstruksi turut meningkatkan kebutuhan distribusi barang dan material, sehingga memberikan dukungan tambahan terhadap aktivitas perdagangan.

Perkembangan indikator terkini juga menunjukkan aktivitas perdagangan yang tetap terjaga pada paruh kedua tahun 2026. Penjualan eceran yang tetap tumbuh serta keyakinan konsumen yang masih berada pada zona optimis mengindikasikan permintaan masyarakat yang tetap positif. Kondisi tersebut diperkirakan menjaga aktivitas perdagangan hingga akhir tahun, sejalan dengan prospek Konsumsi Rumah Tangga yang meningkat.

Secara keseluruhan, LU Perdagangan pada tahun 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama ditopang oleh kuatnya permintaan domestik,

peningkatan aktivitas produksi, serta berlanjutnya distribusi barang. Perkembangan tersebut diperkirakan menjaga LU Perdagangan sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2026.

Kinerja LU Konstruksi Sulawesi Selatan pada tahun 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, terutama didukung oleh keberlanjutan pembangunan proyek pemerintah dan swasta. Prospek tersebut sejalan dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur dan proyek multiyears pada paruh kedua tahun, serta aktivitas investasi yang diperkirakan tetap terjaga. Perkembangan tersebut diperkirakan menjaga aktivitas konstruksi sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2026.

Prospek peningkatan LU Konstruksi semakin didukung oleh berlanjutnya sejumlah proyek infrastruktur pada semester II 2026. Program Multi Years Project (MYP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berjalan pada berbagai ruas jalan strategis, mencakup pekerjaan jalan, drainase, dan infrastruktur pendukung di berbagai kabupaten/kota. Selain itu, pembangunan proyek baru juga berlanjut, antara lain RS Regional di Kabupaten Gowa yang mulai dibangun pada Juli 2026 dan ditargetkan selesai pada 2027. Keberlanjutan proyek tersebut memberikan dukungan terhadap aktivitas konstruksi hingga akhir tahun 2026.

Peningkatan aktivitas konstruksi juga diperkirakan mendorong permintaan material bangunan dan aktivitas sektor terkait. Berlanjutnya proyek pemerintah dan swasta akan menjaga kebutuhan input konstruksi, sekaligus mendukung aktivitas Industri Pengolahan dan Perdagangan melalui kebutuhan material dan distribusi barang. Dengan demikian, penguatan LU Konstruksi diperkirakan memberikan keterkaitan positif terhadap aktivitas ekonomi lainnya sepanjang tahun.

Secara keseluruhan, LU Konstruksi pada tahun 2026 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, ditopang oleh keberlanjutan proyek multiyears, pembangunan infrastruktur pemerintah, serta proyek swasta. Perkembangan tersebut diperkirakan menjaga LU Konstruksi sebagai salah satu penopang utama peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2026.

6.2 Prospek Inflasi

Prospek inflasi Sulsel pada tahun 2026 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2025 namun masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, yaitu sebesar $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Tekanan inflasi tahun 2026 terutama dipengaruhi peningkatan permintaan domestik seiring terjaganya daya beli masyarakat, meningkatnya konsumsi pangan strategis, kenaikan harga komoditas dampak *imported inflation* serta penyesuaian harga bahan bakar non subsidi. Namun demikian, tekanan inflasi

diprakirakan tertahan oleh perbaikan produksi pertanian, penguatan cadangan pangan, berlanjutnya program swasembada pangan, dan kebijakan stabilisasi harga.

Dari sisi permintaan, daya beli masyarakat diperkirakan tetap solid, ditopang oleh kenaikan UMP Sulawesi Selatan sebesar 7,2% pada 2026, lebih tinggi dibandingkan 6,5% pada 2025. Kondisi tersebut berpotensi memperkuat konsumsi domestik, terutama selama periode HBKN. Optimisme masyarakat turut tecermin dari IKK Agustus 2026 yang tetap berada pada zona optimis sebesar 105,17, serta peningkatan penyaluran THR sebesar 10,22% (yoy) pada periode Ramadan dan Idulfitri. Ke depan, permintaan komoditas pangan strategis diperkirakan meningkat sejalan dengan perluasan cakupan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan mencapai 100% pada 2026.

Selanjutnya, ketidakpastian ekonomi global pada tahun 2026 masih relatif tinggi di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia dan divergensi kinerja antarnegara. Ruang penurunan Fed Funds Rate (FFR) diperkirakan masih terbatas seiring tingginya ketidakpastian global dan masih adanya tekanan inflasi di Amerika Serikat. Di sisi lain, yield US Treasury yang tetap tinggi berpotensi menahan aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Sementara itu, penguatan indeks dolar AS (DXY) mencerminkan masih tingginya preferensi investor terhadap aset berdenominasi dolar AS. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga mendorong risiko tekanan inflasi yang berasal dari impor (*imported inflation*).

Berdasarkan data *Bloomberg* per Agustus 2026, harga sejumlah komoditas strategis global diperkirakan meningkat pada 2026. Prospek tersebut dipengaruhi oleh masih tingginya ketidakpastian global akibat risiko eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah dan berlanjutnya fragmentasi perdagangan. Perkembangan ini perlu dicermati karena berpotensi meningkatkan harga energi dan bahan baku, yang selanjutnya dapat mendorong risiko *imported inflation* serta tekanan terhadap stabilitas harga domestik.

Dari sisi energi, harga minyak WTI meningkat sebesar 46,07% (yoy), mengalami akselerasi dari triwulan I 2026, sehingga berpotensi ditransmisikan pada harga BBM nonsubsidi. Sejalan dengan itu, *World Bank* memprakirakan harga energi global meningkat sekitar 24% (yoy), dengan rata-rata harga minyak Brent mencapai USD86 per barel pada 2026. Harga CPO juga diperkirakan meningkat dan berpotensi mendorong kenaikan harga produk turunannya, terutama minyak goreng. Tekanan tersebut dapat menguat seiring penerapan mandatori B50 mulai Juli 2026 yang meningkatkan kebutuhan CPO domestik. Secara keseluruhan, *World Bank* memprakirakan harga komoditas global tumbuh sekitar 16% (yoy) pada 2026.

Sementara itu, harga emas global diperkirakan tetap berada pada level tinggi namun lebih rendah dari prakiraan awal pada tahun 2026. JP Morgan memangkas prakiraan harga emas dunia dari USD5.243/oz menjadi USD4.500/oz pada tahun 2026. Kondisi tersebut didorong oleh menguatnya indeks dolar AS (DXY) dan ekspektasi kebijakan moneter AS yang tetap ketat, sehingga meningkatkan preferensi investor terhadap aset berdenominasi dolar AS. Lebih lanjut, harga kopi Arabika dan cocoa diperkirakan masing-masing mengalami kontraksi sebesar 12,48% (yoy) dan 11,30% (yoy) yang dapat memengaruhi penurunan harga produk turunannya, seperti kopi bubuk, minuman berbasis kopi, dan coklat.

Meski demikian, ketidakpastian eksternal masih perlu diwaspadai, terutama terkait potensi eskalasi perang antara Iran – US, berlanjutnya tensi perdagangan global, serta risiko pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pergerakan harga komoditas internasional, meningkatkan risiko *imported inflation*, dan memberikan tekanan terhadap prospek inflasi ke depan.

Dari sisi pasokan, risiko inflasi tetap perlu dicermati seiring dinamika cuaca yang berpotensi memengaruhi produksi pangan strategis di Sulawesi Selatan. Sebagian besar wilayah Sulawesi Selatan masih mengalami curah hujan kategori menengah hingga tinggi pada semester I 2026, dengan curah hujan tertinggi terkonsentrasi di wilayah utara dan timur. Kondisi tersebut mendukung ketersediaan air bagi sektor pertanian, namun di sisi lain mengganggu produksi hortikultura serta aktivitas penangkapan ikan akibat meningkatnya intensitas hujan dan gelombang laut. Selanjutnya, BMKG memprakirakan fenomena El Nino pada semester II 2026 dengan intensitas sangat kuat dan durasi yang relatif panjang. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan penurunan curah hujan secara bertahap, terutama pada periode musim kemarau. Pada tahap awal, El Nino berpotensi mendukung produktivitas beberapa komoditas hortikultura di daerah sentra produksi, seperti Kabupaten Enrekang. Namun demikian, apabila berlangsung sangat kuat dan lebih panjang dari perkiraan, El Nino berpotensi menurunkan ketersediaan air dan mengganggu produksi komoditas pangan strategis, sehingga meningkatkan risiko tekanan inflasi dari sisi pasokan.

Sementara itu, perbaikan produksi padi yang terus berlanjut di tahun 2026 mampu menjaga ketahanan pasokan Sulsel. Produksi padi Sulsel tahun 2026 diperkirakan masih tumbuh positif namun melambat seiring *high base effect* pada tahun 2025. Pertumbuhan produksi padi didukung oleh program Mandiri Benih yang kembali berjalan pada 2026 dengan total penyaluran benih padi unggul sebanyak 2,31 juta kg, meningkat 84,8% dari alokasi tahun 2025 sebanyak 1,25 juta kg. Bantuan benih tersebut akan diberikan secara gratis kepada petani di

seluruh kab/kota se-Sulsel dengan total luasan lahan penerima sebesar 92.334 Ha, meningkat 84,69% dari alokasi tahun 2025 sebesar 50.000 Ha. Hal ini juga didukung oleh peningkatan program cetak sawah yang akan dilakukan di tahun 2026, dengan target 33.700 Ha meningkat 314,36% dari realisasi tahun 2025. Selain itu, peningkatan alokasi pupuk subsidi di Sulsel, menjadi 846,72 ribu ton pada tahun 2026 juga diperkirakan mampu menjaga produksi pertanian. Lebih lanjut, dalam menghadapi El Nino, pemerintah Sulsel juga telah memberikan bantuan berupa 100 sumur bor, 300 pompa air, dan bantuan alsintan lainnya untuk mendukung produksi komoditas pangan strategis.

Dari sisi kebijakan, berbagai program stabilisasi harga dan insentif pemerintah diperkirakan turut menahan tekanan inflasi pada tahun 2026. Penguatan regulasi Minyakita melalui Permendag Nomor 43 Tahun 2025 yang mengatur implementasi *Domestic Market Obligation* (DMO) minimal 35% diperkirakan mendukung ketersediaan pasokan minyak goreng dan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat. Di sektor pangan, peningkatan batas maksimal penyaluran beras SPHP menjadi 25 kg (5 pax) per konsumen dari sebelumnya 10 kg (2 pax), serta peningkatan penyaluran SPHP jagung, diperkirakan dapat memperkuat pasokan dan menjaga stabilitas harga pangan strategis. Di sisi lain, pemerintah juga melanjutkan pemberian berbagai insentif fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan menahan tekanan harga. Melalui PMK Nomor 90 Tahun 2025, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% untuk pembelian properti yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2026. Selain itu, pemberian insentif PPN DTP atas tarif dasar dan fuel surcharge angkutan udara pada periode Mei–Juni 2026, serta dukungan insentif transportasi pada moda pesawat, kereta api, dan kapal laut selama periode libur sekolah dan HBKN, diperkirakan dapat membantu menjaga keterjangkauan tarif transportasi dan menahan tekanan inflasi dari kelompok transportasi.

Pemerintah juga telah membentuk Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (Satgas SABER) pada Januari 2026 melalui Keputusan Kepala Bapanas No.4/2026 sebagai upaya memperkuat pengawasan terpadu terhadap pelanggaran harga, mutu, dan keamanan pangan di seluruh rantai distribusi. Satgas ini berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan harga pangan pemerintah, khususnya komoditas strategis yang diatur melalui HET dan HAP, seperti beras, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam ras, bawang, cabai, minyak goreng, dan gula. Melalui penguatan pengawasan tersebut, harga pangan komoditas strategis diharapkan lebih terkendali sehingga dapat menahan tekanan inflasi pangan.

Sejalan dengan upaya stabilisasi harga tersebut, penguatan cadangan pangan juga terus dilakukan melalui penyerapan produksi dalam negeri. Bulog Sulselbar pada tahun 2026 memperoleh target penyerapan gabah/beras sebesar 697,6 ribu ton atau sekitar 17,44% dari target nasional sebesar 4 juta ton, yang diharapkan dapat memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di wilayah Sulawesi Selatan.

Mempertimbangkan sejumlah faktor tersebut, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna mendukung pengendalian inflasi. Pada Agustus 2026, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk menahan BI-Rate tetap 5,75%, dengan suku bunga *Deposit Facility* sebesar 4,75%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 6,50%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%, stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, upaya stabilisasi harga di Sulsel terus diperkuat melalui forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel yang secara aktif menjalankan berbagai langkah pengendalian inflasi 2026 dengan berpedoman pada strategi 4K dan diperkuat dengan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Provinsi Sulsel dan 24 Kab/Kota 2025-2027.

Sementara itu, harga emas global diperkirakan tetap berada pada level tinggi namun lebih rendah dari prakiraan awal pada tahun 2026. JP Morgan memangkas prakiraan harga emas dunia dari USD5.243oz menjadi USD4.500/oz pada tahun 2026. Kondisi tersebut didorong oleh menguatnya indeks dolar AS (DXY) dan ekspektasi kebijakan moneter AS yang tetap ketat, sehingga meningkatkan preferensi investor terhadap aset berdenominasi dolar AS. Lebih lanjut, harga kopi Arabika dan *cocoa* diperkirakan masing-masing mengalami kontraksi sebesar 12,48% (yoy) dan 11,30% (yoy) yang dapat memengaruhi penurunan harga produk turunannya, seperti kopi bubuk, minuman berbasis kopi, dan coklat.

Meski demikian, ketidakpastian eksternal masih perlu diwaspadai, terutama terkait potensi eskalasi perang antara Iran – US, berlanjutnya tensi perdagangan global, serta risiko pelemahan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pergerakan harga komoditas internasional, meningkatkan risiko *imported inflation*, dan memberikan tekanan terhadap prospek inflasi ke depan.

1. Pada aspek **Keterjangkauan Harga (K1)**, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan prinsip 4T (Tepat Lokasi, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, dan Tepat Komoditas) di seluruh kabupaten/kota, khususnya pada HBKN. Selain itu, juga melakukansidak pasar, gudang distributor, dan gudang BULOG dalam rangka pemantauan harga. Koordinasi aktif antara TPID dengan *stakeholders* dalam review kebijakan *Administered Prices* di daerah. Mendorong pemanfaatan dana APBD untuk program pengendalian inflasi dan Dana Desa untuk program ketahanan pangan.
2. Pada aspek **Ketersediaan Pasokan (K2)**, penguatan produktivitas akan didorong melalui Program Mandiri Benih untuk komoditas padi, jagung, bawang merah, kentang, dan bibit kopi. Program Luas Tambah Tanam dan *urban farming* untuk mendorong produktivitas padi dan komoditas hortikultura lainnya. Peningkatan alokasi program cetak sawah di Sulsel menjadi 33.700 Ha pada 2026 dibandingkan 2025 yang realisasi sebesar 8.133,25 Ha. Dukungan/fasilitasi alat dan mesin penunjang produksi baik melalui penyaluran PI-KEKDA, termasuk penerapan digital farming hulu pada komoditas padi maupun hortikultura (bawang merah dan cabai), dan bantuan pompa dan pipa dalam menghadapi El Nino untuk efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas.
3. Pada aspek **Kelancaran Distribusi (K3)**, penajakan dan perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) antara daerah surplus dan defisit, baik intra dan antar provinsi akan terus ditingkatkan. Optimalisasi *Mini Distribution Centre* (MDC) di seluruh Kab/Kota IHK Sulsel untuk meningkatkan kelancaran distribusi komoditas pangan. Selain itu, perluasan implementasi program Sipeppa bekerja sama dengan beberapa ritel modern, seperti Alfamart dan Indomaret juga akan dilakukan untuk efisiensi rantai pasok.
4. Pada aspek **Komunikasi Efektif (K4)**, penyelenggaraan *High Level Meeting* (HLM) bersama TPID Sulsel akan terus dilaksanakan untuk mitigasi inflasi pada momen HBKN yang diperkuat dengan pelaksanaan HLM Zonasi di 5 Zona Sulsel, koordinasi pengawasan harga melalui Satgas Sapu Bersih (SABER), serta mendorong himbauan belanja bijak bersinergi dengan Pimpinan Daerah, influencer lokal, maupun tokoh masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan website neraca pangan SIGAP SULTAN (Sistem Informasi Harga dan Pasokan Pangan Sulawesi Selatan) juga terus didorong untuk perumusan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran.



Lampiran

Tabel A. 1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan TD 2010 (Rp Triliun)

Sektor Berdasarkan Tahun Dasar 2010	2025				Total	2026	
	I	II	III	IV		I	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,62	21,33	22,05	17,48	80,47	20,65	21,27
Pertambangan dan Penggalian	4,74	5,34	5,48	5,49	21,06	4,59	5,32
Industri Pengolahan	13,16	13,69	14,19	14,51	55,55	14,54	14,40
Pengadaan Listrik, Gas	0,12	0,10	0,11	0,11	0,43	0,10	0,10
Pengadaan Air	0,12	0,12	0,12	0,12	0,49	0,13	0,12
Konstruksi	99,60	11,53	12,99	14,39	48,87	10,64	12,56
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,04	16,09	17,20	17,19	65,52	16,39	17,39
Transportasi dan Pergudangan	3,33	3,67	3,61	3,74	14,35	3,66	3,73
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,49	1,50	1,56	1,68	6,24	1,65	1,65
Informasi dan Komunikasi	8,26	8,61	8,78	9,22	34,86	8,73	9,17
Jasa Keuangan	3,35	3,38	3,57	3,68	13,99	3,69	3,57
Real Estate	3,63	3,67	3,72	3,79	14,81	3,83	3,91
Jasa Perusahaan	0,45	0,51	0,53	0,56	2,04	0,47	0,54
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,21	4,57	3,82	4,08	16,68	5,02	5,32
Jasa Pendidikan	5,82	5,91	5,73	6,44	23,90	5,68	6,48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,50	2,76	2,80	3,30	11,36	2,55	2,99
Jasa lainnya	1,58	1,78	1,82	1,83	7,01	1,76	1,87
PDRB	187,01	104,56	108,08	107,63	417,63	104,07	110,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel A. 2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku TD 2010 (Rp Triliun)

Sektor Berdasarkan Tahun Dasar 2010	2025				Total	2026	
	I	II	III	IV		I	II
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	41,72	45,74	48,36	37,47	173,30	45,50	47,57
Pertambangan dan Penggalian	7,14	8,14	8,44	8,63	32,34	7,61	9,25
Industri Pengolahan	22,87	23,81	24,86	25,65	97,19	26,13	26,60
Pengadaan Listrik, Gas	0,13	0,13	0,13	0,13	0,52	0,13	0,13
Pengadaan Air	0,16	0,17	0,17	0,17	0,67	0,17	0,17
Konstruksi	19,97	23,16	26,16	29,29	98,57	22,03	27,04
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	24,76	27,09	29,06	29,13	110,04	28,14	30,10
Transportasi dan Pergudangan	7,69	8,59	8,45	8,72	33,45	8,38	8,82
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,47	2,51	2,60	2,81	10,39	2,79	2,82
Informasi dan Komunikasi	9,61	10,17	10,39	10,92	41,10	9,76	10,44
Jasa Keuangan	6,55	6,73	7,16	7,36	27,80	7,49	7,38
Real Estate	6,42	6,49	6,59	6,76	26,27	6,85	7,02
Jasa Perusahaan	0,81	0,94	0,98	1,05	3,78	0,89	1,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,23	7,90	6,74	7,16	29,04	9,12	9,79
Jasa Pendidikan	8,98	9,13	8,93	9,97	37,00	8,80	10,07
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,27	4,73	4,82	5,78	19,60	4,48	5,26
Jasa lainnya	2,69	3,05	3,13	3,15	12,01	3,00	3,20
PDRB	173,47	188,48	196,97	194,16	753,08	191,29	206,70

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel A. 3 PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan TD 2010 (Rp Triliun)

Komponen	2025				Total	2026	
	I	II	III	IV		I	II
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	53,35	54,06	53,24	53,60	214,25	56,05	56,60
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,64	1,65	1,63	1,63	6,56	1,69	1,71
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,17	7,48	7,97	10,85	31,44	6,96	8,99
Pembentukan Modal Tetap Bruto	32,75	37,29	41,41	43,98	155,44	35,02	40,56
Perubahan Inventori	0,34	0,44	0,34	(0,90)	0,24	0,60	0,42
Ekspor	12,81	12,86	14,97	12,16	52,82	13,32	12,22
Impor	8,69	9,22	11,49	13,70	43,12	9,56	10,08
PDRB	97,37	104,56	108,08	107,63	417,63	104,07	110,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel A. 4 PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku TD 2010 (Rp Triliun)

Komponen	2025				Total	2026	
	I	II	III	IV		I	II
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	98,68	102,22	101,04	101,70	380,35	107,98	110,73
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,24	3,34	3,31	3,33	12,70	3,37	3,59
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,91	14,31	15,24	20,89	59,78	13,41	17,74
Pembentukan Modal Tetap Bruto	56,21	65,15	73,00	75,64	255,14	61,22	72,22
Perubahan Inventori	0,61	0,80	0,63	(0,16)	0,43	1,04	0,77
Ekspor	17,32	17,83	20,73	16,24	67,39	18,64	17,82
Impor	12,50	15,17	16,98	22,02	79,55	14,36	16,17
PDRB	173,47	188,48	196,97	194,16	696,25	191,29	206,70

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel B. 1 IHK Gabungan 5 Kota di Sulawesi Selatan Menurut Kelompok Pengeluaran

IHK (Akhir Periode)	Umum	Makanan Minuman dan Tembakau	Pakaian dan Alas Kaki	Perumahan, Air, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin RT	Kesehatan	Transportasi	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	Pendidikan	Penyediaan Makanan dan Minuman / Restoran	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya
2024												
Tw I	106,07	110,34	103,29	101,36	102,60	103,90	111,69	100,12	102,47	103,42	103,58	105,62
Tw II	105,84	108,97	103,43	101,41	102,73	103,62	111,28	99,91	102,76	103,43	103,98	108,16
Tw III	105,52	106,99	103,81	101,62	103,07	103,84	111,46	100,00	103,25	104,27	104,33	109,44
Tw IV	106,26	108,21	104,29	101,67	103,38	104,41	111,57	99,84	103,52	104,27	106,06	111,60
2025												
Tw I	106,78	112,12	105,30	94,32	104,00	105,13	111,60	99,65	103,74	104,48	106,93	118,45
Tw II	108,21	111,67	105,36	102,17	103,74	105,87	111,85	99,39	104,45	104,73	107,20	119,51
Tw III	108,72	112,9	105,02	102,31	103,70	105,84	111,77	99,42	104,73	105,58	107,36	121,01
Tw IV	109,28	113,04	104,77	102,40	103,61	106,11	112,04	99,38	104,82	105,44	107,38	127,75
2026												
Tw I	111,59	118,46	104,35	102,73	103,65	106,29	112,04	99,53	104,46	105,61	109,23	134,56
Tw II	112,06	118,02	104,92	103,24	105,23	106,80	114,73	101,02	105,54	106,05	110,52	132,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel B. 2 IHK Gabungan 5 Kota di Sulawesi Selatan Menurut Kota IHK

Kota Inflasi	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Makassar	106,51	106,13	105,82	106,61	107,00	108,42	108,75	109,48	111,86	112,28
Palopo	106,09	106,31	105,67	106,16	106,77	107,78	108,52	108,62	109,77	110,73
Parepare	106,01	106,79	106,49	106,59	108,11	109,95	110,36	110,69	112,48	112,78
Bone (Watampone)	105,03	105,42	104,61	105,24	105,62	107,15	107,86	108,20	110,58	111,18
Bulukumba**	105,01	105,09	104,96	105,63	105,75	107,77	107,90	108,52	109,90	110,54
Kab. Sidenreng Rappang*	103,10	102,19	102,18	103,32	103,81	105,27	106,35	106,84	109,76	109,8
Kab. Luwu Timur*	106,00	105,92	105,97	106,78	107,42	109,05	110,49	110,31	112,58	113,76
Kab. Wajo*	106,33	106,34	105,88	106,41	107,69	108,62	109,45	109,77	112,37	112,75

Sumber: Badan Pusat Statistik
*) Sejak Januari 2024 menggunakan IHK TD 100=2018 **) Dihitung sebagai Kota Inflasi sejak tahun 2014

Tabel B. 3 Angka Inflasi Gabungan 8 Kota IHK di Sulawesi Selatan Menurut Kota IHK (% yoy)

Kota Inflasi	2024				2025				2026	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Makassar	2,43	1,77	1,54	1,19	0,46	2,16	2,77	2,69	4,54	3,56
Palopo	2,75	2,47	2,14	1,87	0,57	1,38	2,70	2,32	2,81	2,74
Parepare	2,37	2,64	2,21	1,73	1,43	2,96	3,63	3,85	4,04	2,57
Bone (Watampone)	2,56	2,45	2,21	1,11	0,36	1,64	3,11	2,81	4,70	3,76
Bulukumba**	2,18	1,78	1,35	0,91	0,11	2,55	2,80	2,74	3,92	2,57
Kab. Sidenreng Rappang*	4,69	2,54	1,96	1,03	0,47	3,01	4,08	3,41	5,73	4,30
Kab. Luwu Timur*	2,93	2,17	1,96	2,02	0,60	2,96	4,27	3,31	4,80	4,32
Kab. Wajo*	4,27	2,73	1,92	0,68	1,20	2,14	3,37	3,16	4,35	3,80

Sumber: Badan Pusat Statistik
*) Sejak Januari 2024 menggunakan IHK TD 100=2018 **) Dihitung sebagai Kota Inflasi sejak tahun 2014

Tabel C. 1 Dana Pihak Ketiga (Lokasi Bank Pelapor) dan Kredit (Lokasi Bank) Bank Umum (Rp Miliar)

Periode	DPK				Kredit				LDR
	Giro	Tabungan	Deposito	Jumlah	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	Jumlah	
2024									
Tw I	18.440	74.778	30.683	123.901	59.787	29.005	67.932	156.774	126,53%
Tw II	18.370	76.672	31.135	126.178	59.741	29.127	69.202	158.071	125,28%
Tw III	18.794	77.790	31.481	128.066	60.408	28.943	70.743	160.093	125,01%
Twn IV	17.473	82.034	29.526	129.033	59.803	28.806	72.426	161.035	124,80%
2025									
Tw I	19.259	81.567	31.818	132.644	59.679	29.303	73.538	162.519	122,52%
Tw II	19.560	83.446	34.115	137.122	60.610	29.053	74.514	164.177	119,73%
Tw III	21.863	82.429	34.263	138.555	60.734	29.650	75.954	166.338	120,05%
Tw IV	19.814	87.184	34.453	141,451	59.619	31.718	78.063	169.399	119,76%
2026									
Tw I	21.182	89.936	30.715	141.834	58.924	32.492	79.408	170.824	120,44%
Tw II	21.778	91.273	31.203	144.253	58.203	33.491	81.005	172.700	119,72%

Sumber: LBU, diolah

Tabel C. 2 Dana Pihak Ketiga (Lokasi Proyek Pelapor) dan Kredit (Lokasi Proyek) Bank Umum (Rp Miliar)

Periode	DPK				Kredit				LDR
	Giro	Tabungan	Deposito	Jumlah	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	Jumlah	
2024									
Tw I	18.273	73.581	29.844	121.699	61.995	36.908	72.262	171.166	140,65%
Tw II	18.170	75.413	30.327	123.911	62.501	37.759	73.688	173.948	140,38%
Tw III	18.620	76.510	30.629	125.759	62.886	36.728	75.321	174.935	139,10%
Twn IV	17.303	80.690	28.720	126.713	62.774	37.162	77.121	177.057	139,73%
2025									
Tw I	19.066	80.166	310.086	130.240	62.443	36.340	78.325	177.107	135,98%
Tw II	19.394	82.036	332.897	134.720	62.096	37.138	79.522	178.756	132,69%
Tw III	21.597	80.942	333.427	135.882	62.091	35.690	81.201	178.983	131,72%
Tw IV	19.467	85.688	336.087	138.763	60.811	37.665	83.244	181.720	130,96%
2026									
Tw I	20.696	88.247	29.959	138.902	61.144	38.241	84.626	184.011	132,48%
Tw II	21.695	90.350	31.005	143.050	63.171	42.608	86.096	191.875	134,13%

Sumber: LBU, diolah

Tabel C. 3 Penyaluran Kredit (Lokasi Bank) Menurut Sektor Ekonomi (Rp Miliar)

Periode	Kredit (Lokasi Bank)										Total
	Pertanian	Tambang	Industri Pengolahan	Listrik, Gas, dan Air	Konstruksi	Perdagangan	Angkutan	Jasa Dunia Usaha	Jasa Sosial Masyarakat	Lain-lain	
2024											
Tw I	15.031	3.005	7.804	3.907	5.633	41.885	2.654	3.512	5.412	67.932	156.774
Tw II	15.344	3.166	7.490	3.932	5.679	41.782	2.568	3.489	5.418	69.202	158.071
Tw III	15.896	3.025	7.719	3.555	5.789	41.815	2.522	3.545	5.485	70.743	160.094
Twn IV	16.138	2.211	7.982	3.664	5.731	41.259	2.502	3.667	5.455	72.426	161.035
2025											
Tw I	16.454	2.431	7.770	3.653	5.510	4.112	2.510	4.072	5.462	73.538	162.519
Tw II	16.846	2.779	7.462	3.451	5.406	4.149	2.492	4.310	5.427	74.514	164.177
Tw III	17.246	1.969	8.503	3.430	5.113	41.493	2.919	4.411	5.300	75.954	166.338
Tw IV	17.709	2.412	8.489	3.325	5.169	41.489	2.842	4.516	5.386	78.063	169.399
2026											
Tw I	17.937	2.079	8.196	3.274	5.051	41.642	2.903	4.978	5.356	79.408	170.824
Tw II	18.629	2.034	7.536	3.302	5.010	41.328	3.008	5.210	5.639	81.005	172.700

Sumber: LBU, diolah

Tabel C. 4 Penyaluran Kredit (Lokasi Proyek) Menurut Sektor Ekonomi (Rp Miliar)

Periode	Kredit (Lokasi Proyek)										Total
	Pertanian	Tambang	Industri Pengolahan	Listrik, Gas, dan Air	Konstruksi	Perdagangan	Angkutan	Jasa Dunia Usaha	Jasa Sosial Masyarakat	Lain-lain	
2024											
Tw I	14.662	4.364	8.980	6.342	6.118	43.962	2.697	5.434	6.343	72.262	171.165
Tw II	14.977	5.472	9.022	6.352	6.104	43.500	2.612	5.832	6.387	73.688	173.948
Tw III	15.553	5.158	9.003	5.797	6.170	43.420	2.484	5.630	6.398	75.321	174.935
Twn IV	15.649	4.509	9.552	5.947	6.182	43.112	2.418	6.150	6.418	77.121	177.057
2025											
Tw I	15.955	4.615	7.601	58.083	5.928	5.928	2.613	5.423	7.984	78.325	177.107
Tw II	16.371	5.139	7.486	55.996	5.845	4.267	2.526	5.658	7.940	79.522	178.756
Tw III	16.869	3.112	8.201	54.096	5.995	4.169	2.678	5.874	7.951	81.201	178.982
Tw IV	17.183	3.182	7.878	5.303	6.067	41.796	2.764	6.484	7.820	83.244	181.720
2026											
Tw I	17.392	3.276	7.541	5.053	6.018	41.441	2.822	7.941	7.901	84.626	184.011
Tw II	18.000	7.626	7.153	5.059	6.010	42.243	2.631	8.150	8.907	86.096	86.096

Sumber: LBU, diolah

Tabel C. 5 Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank (Lokasi Bank) dalam Persen (%)

Periode	Bank Pemerintah			Bank Swasta Nasional			Bank Asing dan Campuran			Bank Umum		
	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi
2024												
Tw I	9,33	9,00	10,36	9,85	8,40	9,89	8,40	11,25	7,52	9,69	9,12	8,61
Tw II	9,24	8,92	10,26	9,88	8,52	9,87	8,29	11,25	7,45	9,69	9,05	8,49
Tw III	9,71	8,85	10,20	9,69	8,46	9,79	*	*	6,80	9,61	8,99	8,41
Tw IV	9,83	8,80	10,17	9,67	8,54	9,93	*	*	6,79	9,73	9,13	8,32
2025												
Tw I	9,77	8,73	10,12	9,67	8,34	9,92	*	*	5,85	9,74	9,11	8,21
Tw II	9,81	8,64	10,07	9,67	8,44	9,91	*	*	5,53	9,63	9,14	8,13
Tw III	9,78	8,98	10,04	9,57	8,37	9,88	*	*	5,35	9,53	9,11	8,05
Tw IV	9,72	8,83	10,02	9,48	8,38	9,85	*	*	*	9,10	9,53	7,92
2026												
Tw I	9,50	8,77	9,98	9,69	8,30	9,99	*	*	*	9,08	9,35	7,85
Tw II	9,49	8,69	9,96	9,67	8,67	9,67	*	*	*	9,12	9,21	7,82

Sumber: LBU, diolah

Tabel C. 6 Suku Bunga Kredit Rupiah Menurut Kelompok Bank (Lokasi Proyek) dalam Persen (%)

Periode	Bank Pemerintah			Bank Swasta Nasional			Bank Asing dan Campuran			Bank Umum		
	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi
2024												
Tw I	9,32	9,88	10,36	9,81	8,06	9,78	8,40	11,25	7,67	9,87	9,25	8,65
Tw II	9,20	9,77	10,26	9,84	8,17	9,74	8,29	11,25	7,58	9,87	9,17	8,53
Tw III	9,79	9,64	10,2	9,64	8,16	9,63	*	*	6,8	9,88	9,11	8,44
Tw IV	9,66	9,43	10,17	9,57	8,3	9,78	*	*	6,79	9,91	9,27	8,35
2025												
Tw I	9,58	9,31	10,12	9,57	8,08	9,77	*	*	5,85	9,91	9,25	8,23
Tw II	9,65	9,16	10,07	9,60	8,21	9,76	*	*	5,53	9,80	9,27	8,14
Tw III	9,63	8,85	10,05	9,52	8,16	9,75	*	*	5,35	9,71	9,24	8,05
Tw IV	9,58	8,65	10,03	9,41	8,21	9,72	*	*	*	9,72	9,73	7,92
2026												
Tw I	9,55	8,59	9,99	9,51	8,17	9,80	*	*	*	9,25	9,51	7,85
Tw II	9,53	8,50	9,96	9,50	8,12	9,72	*	*	*	9,27	9,34	7,80

Sumber: LBU, diolah

Tabel D. 1 Perkembangan Komoditas Ekspor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan (US\$ Juta)

Komoditas Ekspor Utama (dalam juta USD)	2025				2025	2026	
	I	II	III	IV		I	II
Nikel	203,99	217,91	240,00	226,69	888,58	195,11	205,70
Biji-bijian berminyak dan Obat	28,39	44,05	36,23	29,94	138,60	25,13	51,59
Ikan dan Udang	40,15	38,36	46,06	52,98	177,54	36,33	43,20
Biji Coklat dan Coklat Olahan	23,24	26,28	42,57	61,62	153,71	39,87	27,87
Lak, Getah dan Damar	17,85	15,80	20,30	17,90	71,85	18,86	20,62
Besi dan Baja	94,45	108,56	65,70	27,15	295,86	25,87	19,76
Garam, belerang, kapur	13,02	21,22	16,59	12,80	63,62	15,27	17,05
Daging dan Ikan Olahan	9,63	11,18	12,74	14,63	48,18	9,61	15,60
Kopi,teh, rempah-rempah	13,78	8,63	7,57	7,43	37,41	7,80	6,80
Buah-Buahan	6,69	7,45	3,72	5,94	23,79	3,02	5,01
Lainnya	15,52	14,85	15,42	12,19	57,98	11,16	15,63
Nilai Ekspor Sulsel	466,70	514,28	506,89	469,26	1.957,12	388,02	428,82

Sumber: DJBC, diolah

Tabel D. 2 Perkembangan Komoditas Ekspor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Tujuan (US\$ Juta)

Negara Tujuan Ekspor (dalam juta USD)	2025				2025	2026	
	I	II	III	IV		I	II
Jepang	216,73	233,89	259,81	244,74	955,16	207,78	222,90
Tiongkok	161,04	177,04	161,07	135,63	634,78	97,80	109,16
Amerika Serikat	13,23	10,90	9,54	19,18	52,85	14,74	19,51
Taiwan	9,25	16,46	9,01	7,85	42,57	9,79	10,66
Malaysia	4,98	11,31	3,60	5,95	25,83	6,46	8,26
Korea Selatan	6,21	5,12	5,91	5,53	22,76	3,31	5,32
Timor Leste	2,38	4,41	5,64	4,48	16,90	1,89	4,34
Rusia	4,39	4,63	5,56	3,88	18,46	2,15	4,31
Jerman	3,29	3,56	3,05	1,98	11,89	3,57	3,89
Bangladesh	2,06	0,16	-	0,07	2,29	4,62	3,50
Lainnya	43,14	46,81	43,70	39,99	173,64	35,92	36,97
Nilai Ekspor Sulsel	466,70	514,28	506,89	469,26	1.957,12	388,02	428,82

Sumber: DJBC, diolah

Tabel D. 3 Perkembangan Komoditas Impor Non-migas Provinsi Sulawesi Selatan (US\$ Juta)

Komoditas Impor Utama (dalam Juta USD)	2025				2025	2026	
	I	II	III	IV		I	II
Sisa Industri Makanan	40,74	27,21	43,61	25,91	137,47	39,91	54,01
Gandum	29,81	60,78	42,73	53,65	186,97	45,24	35,07
Gula dan Kembang Gula	20,95	42,97	45,08	32,95	141,95	31,03	22,45
Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	14,06	13,37	37,66	16,32	81,41	19,32	17,52
Biji Coklat dan Coklat Olahan	13,56	21,39	19,29	20,97	75,21	6,65	11,37
Mesin dan Peralatan Listrik	10,03	15,35	54,09	35,63	115,10	7,03	8,87
Perabot, penerangan rumah	1,39	2,43	2,35	1,65	7,82	2,78	4,67
Bahan Kimia Organik	1,46	1,50	2,47	2,84	8,26	2,15	4,66
Kapal Terbang dan Bagiannya	0,30	6,01	0,79	0,03	7,14	-	4,41
Bahan Bakar Mineral	18,47	12,28	7,89	5,00	43,64	-	3,78
Lainnya	22,55	31,63	18,37	42,15	114,70	63,97	18,81
Nilai Impor Sulsel	173,31	234,92	274,33	237,10	919,67	218,09	185,62

Sumber: DJBC, diolah

Tabel D. 4 Perkembangan Impor Nonmigas Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Negara Asal (US\$ Juta)

Negara Asal Impor (dalam Juta USD)	2025				2025	2026	
	I	II	III	IV		I	II
Tiongkok	49,94	55,23	89,13	62,65	256,95	83,40	43,94
Brazil	25,79	44,89	69,38	55,73	195,78	35,48	38,10
Thailand	24,57	30,24	2,28	3,63	60,72	34,09	26,65
Australia	18,82	47,89	29,43	40,15	136,29	34,75	20,43
Argentina	19,19	2,02	15,73	8,28	45,22	5,05	14,14
Malaysia	1,02	14,78	4,39	20,89	41,09	4,39	10,95
Amerika Serikat	0,65	1,36	15,31	1,83	19,15	1,93	10,80
Kanada	5,00	6,94	6,31	6,58	24,83	6,53	6,57
Uni Emirat Arab	0,38	14,81	2,48	1,98	19,64	0,01	4,92
Vietnam	1,47	1,91	2,20	5,71	11,29	1,15	4,65
Lainnya	26,49	14,85	37,69	29,67	108,70	11,31	4,48
Nilai Impor Sulsel	173,31	234,92	274,33	237,10	919,67	218,09	185,62

Sumber: Cognos, diolah

Tabel E. 1 Perkembangan Jumlah Aliran Uang Kertas di Depo KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan (Rp Triliun)

Periode		Jumlah			yoy		
		Inflow	Outflow	Netflow	Inflow	Outflow	Netflow
2024	I	8,08	4,89	3,19	1,27%	58,33%	-34,78%
	II	5,01	4,25	0,76	-18,54%	-36,34%	-242,15%
	III	4,18	2,81	1,37	-10,79%	-3,37%	-22,91%
	IV	2,08	4,44	-2,36	-45,76%	-27,04%	4,96%
	2024	19,35	16,40	2,96	-14,6%	-12,6%	-23,9%
2025	I	7,12	4,71	2,41	-11,90%	-3,75%	-24,41%
	II	5,04	2,50	2,54	0,65%	-41,14%	235,68%
	III	3,59	4,49	-0,90	-14,23%	59,68%	-165,50%
	IV	2,94	4,91	-1,97	41,23%	10,61%	-16,45%
	2025	18,69	16,61	2,08	-3,4%	1,3%	-29,7%
2026	I	7,57	5,39	2,17	6,33%	14,59%	-9,81%
	II	4,98	3,18	1,80	-1,27%	27,02%	-29,18%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel E. 2 Perkembangan Jumlah Aliran Uang Logam di Depo KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan (Rp Juta)

Periode		Jumlah			yoy		
		Inflow	Outflow	Netflow	Inflow	Outflow	Netflow
2024	I	3,77	1380,85	(1377,08)	642,72%	2,10%	1,86%
	II	1,38	1042,07	(1040,69)	3167,30%	-35,42%	-35,51%
	III	2,08	972,44	(970,35)	232,58%	-19,99%	-20,12%
	IV	15,25	1289,41	(1274,16)	1294,16%	12,40%	11,18%
	2024	22,49	4684,76	(4662,28)	890,2%	-12,1%	-12,5%
2025	I	11,77	968,62	(956,85)	211,87%	-29,85%	-30,52%
	II	8,46	810,05	(801,59)	513,69%	-22,26%	-22,97%
	III	17,12	1030,05	(1012,93)	721,69%	5,92%	4,39%
	IV	2,56	1084,66	(1082,10)	-83,18%	-15,88%	-15,07%
	2025	39,92	3893,39	(3853,47)	77,6%	-16,9%	-17,3%
2026	I	7,77	1122,87	(1115,10)	-34,00%	15,92%	16,54%
	II	1,99	951,87	(949,88)	-76,51%	17,51%	18,50%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tabel E. 3 Perkembangan Transaksi Nontunai Melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (Lembar & Rp Triliun)

Periode		Volume (lembar)	Nilai (Rp Triliun)	yoy	
				Volume	Nilai
2024	I	69.342	3,95	-51,92%	-48,06%
	II	72.282	3,93	-45,73%	-42,24%
	III	87.392	4,69	-39,96%	-37,65%
	IV	102.983	4,78	65847,95%	-40,56%
	2024	331.999	17,35	-21,54%	-42,11%
2025	I	71.846	3,77	3,61%	-4,58%
	II	31.311	1,87	-56,68%	-52,42%
	III	87.360	4,23	-0,04%	-9,80%
	IV	113.861	4,53	10,56%	-5,12%
	2025	304.378	14,40	-8,32%	-16,99%
2026	I	68.934	3,39	-4,05%	-10,03%
	II	84.422	2,48	169,62%	32,34%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Daftar Istilah

Bab I

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian atau keadaan yang menyebabkan perubahan kepemilikan kendaraan bermotor.

Ekspansi

Tindakan yang dilakukan dengan tujuan menjadi lebih besar, atau bisa juga menjadi lebih luas.

Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)

Hari-hari besar keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan menjadi momen penting bagi masyarakat untuk menjalankan ibadah keagamaan dan merayakan tradisi.

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

Indikator yang mencerminkan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi di masa mendatang, biasanya untuk periode enam bulan ke depan

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indikator dalam survei yang mengukur persepsi dan ekspektasi konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan prospek masa depan

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)

Indikator yang mencerminkan persepsi konsumen atas situasi ekonomi terkini yang menjadi dasar dalam menilai keyakinan dan perilaku konsumsi.

Indeks Penjualan Riil (IPR)

Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja penjualan eceran dalam SPE.

Kontraksi

Penurunan tingkat kegiatan ekonomi, serta barang dan jasa yang tersedia.

Lapangan Usaha

Bidang kegiatan dari suatu pekerjaan atau tempat seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Penanaman Modal Asing (PMA)

Kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri.

Saldo Bersih Tertimbang (SBT)

Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “meningkat” dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban “menurun” dan mengabaikan jawaban “sama”. Timbangan/bobot yang digunakan dalam perhitungan SBT adalah nilai *share* masing-masing lapangan usaha terhadap lapangan usaha sektor PDB (atas dasar konstan tahun 2000) dengan total bobot sama dengan satu.

Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)

Survei triwulan yang dilaksanakan sejak triwulan III 2010 terhadap perusahaan yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan dipilih secara purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan atau pengisian kuesioner langsung oleh responden.

Survei Konsumen (SK)

Survei bulanan Bank Indonesia untuk mengetahui perkembangan konsumsi rumah tangga (salah satu komponen dalam menghitung pertumbuhan ekonomi), persepsi konsumen terhadap perkembangan harga ke depan dan bagaimana kondisi keuangan rumah tangga. Survei dilakukan kepada 200 (dua ratus) rumah tangga setiap bulannya.

Quarter to Quarter (qtq)

Persentase perubahan pada kuartal tertentu relatif terhadap satu kuartal sebelumnya.

Year on Year (yoy)

Sering disebut perubahan tahunan, adalah perubahan nilai pada bulan bersangkutan dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Bab II

Administered Prices

Harga barang/jasa yang diatur oleh pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik.

Beras SPHP

Beras yang digulirkan pemerintah melalui Perum Bulog sejak 2023 sebagai bagian dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan bertujuan menstabilkan harga dan pasokan.

Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)

Gerakan sinergis Bank Indonesia dan pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga pangan, selaras dengan fungsi stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS)

Gerakan penguatan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi (GNPIP) sebagai respons terhadap semakin kompleksnya tantangan ketahanan pangan.

Gerakan Pangan Murah (GPM)

Program operasi pasar pangan oleh Pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga dan mengendalikan inflasi melalui penjualan komoditas pangan strategis dengan harga lebih rendah dari pasar.

High Level Meeting (HLM)

Forum rapat koordinasi berkala di tingkat pimpinan daerah dan instansi, yang digunakan untuk merumuskan arah kebijakan, menyepakati langkah strategis, serta memperkuat koordinasi pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan.

HBKN

Periode hari raya dan peringatan nasional (seperti Ramadan, Idulfitri, Natal, Tahun Baru) yang biasanya meningkatkan permintaan dan berpotensi menimbulkan tekanan inflasi musiman.

Inflasi IHK

Perubahan harga barang dan jasa dalam satu periode, yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Inflasi Inti

Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *volatile foods* dan *administered prices*.

Month to month (mtm)

Perubahan nilai pada bulan bersangkutan dibandingkan bulan sebelumnya.

Safe haven

Instrumen atau aset investasi yang dianggap aman pada periode ketidakpastian ekonomi (contoh: emas).

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Forum koordinasi yang dibentuk di tingkat provinsi/kabupaten/kota untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi daerah. TPID diketuai oleh kepala daerah, beranggotakan OPD terkait, Bank Indonesia, Bulog, BPS, serta instansi vertikal lainnya. TPID memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (empat pilar pengendalian inflasi).

Year to Date (ytd)

Sering disebut perubahan kumulatif, adalah perubahan nilai pada bulan bersangkutan dibandingkan bulan Desember tahun sebelumnya.

Bab III

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio efisiensi bank yang mengukur beban operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin tinggi nilai BOPO maka semakin tidak efisien operasi bank.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

Sumber dana yang dimiliki oleh bank yang berasal dari dana simpanan masyarakat atau korporasi yang berupa tabungan, giro dan deposito.

Debitur

Perusahaan atau individu yang berhutang uang kepada lembaga lain.

Deposito

Uang yang disimpan dalam rekening dengan jangka waktu tertentu. Deposito baru bisa dicairkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya, biasanya 1, 3, 6, atau 12 bulan.

Giro

Produk simpanan perbankan yang penarikannya bisa dilakukan kapan pun lewat selebar cek.

Intermediasi Perbankan

Proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah maupun individu untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

Indikator yang mencerminkan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi di masa mendatang, biasanya untuk periode enam bulan ke depan

Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja

Indikator dalam survei yang mengukur persepsi RT terhadap kondisi ketersediaan lapangan kerja saat ini

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indikator dalam survei yang mengukur persepsi dan ekspektasi konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan prospek masa depan

Indeks Penghasilan Saat Ini

Indikator yang mencerminkan persepsi konsumen tentang pendapatan mereka saat ini dibandingkan dengan kondisi enam bulan lalu.

Kredit

Penyediaan dana berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit Investasi

Fasilitas kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru dan atau kebutuhan khusus terkait investasi.

Kredit Konsumsi

Fasilitas kredit yang diberikan kepada perorangan/pengusaha untuk membiayai kebutuhan yang bersifat konsumtif seperti, biaya upacara agama, biaya pendidikan, pembelian alat-alat rumah tangga atau kebutuhan konsumtif lainnya.

Kredit Modal Kerja (KMK)

Fasilitas kredit yang diperuntukkan bagi pelaku usaha agar modalnya dapat tercukupi.

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)

Fasilitas kredit yang diperuntukkan untuk membeli, membangun, dan merenovasi rumah dengan jangka waktu dan bunga tertentu.

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)

Fasilitas kredit yang diberikan untuk membeli kendaraan roda dua atau roda empat, baik baru.

Bab IV

BI-FAST

Infrastruktur sistem pembayaran ritel Bank Indonesia yang memungkinkan transfer dana secara *real-time*, aman, tersedia 24 jam, dan berbiaya murah.

SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)

Sistem yang digunakan untuk memproses transfer dana dan penyelesaian transaksi antarbank melalui mekanisme kliring secara nasional.

Warkat

Dokumen atau surat berharga yang digunakan sebagai alat pembayaran atau dasar transaksi dalam proses kliring, seperti cek dan bilyet giro.

Kliring

Proses perhitungan dan penyelesaian kewajiban pembayaran antarbank yang dilakukan secara terpusat untuk memperlancar transaksi keuangan.

BI-RTGS (Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*)

Sistem yang digunakan untuk memproses dan menyelesaikan transfer dana bernilai besar secara *real-time* dan per transaksi.

QRIS Antar Negara (*Cross Border QRIS*)

Fasilitas pembayaran lintas negara yang memungkinkan transaksi menggunakan QRIS antara Indonesia dan negara mitra yang telah bekerja sama.

QRIS Tap

Metode pembayaran berbasis QRIS yang menggunakan teknologi *Near Field Communication* (NFC), sehingga transaksi dapat dilakukan dengan mendekatkan ponsel ke terminal pembayaran.

PJP (Penyedia Jasa Pembayaran)

Lembaga yang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk menyediakan layanan pembayaran, seperti transfer dana, uang elektronik, dompet digital, dan layanan pembayaran lainnya.

Bantuan Sembako Non Tunai (BSNT)

Bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di *e-warung* yang bekerja sama dengan bank

Inflow

Adalah aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.

Outflow

Adalah aliran keluar uang kartal ke Bank Indonesia.

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Standarisasi pembayaran menggunakan metode *QR Code* agar proses transaksi dengan *QR Code* yang dapat digunakan oleh berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran.

Quarter to Quarter (qta)

Persentase perubahan pada kuartal tertentu relatif terhadap satu kuartal sebelumnya.

Bab V

Angkatan Kerja

Penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan

Ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Indeks Pembangunan Manusia

Ukuran komposit yang mengukur tingkat pembangunan manusia suatu wilayah berdasarkan tiga dimensi utama: umur panjang, dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Nilai Tukar Petani (NTP)

Indikator kesejahteraan petani yang menggambarkan perbandingan antara harga yang diterima petani atas hasil produksi dengan harga yang dibayar untuk biaya produksi dan konsumsi. $NTP > 100$ berarti kesejahteraan petani meningkat.

Gini Ratio

Indeks untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Penduduk Usia Kerja

Semua penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, yang dianggap mampu dan berpotensi untuk melakukan pekerjaan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase banyaknya angkatan kerja yang aktif secara ekonomi terhadap banyaknya penduduk usia kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

Umur Harapan Hidup (UHH)

Perkiraan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak lahir.

Bab V I

BI-Rate

Suku bunga kebijakan yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai acuan bank dalam menentukan tingkat pinjaman dan tabungan, berfungsi sebagai instrumen moneter untuk mengendalikan inflasi, stabilitas rupiah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Deposit Facility

Fasilitas bank sentral untuk menyimpan kelebihan dana oleh bank komersial dengan imbalan bunga, sebagai instrumen pengendalian likuiditas dan stabilitas

DHE SDA (Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam)

Devisa yang berasal dari kegiatan ekspor komoditas sumber daya alam yang pengelolaannya diatur sesuai ketentuan pemerintah untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan ekonomi domestik.

El Nino

Fenomena iklim yang ditandai dengan perubahan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang dapat memengaruhi pola curah hujan serta produktivitas sektor pertanian.

Fed Funds Rate (FFR)

Suku bunga acuan bank sentral Amerika Serikat (*Federal Reserve*). Perubahan FFR memengaruhi aliran modal global, nilai tukar, inflasi impor, dan stabilitas makro domestik.

HMA (Harga Mineral Acuan)

Harga referensi mineral yang ditetapkan pemerintah sebagai dasar dalam pembentukan harga transaksi komoditas mineral di dalam negeri.

HPM (Harga Patokan Mineral)

Harga mineral yang ditetapkan pemerintah berdasarkan formula tertentu dengan mempertimbangkan HMA dan digunakan sebagai acuan transaksi komoditas mineral.

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

Indikator yang mencerminkan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi di masa mendatang, biasanya untuk periode enam bulan ke depan.

Indeks Dolar AS (DXY)

Indikator yang mengukur kekuatan nilai tukar dolar AS terhadap sekeranjang mata uang utama dunia. Kenaikan DXY mencerminkan penguatan dolar AS yang dapat menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan biaya impor. Kondisi ini berpotensi mendorong *imported inflation* melalui kenaikan harga barang impor, bahan baku, energi, dan komoditas yang diperdagangkan dalam dolar AS.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Indikator dalam survei yang mengukur persepsi dan ekspektasi konsumen mengenai kondisi ekonomi saat ini dan prospek masa depan.

Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)

Indikator dalam survei yang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini.

Imported Cost

Peningkatan biaya produksi akibat kenaikan harga barang impor atau pelemahan nilai tukar yang memengaruhi biaya bahan baku dan barang modal.

Lending Facility

Fasilitas bank sentral untuk meminjamkan dana kepada bank komersial dengan bunga tertentu sebagai instrumen dalam operasi moneter.

Makanan Bergizi Gratis (MBG)

Program Pemerintah yang menyediakan makanan bergizi secara gratis untuk masyarakat, terutama pelajar. Program ini meningkatkan konsumsi pangan dan dapat memengaruhi permintaan komoditas strategis.

Mini Distribution Centre (MDC)

Program stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui kendaraan mobile untuk penyediaan bahan pangan strategis langsung kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau dan informasi harga acuan di pasar.

PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah)

Insentif fiskal berupa pembayaran PPN oleh pemerintah untuk mendukung sektor atau aktivitas ekonomi tertentu.

RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya)

Dokumen perencanaan kegiatan operasional dan produksi perusahaan pertambangan yang memperoleh persetujuan pemerintah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Sigap Sultan

Sistem Informasi Harga dan Pasokan Pangan Sulawesi Selatan (Sigap Sultan), platform pemantauan harga dan pasokan pangan di Sulsel yang digunakan oleh TPID sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemantauan efektivitas kebijakan pengendalian inflasi.
<https://www.neracapangansulsel.id/>

Upah Minimum Provinsi (UMP)

Kebijakan pemerintah yang menetapkan batas minimum upah bagi pekerja untuk menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan UMP dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, mendorong konsumsi masyarakat, dan berpotensi meningkatkan permintaan berbagai barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok dan konsumsi sehari-hari.

Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan (Satgas Saber Pangan)

Tim gabungan yang dibentuk oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bekerja sama dengan Polri (Satgas Pangan) dan instansi terkait untuk memastikan stabilitas harga, ketersediaan stok, serta keamanan bahan pokok.



Dewan Redaksi



Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Periode Agustus 2026

Penanggung Jawab

Rizki Ernadi Wimanda (Direktur Eksekutif)

Pemimpin Redaksi

Firman Hidayat (Direktur)

Penyunting

Oki Hermansyah (Deputi Direktur)

Deded Tuwanda Prima (Asisten Direktur)

Penyusun

Kelompok Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) Provinsi

Kontributor

- **Kelompok Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) Wilayah**
- **Divisi Implementasi SP, Pengawasan SP-PUR, dan Perlindungan Konsumen**
- **Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah**

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan

Jl. Jendral Sudirman No. 3 Makassar 90113, Indonesia

Telp. +62 411 3615188 / 3615189

Fax. +62 411 3615170

www.bi.go.id

